

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum dan Kronologis LKPJ Gubernur Tahunan	1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta	3
1.3 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta	6
1.3.1 Kondisi Geografis.....	7
1.3.2 Kondisi Demografis.....	7
1.3.3 Kondisi Ekonomi.....	9
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
2.1 Visi dan Misi	1
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi DKI Jakarta	3
2.3 Prioritas Provinsi DKI Jakarta	8
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan	1
3.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
3.2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	2
3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan.....	4
3.2.3 Permasalahan dan Solusi.....	
3.3 Pengelolaan Daerah	72
3.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	72
3.3.2 Target dan Realisasi Belanja	73
3.3.3 Permasalahan dan Solusi.....	79

BAB IV	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
	4.1 Program Dedicated.....	1
	4.2 Program menurut Bidang Pembangunan.....	8
	4.2.1 Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa.....	8
	4.2.2 Bidang Pemerintahan.....	14
	4.2.3 Bidang Ekonomi.....	32
	4.2.4 Bidang Pendidikan dan Kesehatan.....	55
	4.2.5 Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	63
	4.2.6 Bidang Sosial Budaya.....	67
	4.2.7 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	77
	4.2.8 Bidang Sarana dan Prasarana Kota.....	84
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	1
	5.1 Tugas Pembantuan yang diterima	1
	5.2 Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi	10
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	1
	6.1 Kerjasama Antar Daerah/Kota.....	1
	6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan	1
	6.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	4
	6.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	15
	6.2.1 Dasar Hukum	15
	6.2.2 Mitra Kerjasama dan Bidang Kerjasama	16
	6.2.3 Hasil dari Kerjasama	18
	6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah....	21
	6.3.1 Kebijakan dan Kegiatan	21
	6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	22
	6.4 Pembinaan Batas Wilayah	25
	6.4.1 Kebijakan dan Kegiatan	25
	6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	25

6.4.3	Permasalahan dan Solusi.....	25
6.5	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	26
6.5.1	Bencana yang Terjadi	26
6.5.2	Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana	28
6.6	Pengelolaan Kawasan Khusus	32
6.6.1	Jenis Kawasan	32
6.6.2	Sumber Anggaran	33
6.6.3	Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi	33
BAB VII	PENUTUP	1

Daftar Tabel

		halaman
Tabel 1.1	Struktur Usia Penduduk Kota Jakarta Tahun 2007	8
Tabel 1.2	Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2007	8
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2007 (10 tahun ke atas)	9
Tabel 1.4	Struktur Perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006-2007	10
Tabel 1.5	PDRB menurut Lapangan Usaha DKI Jakarta tahun 2006-2007	12
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007	4
Tabel 3.2	Realisasi PAD Tahun 2007	5
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007	7
Tabel 3.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2007	25
Tabel 3.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2007	27
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2007	31
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2007	33
Tabel 3.8	Realisasi pendapatan Retribusi Rekreasi dan Olah raga Tahun 2007	37
Tabel 3.9	Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2007	39
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2007	42
Tabel 3.11	Realisasi Pendapatan Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun 2007	43
Tabel 3.12	Tabel Realisasi Pendapatan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (PT. Patungan) Tahun 2007	46
Tabel 3.13	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Pengelola (BP) Tahun 2006/7	53
Tabel 3.14	Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Sewa Aset Daerah Tahun 2007	54
Tabel 3.15	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Kerja Sama Aset Daerah Tahun 2007	55

Tabel 3.16	Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007	58
Tabel 3.17	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2007	60
Tabel 3.18	Realisasi Penerimaan Rupa-Rupa Pendapatan pada Perhitungan APBD Tahun 2007	61
Tabel 3.19	Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun 2007	64
Tabel 3.20	Realisasi Belanja Daerah menurut Bidang Pembangunan Tahun 2007	73
Tabel 3.21	Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis belanja Tahun 2007	74
Tabel 3.22	Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2007	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum dan Kronologis LKPJ Gubernur Tahunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan PP 108 Tahun 2000, Gubernur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Perhitungan APBD. LPJ tersebut dibahas oleh DPRD, dan DPRD dapat menerima atau menolak LPJ tersebut.

Penolakan LPJ Gubernur terjadi pada LPJ tahun 2002, walaupun pada akhirnya diterima. Pada saat itu, terjadi berbagai wacana yang berkembang tentang ditolak ataupun diterimanya LPJ Gubernur. Menyikapi hal tersebut, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa LPJ Tahunan Gubernur lebih bersifat progress report. Surat Edaran tersebut mempertegas penjelasan Umum PP 108/2000. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003 LPJ Gubernur lebih bersifat progress report, dimana DPRD akan memberikan catatan/rekomendasi terhadap progress report tersebut.

Pada Tahun 2004, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat.

Berdasarkan kedua PP tersebut, setiap tahun Gubernur harus menyampaikan laporan sebagai berikut :

- LKPJ yang disampaikan ke DPRD
- Laporan Keuangan disampaikan ke BPK untuk diaudit, yang selanjutnya Laporan Keuangan yang telah diaudit, disampaikan sebagai lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD)
- LPPD yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
- Informasi LPPD kepada Masyarakat

Selain itu, beberapa Peraturan Perundangan lain juga mengatur mengenai laporan tahunan Gubernur, antara lain :

- Inpres 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan Gubernur menyampaikan LAKIP kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK dan mewajibkan Kepala Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg-PAN).

Karena Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang merupakan petunjuk pelaksanaan PP 58 tahun 2005 belum diterbitkan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2005 masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002. Berdasarkan Permendagri tersebut, LKPJ Tahun 2005 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah. LKPJ tersebut disampaikan kepada DPRD namun belum diaudit oleh BPK. Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ tersebut adalah Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Tahun 2005 dan Catatan DPRD atas pelaksanaan APBD 2005

Walaupun pada tanggal 15 Mei 2006 telah diterbitkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan PP 58 tahun 2005, namun pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2006 juga masih menggunakan Permendagri nomor 29 tahun 2002. Dengan terbitnya PP nomor 3 Tahun 2007, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memisahkan LKPJ 2006 dari Laporan Keuangan 2006.

LKPJ tahun 2006 adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD. Output pembahasan LKPJ tahun 2006 adalah Keputusan DPRD yang berisi Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan

Sedangkan Laporan Keuangan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit . Hasil Audit BPK dan Laporan Keuangan merupakan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2006. Karena pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2006 masih mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan belum sepenuhnya mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, maka Laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah

1.2 Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta

Sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup panjang mulai tahun 1527 hingga sekarang. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada tahun 1527, Kota Jakarta bernama Sunda Kelapa, merupakan sebuah kota kecil Bandar Pelabuhan yang ramai lalu-lintas perdagangan.

Strategisnya letak Sunda Kelapa yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, menjadi ajang pertempuran antara balatentara Faletehan melawan Portugis. Pada pertempuran tersebut kemenangan ada di pihak

Faletehan, yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi *fathan mubina* (Jayakarta) yang artinya kemenangan akhir.

Pada tahun 1602 seorang pegawai VOC yaitu *Van Raay* mendirikan Benteng di Teluk Jakarta, dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi “Batavia”. Benteng ini menjadi pusat persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia Timur. Sejak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh nusantara.

Berdasarkan Ordonansi (Undang-Undang), tanggal 18 Maret Tahun 1905 Batavia ditetapkan sebagai daerah lokal yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut dengan nama “*Gemeente Batavia*”. Inilah gemeente pertama yang di bentuk di Hindia Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km², belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, *Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia* dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan *Wetevreden*, serta 6 *onderdistrik* (Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priuk, Gambir, Senen, Tanah Abang).

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda abad ke-19, *Stad* (kota) Betavia dengan daerah-daerah sekitarnya merupakan satu karesidenan, yang dipimpin oleh seorang residen. Daerah administratif Karesidenan Batavia di bagi pula secara administratif dalam wilayah yang lebih kecil, yang disebut “*afdeling*” . Sampai dengan abad 20. Karesidenan tersebut terdiri dari lima wilayah, yaitu: (1) *Afdeling “Stad en Voorsteden van Batavia”* (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) *Afdeling Meester Cornelis* (sekarang Jatinegara). (3) *Afdeling Tangerang*. (4) *Afdeling Buitenzorg* (Bogor), (5) *Afdeling Karawang*.

Pada tahun 1922 keluar Undang-undang tentang Pembaharuan Pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini berturut-turut terbit Undang-Undang (UU) Provinsi (1924), Undang-Undang Regentschap (Kabupaten, 1924) dan Undang-Undang *Stadsgemeente* (*Stadsgemeente Ordonnantie*, disingkat: S.G.O, 1926).

Selanjutnya “*Gemeente Batavia*” ditetapkan menjadi “*Stadsgemeente Batavia*”, yang kemudian menyelenggarakan pemerintah daerah menurut

ketentuan-ketentuan dalam S.G.O. *Stadsgemeente Ordonnantie* menetapkan susunan Pemerintah suatu *stadsgemeente* terdiri dari: (1) *Raad* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); (2) *College van Burgemeester en Wethouders* (Dewan Pemerintah Daerah); (3) *Burgemeester* (Walikota), Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang. Dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah itu, pihak Jepang mengeluarkan Undang-undang No. 42 tentang "Perubahan Tata Pemerintahan Daerah". Menurut Undang-Undang tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut "*Syuu*" (Keresidenan), "*Syuu*" dibagi dalam beberapa "*Ken*" (Kabupaten) dan "*Shi*" (*stadsgemeente*).

Kalau dalam *stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan pamongpraja, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, "*shi*" (*stadsgemeente*) mengerjakan segala urusan pemerintahan (pamongpraja) dalam lingkungan daerahnya. Urusan pemerintah (pamongpraja) di dalam '*stadsgemeente*' yang diurus oleh *regent* (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau *wijkmeester*, sekarang termasuk dalam kekuasaan "*Shichoo*" (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai *shi* dan menjalankan urusan pemerintahan *shi* dibawah pemerintahan dan pimpinan "*shichoo*".

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, "*Gunseikani*" (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang) dapat membentuk "*tokubetsu shi*" (*stadsgemeente* luar biasa). Bedanya antara "*tokubetsu shi*" (*stadsgemeente* luar biasa). Bedanya antara "*tokubetsu shi*" dan "*shi*" adalah, bahwa *tokubetsu* tidak merupakan daerah otonom dibawah *syuu*, melainkan langsung dibawah *gunseikan*. Dengan demikian, kedudukan pemerintahan kota Jakarta telah meningkat lagi, "*Jakaruta Tokubetsu Shi*" dipimpin oleh "*tokubetsu Shichoo*" dan beberapa orang "*Zyoyaku*" (pegawai tinggi), yang masing-masing diangkat pula oleh *Gunseikan*.

Sampai berakhirnya pendudukan Jepang di tahun 1945, kota Jakarta adalah satu-satunya "*tokubetsu Shi*" di Indonesia. **Jakarta Tokubetsu Shichoo yang pertama adalah Tsukamoto, dan yang terakhir adalah Hasegawa.**

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kota Jakarta diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 jo Undang-Undang No.2 PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Secara singkat, sejarah Kota Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggal 24 Januari 1950 dari Stad Gemeente Batavia menjadi Kota Praja Jakarta;
2. Tanggal 18 Januari 1958 Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Swatantra dinamakan Kota Praja Jakarta Raya;
3. Tahun 1961 dengan PP Nomor 2 Tahun 1961 jo Undang-Undang No.2 PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Undang- tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Sejak zaman pemerintahan Belanda, Jepang dan Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta selalu menjadi Pusat Pemerintahan dengan corak dan fungsinya menurut kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dalam rangka mengendalikan daerah-daerah jajahan di seluruh Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang Jakarta menjadi **pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

1.3 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1.3.1 Kondisi Geografis;

Batas administrasi Jakarta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten. Di sebelah

utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal.

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6 12' Lintang Selatan dan 106 48" Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 661,52 km² dan berupa lautan 6.977,5 km². Wilayah DKI Jakarta memiliki sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Ketinggian maksimum Kota Jakarta 7 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian wilayah khususnya di sekitar pantai laut Jawa terdapat beberapa tempat yang berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga rawan genangan.

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada bulan Februari tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

1.3.2 Kondisi Demografis.

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2007 menurut data statistik sebanyak 8.961.680 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.483.001 dan perempuan 4.478.679 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan usia produktif yaitu 82,71 % sebagaimana terlihat pada struktur usia pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Struktur Usia Penduduk Kota Jakarta Tahun 2007

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0 - 4	391.269	369.685	760.954
2	5 - 9	372.557	338.778	711.335
3	10 - 14	345.315	313.516	658.831
4	15 - 19	370.022	414.841	784.863
5	20 - 24	474.407	538.526	1.012.933
6	25 - 29	509.407	524.597	1.034.004
7	30 - 34	449.077	443.455	892.532
8	35 - 39	395.128	385.114	780.242
9	40 - 44	318.036	299.248	617.284
10	45 - 49	245.515	248.786	494.301
11	50 - 54	217.825	213.025	430.850
12	55 - 59	141.852	135.777	277.629
13	60 - 64	108.283	108.232	216.515
14	65 - 69	73.344	65.914	139.258
15	70 - 74	36.624	36.339	72.963
16	75 +	34.340	42.846	77.186
	Jumlah	4.483.001	4.478.679	8.961.680

Sumber : Susenas 2007, BPS Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,84 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,44 juta orang dan perempuan sebanyak 1,41 juta orang. Sementara jumlah pengangguran terbuka mencapai 12,57 persen. Menurut lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang perdagangan, restoran dan hotel (37,4%); kemudian jasa-jasa (21,7%); dan industri pengolahan (18,4%).

Tabel 1.2. Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2007

Lapangan Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(6)	(7)
1. Pertanian	19.945	0,5
2. Pertambangan	8.282	0,2
3. Industri Pengolahan	708.643	18,4
4. Listrik, Gas & Air	12.094	0,3
5. Bangunan	166.999	4,3
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	1.435.739	37,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	369.286	9,6
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	287.133	7,5
9. Jasa-jasa	834.823	21,7
Jumlah	3.842.944	

Sumber : Sakernas Agustus 2007, BPS Privinsi DKI Jakarta

Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2.638.626 jiwa atau 35,23 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Bahkan yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai sebanyak 923.632 orang yang terdiri atas sebanyak 355.756 orang pada level DI hingga DIII, dan bahkan sebanyak 567.876 orang atau sebesar 7,58 persen berpendidikan sarjana.

Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2007 (10 tahun ke atas)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	365.717 (9,83)	526.436 (13,96)	892.153 (11,91)
2	SD	687.108 (18,47)	876.321 (23,24)	1.563.429 (20,88)
3	SMTp	703.530 (18,92)	768.021 (20,37)	1.471.551 (19,65)
4	SMTA	1.445.172 (38,86)	1.193.454 (31,65)	2.638.626 (35,23)
5	Diplomal I - III	179.865 (4,84)	175.891 (4,67)	355.756 (4,75)
6	Universitas	337.783 (9,08)	230.093 (6,11)	567.876 (7,58)
	Jumlah	3.719.175 (100,00)	3.770.216 (100,00)	7.489.391 (100,00)

Sumber : Susenas 2007, BPS Provinsi DKI Jakarta

1.3.3 Kondisi ekonomi

1.3.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Pada dasarnya potensi unggulan perekonomian daerah dapat dilihat dari struktur perekonomian daerah. Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2007 didominasi oleh tiga sektor utama, yang dilihat dari nilai tambah sektoral menurut harga berlaku. Nilai tambah sektoral tahun 2007 menunjukkan sebesar 65,12 persen kontribusi ekonomi berasal dari sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; serta industri pengolahan. Ketiga sektor ini, masing-masing memberikan kontribusi yaitu 28,72 persen untuk sektor keuangan, persewaan & jasa; sebesar 20,40 persen dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sebesar 16,00 persen dari sektor industri pengolahan.

Tabel 1.4 Struktur Perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006-2007

Lapangan Usaha	Persentase	
	2006	2007
1. Pertanian	0,10	0,10
2. Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,47
3. Industri Pengolahan	15,93	16,00
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,06	1,07
5. Bangunan	11,18	11,21
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,07	20,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,80	9,13
8. Keuangan, Perseroan dan Perusahaan	29,80	28,72
9. Jasa-jasa	12,58	12,90
PDRB DKI Jakarta	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

1.3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Jakarta tahun 2007 ditunjukkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, meningkat sebesar 6,39 persen dibanding tahun 2006. Semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi (14,65%) dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian (0,46%). Pada tahun 2007, pertumbuhan positif yang dicapai oleh Jakarta, terutama didorong oleh pertumbuhan positif yang dicapai oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor-sektor tersebut memberikan andil sebesar 3,97 persen dari total pertumbuhan sebesar 6,39 persen. Meskipun tidak menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2007. Sektor ini memberikan andil sebesar 1,42 persen dari total pertumbuhan 6,39 persen yang dicapai. Sementara sektor pengangkutan dan komunikasi,

dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya hanya mampu memberikan sumbangan terbesar kedua dengan nilai sumbangan sebesar 1,32 persen. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan andil sebesar 1,23 persen.

Bila ketiga sektor tersebut mampu menyumbang sebesar 3,97 persen dari total pertumbuhan sebesar 6,39 persen, maka sisanya sebesar 2,42 persen berasal dari sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi secara nasional untuk tahun yang sama yang mencapai sebesar 6,32 persen, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI masih sedikit lebih tinggi.

Tabel 1.5 PDRB menurut Lapangan Usaha DKI Jakarta tahun 2006-2007

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (miliar Rp)		Harga Konstan (miliar Rp)		Laju Pertum- buhan Th. 2007 (%)
	2006	2007	2006	2007	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	490,49	566,86	293,49	296,19	0,92
Pertambangan & Penggalian	2.417,63	2.636,09	933,06	937,34	0,46
Industri Pengolahan	79.886,69	90.419,85	53.646,72	56.155,16	4,68
Listrik, gas, & air bersih	5.305,82	6.031,53	2.085,80	2.178,40	4,44
Bangunan	56.071,98	63.365,16	31.166,11	33.541,02	7,62
Perdagangan, hotel & restoran	100.672,15	115.242,26	67.684,40	72.450,28	7,04
Pengangkutan dan komunikasi	44.151,00	51.607,49	26.608,52	30.505,99	14,65
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	149.469,48	162.300,92	94.280,87	98.427,62	4,40
Jasa-jasa	63.119,57	72.870,56	36.012,33	38.198,79	6,07
PDRB	501.584,81	565.040,72	312.711,30	332.690,80	6,39

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Inflasi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Laju inflasi Tahun 2007 dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta adalah sebesar 6,04 persen, sedangkan di tingkat nasional sebesar 6,59 persen. Dibandingkan dengan inflasi nasional, pada beberapa tahun terakhir inflasi Jakarta lebih rendah dari nasional.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Renstra 2002-2007, adalah :

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.

Penjelasan Visi sebagai berikut :

- (1) Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Kota Perdagangan dan Jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional
- (2) Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya
- (3) Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

2.1.2 Misi

Adapun misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai penjabaran visi tersebut di atas adalah:

- a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau;

- b) Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat;
- c) Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota;
- d) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota;
- e) Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Pemahaman lebih dalam terhadap misi pembangunan Jakarta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif;
- (2) Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya;
- (3) Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis;
- (4) Keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif,
- (5) Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparaturnya yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi DKI Jakarta

2.2.1 Arah Kebijakan

Periode 2005-2007 adalah tahap pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk mendukung stabilitas pembangunan nasional (stabilization) serta peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi hukum, peningkatan ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus pembangunan pada tahun 2006 merupakan kelanjutan dari program pemantapan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2005.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 secara umum diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititikberatkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil dan demokratis (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan demikian harapan masyarakat akan adanya perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good governance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan di masa mendatang. Dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membangun kotanya.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan di atas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana ini akan memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Arah Kebijakan Belanja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 memuat 8 (delapan) hal pokok, yaitu :

- a) Melakukan efisiensi ;
- b) Menjamin terlaksananya program dedicated;
- c) Memprioritaskan kegiatan urusan wajib, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006.
- d) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- e) Mengakomodir aspirasi masyarakat kelurahan (bottom-up);
- f) Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang;
- g) Memprioritaskan pada program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat; dan
- h) Menata proporsi alokasi anggaran antar wilayah, provinsi dengan wilayah, serta antara SKPD dengan Sudin dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya.

Dengan ditetapkannya Arah Kebijakan Belanja APBD Provinsi DKI Jakarta, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:

- a) Menurunkan jumlah Kegiatan dan Rincian Kegiatan,
- b) Mempertajam target dan capaian kegiatan guna memudahkan pengendalian pelaksanaannya.
- c) Menjamin kontinuitas pelaksanaan dan penyelesaian program dedicated; khususnya untuk program pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) yang berteknologi tinggi

diharapkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus merancang dan membangun (design and build) ITF dengan pembiayaan secara multi years.

- d) Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan cara memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib daerah;
- e) Peningkatan proporsi Kotamadya dan UPT (termasuk kecamatan dan kelurahan), serta rehab gedung SD dan SMP dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar. Pemilihan/prioritas sekolah yang direhabilitasi total berdasarkan hasil Asset Management Plan (AMP) Tahun 2005.
- f) Penyediaan alokasi anggaran khusus di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.
- g) Kebijakan PPMK lebih difokuskan untuk bina ekonomi dan bina sosial (dengan ratio 80:20). Pengelola dana ekonomi dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (antara lain; Koperasi, Badan Layanan Umum, dan lain-lain) dengan layanan pinjaman tanpa agunan.
- h) Peningkatan proporsi alokasi bidang pendidikan dan kesehatan. Pada Tahun 2007 Peningkatan proporsi tersebut utamanya digunakan untuk pemberian subsidi siswa (BOP) baik kepada siswa SD/MI, SMP/Tsanawiyah, baik negeri maupun swasta; dan pemberian subsidi siswa (BOP) bagi siswa SMA Negeri yang tidak mampu.
- i) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan guru berupa penambahan tunjangan penghasilan; termasuk pemberian kesra bagi guru NIP 15 yang mengajar di SD/SMP/SMK negeri dan MI/MTs/MA swasta, serta PTT dan guru bantu.
- j) Pengembangan dan peningkatan Usaha Kecil dan Menengah, melalui pemberian kemudahan akses keuangan, penyiapan market, bimbingan manajemen, pelatihan skill dan pemberian bantuan modal maupun barang produksi.

- k) Pengelolaan Jaminan Pelayanan kesehatan Daerah untuk pengembangan Gakin dan Non Gakin oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Provinsi DKI Jakarta.
- l) Penyelesaian secara menyeluruh terhadap perubahan status PT RS Pasar Rebo, dan RS Cengkareng.
- m) Penyelesaian masalah pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran, melalui inovasi kebijakan dan kemudahan pengurusan kebijakan dengan sistem satu atap.

2.2.2 Strategi

Untuk mencapai sasaran ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram.
- b) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c) Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah guna peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat.

- d) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, pedagang kaki lima dan lain-lain.
- e) Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang memadai, menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih sederhana untuk mencapai peningkatan investasi.
- f) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- g) Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektorsektor non unggulan, dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja.
- h) Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi program pendidikan 9 tahun, dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
- i) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan.

- j) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- k) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk (urbanisasi) ke Provinsi DKI Jakarta.
- l) Meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.
- m) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, pedagang kaki lima dan lain-lain.

2.3 Prioritas Provinsi DKI Jakarta

2.3.1 Prioritas Daerah

Berdasarkan kebijakan umum APBD disusun prioritas APBD untuk tahun 2007, prioritas pengalokasian APBD diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, prioritas pengalokasian APBD juga diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program dedicated).

- b) Prioritas pengalokasian pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
- c) Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
- d) Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- e) Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

Lebih lanjut , prioritas APBD dijabarkan ke dalam Dedicated Program dan Prioritas SKPD

2.3.1.1 Program Dedicated

Terdapat 15 jenis program kegiatan yang dikategorikan ke dalam program dedicated, antara lain :Banjir Kanal Timur (BKT), Kebutuhan pembebasan tanah adalah 401,2 ha, diantaranya terdiri dari 101 ha lahan fasum yang merupakan kewajiban pengembang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- a) **Normalisasi Sungai, Situ dan Saluran serta Waduk**, kegiatan ini didasarkan pada keinginan kuat Pemda untuk mewujudkan sungai dan situ yang tertata baik, serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota. Pada tahun 2007 dilakukan penataan situ di DKI Jakarta, yaitu terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Waduk Sunter Hulu, Cimanggis, Cilangkap, Rawa Lindung dan Rawa Badung, Pembangunan Situ Rawa Lindung dan Parkir Air Kali Sunter Hulu Pondok Ranggon serta Normalisasi Kali Sekretaris, Kali Banglio, Kali Tanjungan dan Kali Ciliwung Gajah Mada.
- b) **Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur (BKT)** , Untuk pembangunan BKT diperlukan biaya Rp4,99 Triliun terdiri dari pembebasan tanah sebesar Rp2,47 Triliun dan pembangunan fisik sebesar Rp2,52 Triliun. Pembebasan tanah BKT seluas 401,2 Ha merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan pembangunan fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sampai akhir tahun 2005, telah dilakukan pembebasan tanah seluas 104,2 Ha.
- c) **Pelabuhan Muara Angke**, Tahun 2007 dialokasikan anggaran untuk penyelesaian Pelabuhan Muara Angke, yang meliputi : pengerukan alur laut kolam pelabuhan, dermaga, break water, dan fasilitas pelengkap pelabuhan.
- d) **Busway**, Dari 15 koridor Busway sesuai Pola Transportasi Makro telah dibangun Busway koridor 1 (Blok M-Kota) pada tahun 2003-2004, koridor 2 (Pulo Gadung-Harmoni) dan koridor 3 (Harmoni-Kali Deres) pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 diselesaikan koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas), koridor 5 (Kampung Melayu-Ancol), koridor 6 (Ragunan-Kuningan) dan koridor 7 (Kampung Rambutan-Kampung Melayu).
Pada tahun 2007 dialokasikan anggaran untuk pembangunan Busway koridor 8, 9, dan koridor 10. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO),

halte, separator, pool dan ticketing sistem, struktur jalan, simpang, AMDAL, trase, penataan taman dan pohon, relokasi utilitas dan penataan lampu PJU, penertiban PKL dan penghuni liar, koordinasi penertiban di lima wilayah, park and ride serta pool Busway.

- e) **Mass Rapid Transit (MRT)/Subway**, Dalam rangka pembangunan MRT, pada tahun 2007 dilakukan *Detail Design* dan pembentukan *MRT Company*, sedangkan konstruksinya akan dimulai pada tahun 2008. Segmen Lebak Bulus-Patung Pemuda (Ratu Plaza), akan dibangun di atas jalan, sedangkan Patung Pemuda-Dukuh Atas dibangun di dalam tanah.

Pada saat pembangunan segmen Lebak Bulus-Patung Pemuda, sebagian lalu lintas harus dialihkan ke jalan alternatif yang meliputi Jl. TB Simatupang, Jl. RA. Kartini dan Jl. Fatmawati. Oleh karena itu, pada tahun 2007 jalan alternatif tersebut perlu dilebarkan guna menampung arus lalu lintas pada saat pembangunan segmen tersebut sedang dilaksanakan. Disamping itu, untuk kepentingan Depo MRT direncanakan lanjutan pembebasan tanah di sekitar Terminal Lebak Bulus.

- f) **Perumahan**, Dalam rangka menyediakan rumah susun bagi penduduk miskin, buruh berpenghasilan tetap, pekerja lepas dan karyawan berpenghasilan rendah, pada tahun 2007 direncanakan untuk membangun rumah susun sebanyak 2.000 Unit dan fasilitas penunjangnya (jalan dan saluran). Disamping itu, juga akan dilakukan perbaikan kampung di lima Kotamadya. Untuk itu, dialokasikan anggaran dalam APBD 2007.
- g) **Ijo Royo-royo**, Dalam rangka menunjang program ijo royo-royo, pada tahun 2007 dialokasikan anggaran yang difokuskan untuk : pengembangan hutan kota di setiap wilayah kota administrasi dimana meliputi pembangunan taman kota, taman-taman interaktif dan menambah areal ruang terbuka hijau serta berfungsinya Taman Persija Menteng.
- h) **Intermediate Treatment Facility (ITF)**, Berdasarkan hasil kajian WJEMP (Departemen PU), untuk menangani sampah di DKI Jakarta diperlukan empat ITF yang berbasis teknologi tinggi (*Waste To Energy*). Dari empat ITF tersebut, direncanakan ITF pertama akan dibangun dengan APBD sepenuhnya. Guna mempercepat realisasi pembangunan ITF dimaksud, maka pada tahun 2007 dialokasikan anggaran untuk AMDAL ITF Duri Kosambi.
- i) **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)**, Total alokasi dana PPMK Rp267.000.000.000, sehingga rata-rata alokasi per Kelurahan sebesar Rp1.000.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada Belanja Bantuan Keuangan. Penggunaan Dana PPMK lebih difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu, pembahasan PPMK merupakan lingkup kerja Komisi B.
Pengelola dana PPMK untuk bina ekonomi dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ataupun Badan Layanan Umum (BLU) Daerah. Penyaluran dana PPMK untuk bina ekonomi **tanpa agunan**.
- j) **Peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan**, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan,

pada Tahun 2007 direncanakan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan rata-rata sebesar Rp1,5 Miliar per Kelurahan dalam bentuk Bantuan Keuangan. Penggunaan anggaran tersebut adalah untuk operasional kantor dan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil musyawarah masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan.

- k) **Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan,** Dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan dari Sudin Teknis Kotamadya/Kabupaten ke Pemerintahan Kecamatan di bidang PU Jalan, PU Tata Air, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan dan Penerangan Jalan Umum. Alokasi anggaran dalam APBD 2007 untuk setiap Kecamatan sebesar Rp3,25 Miliar.
- l) **Pendidikan,** Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, pada tahun 2007 dialokasikan anggaran untuk rehab berat dan rehab total gedung SDN/SMPN (sesuai AMP), pembangunan gedung SMA baru dan pembangunan SMK Kelautan di Kepulauan Seribu.
- m) **Kesehatan,** Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, pasien tidak mampu, pasien korban bencana dan pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB), pada tahun 2007 direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp200 Miliar.
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Daerah berkewajiban mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara menyeluruh yang meliputi kesehatan, tenaga kerja dan sosial (pengangguran, hari tua). Pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Untuk itu, alokasi anggaran pada tahun 2007 akan dikelola Satuan Kerja Daerah Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- n) **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**, Program ini bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2007-2012.
- o) **Revitalisasi Kota Tua**, Program ini bertujuan untuk melestarikan sejarah kota Jakarta dan tempat tujuan wisata melalui peremajaan dan penataan kota tua. Tahun 2007 akan dilaksanakan Pengembangan Zona 1.

2.3.2 Prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

Program yang dikelola oleh SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja unit (*performance-based budgeting*) serta menurut fungsinya, digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dan program yang ditetapkan/ditargetkan masing-masing SKPD sesuai dengan delapan bidang pembangunan. Program SKPD antara lain :

- a. Pengembangan Pantai Publik, meliputi pembebasan tanah untuk jalan dan pembentukan kelembagaan.
- b. Pembangunan *show room* dan laboratorium ikan hias
- c. Pengadaan alat kesehatan Puskesmas plus Kepulauan Seribu
- d. Pengadaan meubelair kantor Kelurahan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.
- e. Rehab gedung Balaikota.
- f. Pengadaan meubelair kantor Kelurahan, Kecamatan dan Walikota Jakarta Pusat
- g. Rehab berat Panti Laras Cipayang.
- h. Pembangunan gedung serbaguna Pulau Tidung
- i. Pembangunan SLB Panti Cacat Terpadu.
- j. Rehab total dan rehab berat 52 kantor Kelurahan sebesar
- k. Biaya operasional sekolah dan pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN
- l. Penertiban izin mendirikan bangunan di 5 wilayah Kotamadya (Penegakan hukum)
- m. Pengawasan izin mendirikan bangunan (kontrol penertiban bangunan)/

- n. Pembebasan tanah Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut.
- o. Pembebasan tanah Perkampungan Budaya Betawi di Jakarta Selatan.
- p. Pembangunan kompleks Dinas Kesehatan.
- q. Penyelesaian kantor Walikotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
- r. Pembangunan eks kantor Dispenda
- s. Operasional 143 Sasana Krida Karang Taruna
- t. Bantuan kesejahteraan kepada 5.000 guru agama di bawah koordinasi Kanwil Depag termasuk didalamnya guru madrasah diniyah
- u. Pengiriman tugas belajar S2 ke luar negeri
- v. Pengiriman tugas belajar S2 di dalam negeri.
- w. Rehab berat dan total 54 Puskesmas.
- x. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun yang akan digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan DKI Jakarta dalam jangka panjang dan menengah.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kebijakan Pengelolaan keuangan

Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan, namun untuk pelaksanaan APBD 2007 masih mengacu pada PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Hal itu disebabkan karena sistem informasi pelaksanaan keuangan belum disesuaikan dengan PP maupun Permendagri yang baru. Disamping itu, perencanaan program dan kegiatan tetap mengacu Renstrada 2002-2007. Oleh sebab itu, kebijakan pelaksanaan APBD 2007 masih menggunakan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Perda Nomor 5 Tahun 2007, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Surat Edaran Bappenas.

3.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu, telah dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan, (2) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan, dan (3) meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta peningkatan kontribusi Laba BUMD, serta (4) meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

3.2.1.1 Intensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1). Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- 2). Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 3). Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4). Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- 5). Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.
- 6). Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3.2.1.2 Ekstensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1). Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- 2). Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus
- 3). Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru.
- 4). Peningkatan bagi hasil pajak

3.2.1.3 Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1). Perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated (Holding Company)
- 2). Pembentukan subholding ;
- 3). Percepatan divestasi saham-saham Pemda pada PT Patungan yang merugi;
- 4). Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi

3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan dapat disampaikan secara garis besar rincian sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp9.151.619.370.912,39 atau 88,93 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp10.290.610.986.193,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang tidak dapat dicapai sebesar Rp1.138.991.615.280,61 atau 11,07 persen. Untuk Dana Perimbangan, dari anggaran Rp7.572.132.000.000,00 realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp7.254.014.183.565,00 atau 95,80 persen. Dan realisasi pencapaian target untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp683.926.046.200,00 atau 85,83 persen dari anggaran Rp796.817.000.000,00.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

TABEL 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007

Jenis	Tahun Anggaran 2007			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
❖ Pendapatan Asli Daerah	10.290.610.986.193	9.151.619.370.912,39	(1.138.991.615.280,61)	88,93
❖ Dana Perimbangan	7.572.132.000.000	7.254.014.183.565,00	(318.117.816.435)	95,80
❖ Lain-lain Pendapatan Yang Sah	796.817.000.000	683.926.046.200,00	(112.890.953.800)	85,83
JUMLAH	18.659.559.986.193	17.089.559.600.677,39	(1.570.000.385.515,61)	91,58

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD mencapai Rp9.151.619.370.912,39 atau 88,93 persen, dari anggaran yang ditetapkan Rp. 10.290.610.986.193. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang belum dapat dicapai adalah sebesar Rp1.138.991.615.280,61 atau 11,07 persen, sedangkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 53,55 persen.

Walaupun realisasi PAD tidak mencapai target, namun upaya-upaya tetap dilakukan secara optimal seperti intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, serta kerja keras untuk meningkatkan PAD yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

TABEL 3.2
Realisasi PAD Tahun 2007

Uraian	Tahun Anggaran 2007			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Pajak Daerah	8.334.270.000.000	7.202.468.426.421,02	(1.131.801.573.578,98)	86,42
▪ Retribusi Daerah	625.574.830.047	668.364.475.079,64	42.789.645.032,64	106,84
▪ Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	139.351.196.434	144.011.966.494,00	4.660.770.060,00	103,34
▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.191.414.959.712	1.136.774.502.917,73	(54.640.456.794,27)	95,41
JUMLAH	10.290.610.986.193	9.151.619.370.912,39	(1.138.991.615.280,61)	88,93

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini.

3.2.2.1.1 Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007 seperti nampak pada tabel tersebut di atas, ternyata tidak dapat mencapai target sesuai anggaran yang ditetapkan. Adapun anggaran yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 8.334.270.000.000 , realisasinya hanya mencapai Rp 7.202.468.426.421,02 atau 86,42 persen. Dengan demikian target yang tidak dapat dicapai adalah sebesar

Rp 1.131.801.573.578,98 atau 13,58 persen. Dari realisasi tersebut, terlihat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 78,70 persen.

Penerimaan pajak tersebut di atas, telah diperoleh dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp2.368.877.055.505,00 atau 94,76 persen;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp2.215.253.938.300,00 atau 83,59 persen;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp601.549.384.410,02 atau 63,33 persen;
- Pajak Hotel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp526.602.001.997,00 atau 87,77 persen;
- Pajak Restoran realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp491.709.396.406,00 atau 81,95 persen;
- Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp188.229.471.248,00 atau 94,11 persen;
- Pajak Reklame realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp257.917.421.767,00 atau 92,35 persen;
- Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp346.826.639.475,00 atau 92,49 persen;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp58.842.930.908,00 atau 73,55 persen;

- Pajak Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp98.930.407.415,00 atau 98,93 persen.

Gambaran realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun terlihat pada tabel 3.3

TABEL 3.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007

No	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000.000.000,00	2.368.877.055.505,00	(131.122.994.495,00)	94,76
2.	BBN Kendaraan Bermotor	2.650.000.000.000,00	2.215.253.938.300,00	(434.746.061.700,00)	83,59
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	950.000.000.000,00	601.549.384.410,02	(348.405.615.589,98)	63,33
4.	Pajak Hotel	600.000.000.000,00	526.602.001.997,00	(73.397.998.003,00)	87,77
5.	Pajak Restoran	600.000.000.000,00	491.709.396.406,00	(108.290.603.594,00)	81,95
6.	Pajak Hiburan	200.000.000.000,00	188.229.471.248,00	(11.770.528.752,00)	94,11
7.	Pajak Reklame	279.270.000.000,00	257.917.421.767,00	(21.352.578.233,00)	92,35
8.	Pajak Penerangan Jalan	375.000.000.000,00	346.826639.475,00	(28.173.360.525,00)	92,49
9.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	80.000.000.000,00	58.842.930.908,00	(21.157.069.092,00)	73,55
10.	Pajak Parkir	100.000.000.000,00	98.930.407.415,00	(1.069.592.585,00)	98,93
	JUMLAH	8.334.270.000.000,00	7.202.468.426.421,02	(1.131.801.573.578,98)	86,42

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan jenis-jenis Pajak Daerah Tahun 2007 akan diuraikan sebagai berikut;

a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp. 2.368.877.055.505,00 atau 94,76 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp. 2.500.000.000.000,00 sehingga Tahun 2007, realisasinya penerimaan pajak ini tidak tercapai Rp. 131.122.994.495,00 atau 5,24 persen. Dari realisasi tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi

Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp. 7.202.468.426.421,02 maka terlihat kontribusi pendapatan PKB terhadap Pajak Daerah mencapai 32,89 persen.

Alasan tidak dapat mencapai target pada Tahun 2007 :

1. Jika dilihat dari pertambahan jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran PKB secara kuantitas terjadi kenaikan yakni pada Tahun 2006 sebanyak 3.410.075 kendaraan bermotor dan pada Tahun 2007 naik menjadi 3.795.752 kendaraan bermotor. Namun pertambahannya didominasi oleh kendaraan Pick Up, Light Truck & Truck sebanyak 333.212 kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan roda empat jenis Minibus yang merupakan kendaraan roda empat favorit, pertambahannya hanya 48.724 kendaraan bermotor.
2. Di sisi lain untuk kendaraan jenis sedan menurun hingga 6.466 kendaraan bermotor, padahal dari segi kualitas pembayaran jenis kendaraan bermotor tersebut memberikan kontribusi penerimaan terbesar dari PKB. Penerimaan PKB dari jenis Pick Up, Light Truck & Truck sebesar 41,93%, kemudian Alat-alat Berat sebesar 10,12%, sedangkan jenis Sepeda Motor hanya 0,08%.
3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertambahan jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2007 tidak berpengaruh besar pada peningkatan penerimaan karena pertambahan kendaraan bermotor didominasi oleh kendaraan Pick Up, Light Truck & Truck yang kontribusi terhadap jumlah kendaraan bermotor mencapai 41,93 % dari jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB.

4. Adanya penurunan tersebut di atas diakibatkan daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif sebagai akibat dari konsumsi otomotif tidak menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat.
5. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah pada Tahun 2006 sebesar 69.116 kendaraan bermotor dan pada Tahun 2007 sebesar 78.456 kendaraan bermotor yang berdampak negatif terhadap penerimaan.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007 antara lain :

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKKB) secara intensif.
2. Penagihan pasif atas tunggakan PKB.
3. Penyisiran dan penelitian data kendaraan bermotor yang belum daftar ulang.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, seperti pemberian pelayanan melalui Samsat Keliling.
5. Peningkatan pendataan dan pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Show Room.
6. Pengawasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di lapangan melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dalam beberapa operasi razia dengan pihak kepolisian.

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Realisasi penerimaan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp2.215.253.938.300,00 atau 83,59 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.650.000.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007

target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp434.746.061.700,00 atau 83,59 persen. Apabila realisasi BBN-KB tersebut diatas dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02 maka terlihat kontribusi BBN-KB terhadap Pajak Daerah jumlahnya mencapai 30,75 persen.

Alasan tidak tercapainya target Tahun Anggaran 2007 disebabkan :

1. Jika dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan baru selama 2 tahun terakhir, dari tahun 2005 sebanyak 584.854 kendaraan bermotor dibandingkan dengan jumlah kendaraan baru tahun 2006 sebanyak 467.385 serta jumlah kendaraan baru tahun 2007 sebanyak 497.424 maka tahun 2005 merupakan jumlah tertinggi namun setelah itu mengalami penurunan sebanyak 87.430 kendaraan bermotor atau (6,43%) dari tahun 2005.
2. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah yang berdampak negatif terhadap penerimaan.
3. Dari sisi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang melakukan BBN-KB pada Tahun 2007, kontribusi terbesar masih didominasi oleh jenis Pick Up, Light Truck & Truck sebanyak 333.212 kendaraan bermotor atau 41,93% dari Tahun 2006. Sedangkan yang kualitas pembayaran BBN-KB besar khususnya untuk jenis sedan mengalami penurunan 2,05%.
4. Dari indikator ekonomi masyarakat salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif sebagai akibat dari konsumsi otomotif yang tidak menjadi objek pilihan utama masyarakat.

5. Belum sepenuhnya dapat terjaring atas transaksi penjualan kendaraan bermotor bekas atau lama sebagai objek Bea Balik Nama Kendaraan Lama atau Bekas.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007, antara lain :

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (Super KPKB) secara intensif.
2. Pelayanan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang belum tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan survey di lapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Peningkatan pendataan kendaraan bermotor bekas pakai yang diperjualbelikan melalui Show Room.
5. Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta, seperti : Agen Tunggal Pemegang Merk Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor, Gaikindo dan pengusaha/pemilik Show Room.

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp 601.594.384.410,02 atau 63,33 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp 950.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2007, realisasi pajak ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp348.405.615.589,98 atau

36,67 persen. Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02, maka kontribusi PBB-KB terhadap Pajak Daerah mencapai 8,35 persen.

Alasan tidak dapat mencapai target pada Tahun 2007 antara lain :

1. Adanya peralihan model transportasi dari roda 4 (empat) ke roda 2 (dua).
2. Adanya pembangunan SPBU di pintu masuk arah Jakarta
3. Adanya minat masyarakat untuk menggunakan Mass Rapid Transport/Bus Way yang tinggi.
4. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2006.

Langkah-langkah dan upaya-upaya untuk tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2007 antara lain :

- Koordinasi dengan PT. Pertamina sebagai wajib pajak dan penyalur Bahan Bakar Kendaraan bermotor lainnya baik melalui kegiatan rekonsiliasi jumlah penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan kaitannya dengan kewajiban yang harus disetorkan;
- Peningkatan survey data potensi objek PBB-KB dan koordinasi dengan instansi terkait pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah DKI Jakarta;
- Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak utamanya dibidang administrasi perpajakan.

- Adanya penambahan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor selain PT.Pertamina di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Adanya penambahan jumlah SPBU akibat dari kemudahan dan peluang yang diberikan oleh Pemerintah untuk berinvestasi pada usaha SPBU.
- Dampak positif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.

Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2007 Rp526.602.001.997,00 atau 87,77 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp600.000.000.000,00 Dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak mencapai target Rp73.397.998.003,00 atau 12,23 persen. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan totalitas realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya Rp7.202.468.426.421,02 maka kontribusi Pajak Hotel mencapai 7,31 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2007 disebabkan :

1. Pada Tahun 2007 terjadi penurunan rata-rata tingkat hunian kamar hotel sebesar 4,11% (sumber data BPS Kunjungan Wisata Tahun 2007) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2006, kondisi tersebut akibat adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel, khususnya hotel-hotel berbintang di Jakarta rata-rata 45% (sumber data BPS Kunjungan Wisata Tahun 2007) padahal Hotel

berbintang tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Hotel.

2. Sekalipun terjadi pertambahan Wajib Pajak Hotel pada Tahun 2007 sebanyak 78 Wajib Pajak, namun pertambahan tersebut hanya dari rumah kost, artinya dari sisi pertambahan hotel yang memberi kontribusi terbesar terhadap PAD tidak berubah, sedangkan rencana yang ditargetkan naik hingga 23,71%. Sekalipun demikian pada Tahun 2007 realisasi penerimaan dari Pajak Hotel naik, tetapi hanya sebesar 8,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2006.

Namun demikian, untuk mencapai target penerimaan pajak ini, berbagai langkah telah dilakukan antara lain :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Hotel setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar ;
- Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment

melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

d). Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp491.709.396.406,00 atau 81,95 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp600.000.000.000,00 Dengan demikian, Tahun 2007, target penerimaan yang tidak tercapai sebesar Rp108.290.603.594,00 atau 81,95 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02 maka terlihat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah mencapai 6,83 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2007, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Kondisi tersebut akibat adanya penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan usaha yang sejenis serta perkembangan daerah penyangga.
2. Sekalipun terjadi pertambahan Wajib Pajak restoran pada Tahun 2007 sebanyak 5.040 Wajib Pajak, namun pertambahan tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rencana penerimaan, kontribusi dari Wajib Pajak baru sebesar 13.550 M atau 2,82% dari proyeksi realisasi sebesar 491 M artinya dari sisi pertambahan Restoran yang memberi kontribusi terbesar terhadap PAD tidak berubah, sedangkan rencana yang ditargetkan naik hingga 44,58%. Sekalipun demikian pada Tahun 2007 realisasi penerimaan dari Pajak Restoran naik, tetapi

hanya sebesar 12,17% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2006.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007 antara lain :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Restoran setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar;
- Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

e). Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp188.229.471.248,00 atau 94,11 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp200.000.000.000,00 Dengan demikian

Tahun 2007, realisasi pajak ini realisasinya tidak mencapai target sebesar Rp11.770.528.752,00 atau 6,89 persen. Apabila realisasi Pajak Hiburan tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02 maka kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah mencapai 2,61 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2007, antara lain disebabkan oleh :

1. Perkembangan teknologi khususnya komputer dan media elektronik yang secara tidak langsung berpengaruh kepada berkurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan hiburan di luar rumah.
2. Sekalipun terjadi pertambahan Wajib Pajak Hiburan pada Tahun 2007 sebanyak 983 Wajib Pajak dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.726.911.899,- artinya dari sisi pertambahan, hiburan tidak memberi kontribusi besar terhadap PAD, sedangkan rencana yang ditargetkan naik hingga 33,33%.
3. Sekalipun demikian pada Tahun 2007 realisasi penerimaan dari Pajak Hiburan naik, tetapi hanya sebesar 11,94% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2006.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2007 antara lain :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Hiburan setiap bulannya dan memantau setoran massa yang tidak wajar;
- Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;

- Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

f). Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp257.917.421.767,00 atau 92,35 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp279.270.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi Pajak Reklame yang belum tercapai dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.352.578.233,00 atau 8,65 persen.

Apabila realisasi Pajak Reklame dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02 maka kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mencapai 3,58 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Reklame pada Tahun Anggaran 2007 disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya penurunan dari Pajak Reklame salah satunya adalah masih terdapat reklame lama yang belum melakukan perpanjangan ijin reklame dan terjadinya pelarangan di daerah tertentu terhadap pemasangan

reklame dan pengurangan daerah pemasangan untuk reklame rokok.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007 antara lain :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Reklame setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar;
- Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

g). Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp346.826.639.475,00 atau 92,49 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp375.000.000.000,00 Dengan demikian

Tahun 2007 realisasi penerimaan pajak ini belum mencapai target dari yang ditetapkan sebesar Rp28.173.360.525,00 atau 7,51 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02, maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mencapai 4,82 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2007 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Rendahnya tingkat penambahan jumlah pelanggan pengguna listrik di wilayah DKI Jakarta, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bahwa prosentase peningkatan jumlah pelanggan baru pengguna listrik hanya berkisar 1% s.d. 3% setiap tahunnya.
- Terjadinya musibah banjir pada bulan Januari, Februari hingga Maret 2007 yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan tidak berfungsinya lebih dari \pm 2.300 gardu induk PLN sehingga berdampak pada tidak adanya pelayanan PLN pada masyarakat selama 10 hingga 15 hari dan hal ini menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk setoran bulan Februari s.d. Juni 2007.

h). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Realisasi penerimaan pajak ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp58.842.930.908,00 atau 73,55 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp80.000.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007,

target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp21.157.069.092,00 atau 26,45 persen.

Apabila realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02, maka terlihat kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pajak Daerah mencapai 0,82 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan oleh :

1. Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah lebih bersifat sebagai pengaturan atas pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh masyarakat.
2. Adanya pembatasan terhadap pemakaian /pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh masyarakat sesuai dengan ijin pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diberikan oleh Dinas Pertambangan.
3. Masih terdapat pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah yang belum terjaring sebagai pelanggan Air Bawah Tanah, seperti tempat-tempat pencucian kendaraan bermotor yang belum terjaring sebagai pelanggan Air Bawah Tanah.
4. Perbandingan antara ketetapan dengan rencana penerimaan seharusnya sebanding tetapi ternyata lebih besar rencana penerimaan karena masih banyak ketetapan yang 0 (nihil) dengan prosentase antara 40% s.d. 50%.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007 antara lain :

- Peningkatan pengawasan pembayaran Wajib Pajak setiap bulannya;

- Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran;
- Peningkatan pendataan di lapangan melalui koordinasi dengan Dinas Pertambangan untuk menjaring Wajib Pajak baru yang belum terdaftar sebagai pelanggan Air Bawah Tanah dan permasalahan-permasalahan teknis di lapangan seperti meter air rusak, pemakaian Air Bawah Tanah nihil dan lain-lainnya;
- Peningkatan pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka kegiatan pencatatan meter air atas pemakaian Air Bawah Tanah dengan instansi terkait, Dinas Pertambangan.

i). Pajak Parkir

Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp98.930.407.415,00 atau 98,93 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp100.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2007, realisasi Pajak Parkir yang tidak dapat dicapai Rp1.069.592.585,00 atau 98,93 persen.

Apabila realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp7.202.468.426.421,02 maka terlihat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak daerah mencapai 1,37 persen.

Alasan tidak tercapainya target pada Tahun 2007 :

1. Sekalipun terjadi Kenaikan Realisasi Parkir untuk kendaraan roda empat sebesar 18,43% dan roda dua

sebesar 15,70% pada Tahun 2007, artinya dari sisi pertambahan parkir tidak memberi kontribusi besar terhadap PAD, sedangkan rencana yang ditargetkan naik hingga 20%. Sekalipun demikian pada Tahun 2007 realisasi penerimaan dari pajak parkir naik, tetapi hanya sebesar 18,40% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2006.

2. Pertumbuhan sarana gedung-gedung dan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta tidak diikuti dengan pertumbuhan penggunaan dari marka parkir terutama kendaraan roda empat, mengingat kecenderungan masyarakat mengalihkan model transportasi kendaraan roda empat ke kendaraan roda dua.
3. Sistem transportasi yang kian membaik menjadi beralihnya masyarakat ke transportasi umum sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan roda empat pribadi.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2007 antara lain :

1. Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Parkir setiap bulannya.
2. Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
3. Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan
4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang
5. Law Enforcement melalui tindakan penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

6. Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
7. Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

3.2.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp668.364.475.079,64 atau 106,84 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp. 625.574.830.047 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui target penerimaan sebesar Rp42.789.645.032,64 atau 6,84 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya Rp 9.151.619.370.912,39 maka kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah mencapai 7,30 persen.

Terjadinya peningkatan realisasi penerimaan Retribusi Daerah ini sebagai hasil dari berbagai upaya yang intensif

dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat;
- Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan di lapangan;
- Peningkatan koordinasi antara unit pemungut dengan unit satuan kerja terkait

Berikut disajikan rincian realisasi Retribusi Daerah Tahun 2007 sebagaimana tergambar pada tabel 3.4

TABEL 3.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2007

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
01	Pelayanan Kesehatan	266.181.564.550,00	214.864.766.276,00	(51.316.798.274,00)	80,72
02	Pelayanan Persampahan	7.114.320.000,00	7.754.603.400,00	640.283.400,00	109,00
03	Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Catatan Sipil	2907.310.000,00	5.168.268.000,00	2.260.958.000,00	177,77
04	Penggantian Akte Catatan Sipil	1.592.690.000,00	2.518.034.000,00	925.344.000,00	158,10
05	Pemakaman	6.927.400.000,00	7.492.711.000,00	565.311.000,00	108,16
06	Parkir di Tepi Jalan Umum	37.085.208.600,00	14.685.218.848,00	(22.399.989.752,00)	39,60
07	Pengujian Kendaraan Bermotor	27.512.381.000,00	23.044.282.500,00	(4.468.098.500,00)	83,76
08	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.195.850.000,00	1.208.998.933,00	13.148.933,00	101,10
09	Penggantian Biaya Cetak Peta	250.000.000,00	516.506.760,00	266.506.760,00	206,60
10	Pengujian Kapal Perikanan	850.000,00	198.000,00	(652.000,00)	23,29
11	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	36.937.825.639,00	29.203.125.317,00	(7.734.700.322,00)	79,06
12	Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	2.500.000.000,00	2.543.620.256,00	43.620.256,00	101,74
13	Jasa Usaha Terminal	10.800.000.000,00	8.153.198.784,00	(2.646.801.216,00)	75,49
14	Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	8.575.000.000,00	4.743.160.707,00	(3.931.839.293,00)	55,31

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
15	Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangg.Villa	1.641.000.000,00	3.425.390.000,00	1.784.390.000,00	208,74
16	Jasa Usaha Penyedotan Kakus	1.554.480.000,00	1.440.945.000,00	(113.535.000,00)	92,70
17	Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	1.350.000.000,00	1.118.963.125,00	(231.036.875,00)	82,89
18	Jasa Usaha Tempat Pendaratan Kapal	19.650.000,00	20.070.000,00	420.000,00	102,14
19	Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.752.473.973,00	18.696.047.875,00	3.943.573.902,00	126,73
20	Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	145.000.000,00	161.948.964,00	16.948.964,00	111,69
21	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	10.000.000.000,00	25.770.554.359,00	15.770.554.359,00	257,71
22	Izin Mendirikan Bangunan	91.380.000.000,00	267.418.441.621,64	176.038.441.621,64	292,64
23	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	-	150.000,00	150.000,00	-
24	Izin Gangguan	3.500.000.000,00	5.001.677.750,00	1.501.677.750,00	142,91
25	Izin Trayek	1.853.500.000,00	1.706.016.900,00	(147.483.100,00)	92,04
26	Retribusi UKM	-	3.654.260.000,00	3.654.260.000,00	-
27	Retribusi Pertambangan	3.250.000.000,00	2.273.994.879,00	(976.005.121,00)	69,97
28	Perizinan dibidang Perindag.	5.581.250.250,00	15.389.768.500,00	9.808.518.250,00	275,74
29	Pelayanan Ketenagakerjaan	500.000.000,00	389.553.325,00	(110.446.675,00)	77,91
	Jumlah	625.574.830.047,00	668.364.475.079,64	42.789.645.032,64	106,84

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun 2007 sebagai berikut:

a). Retribusi Pelayanan Kesehatan

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi Pelayanan Kesehatan, secara intensif yaitu antara lain; Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp214.864.766.276,00 atau 80,72 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp266.181.564.550,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan

Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp51.316.798.274,00 atau 19,28 persen.

Selanjutnya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 sebagaimana disajikan lebih rinci pada tabel 3.5

TABEL 3.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2007

NO	Unit Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Rawat Jalan Kesehatan Dasar	26.334.952.500,00	23.126.901.259,00	(3.208.051.241,00)	87,82
2	Rawat Jalan Semi Spesialis	4.017.217.600,00	3.140.303.856,00	(876.913.744,00)	78,17
3	Rawat Jalan Tindakan Khusus	8.772.871.200,00	5.390.732.930,00	(3.382.138.270,00)	61,45
4	Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana	8.421.684.678,00	4.706.736.189,00	(3.714.948.489,00)	55,89
5	Rawat Inap	26.389.423.248,00	23.469.279.145,00	(2.920.144.103,00)	88,93
6	Poliklinik Spesialis Pagi	23.145.936.878,00	21.783.461.022,00	(1.362.475.856,00)	94,11
7.	Kamar Gawat Darurat	13.403.799.876,00	8.598.230.015,00	(4.805.569.861,00)	64,15
8.	Perawatan	27.028.380.000,00	30.632.880.251,00	3.604.500.251,00	113,34
9.	Perawatan Isolasi Perhari	1.579.235.000,00	1.236.917.957,00	(342.317.043,00)	78,32
10.	Perawatan Neonatus Perhari	2.108.258.520,00	1.713.538.602,00	(394.719.918,00)	81,28
11.	Perawatan Neonatus dg Blue Light/hari	525.150.000,00	876.935.458,00	351.785.458,00	168,99
12.	Adm Perawatan Perhari/Setiap perawatan	-	-	-	-
13.	Patologi Klinik	23.420.452.545,00	20.901.961.602,00	(2.518.490.943,00)	89,25
14.	Patologi Klinik Anatomi	344.525.545,00	1.783.329.939,00	1.438.804.394,00	517,62
15.	Pemeriksaan Radio Diagnostik	9.964.456.741,00	7.606.423.043,00	(2.358.033.698,00)	76,34
16.	Pemeriksaan Elektromedik	3.014.158.000,00	1.671.146.234,00	(1.043.435.006,00)	55,44
17.	Kamar bersalin/ Rawat Jalan/ Inap/ Tindakan Ringan	18.317.403.500,00	10.610.915.636,00	(7.706.487.864,00)	57,93
18.	Kamar Operasi	35.103.246.443,00	28.376.612.104,00	(6.726.634.339,00)	80,84
19.	Kamar bersalin kls III	1.504.788.000,00	1.815.240.760,00	310.452.760,00	120,63
20.	Tindakan Gigi/Mulut	4.019.145.727,00	2.152.486.863,00	(1.866.658.864,00)	53,56
21.	Rehabilitasi Medik	2.755.062.682,00	855.092.126,00	(1.899.970.556,00)	31,04
22.	Perawatan Jenazah	204.820.000,00	128.483.198,00	(76.336.802,00)	62,73
23.	Bedah Rawat Jalan	4.156.761.462,00	2453.465.770,00	(1.703.295.692,00)	59,02
24.	Perawatan Bayi Sakit perhari	1.036.640.000,00	124.830.484,00	(911.809.516,00)	12,04
25.	Tindakan Medik Khusus/Kosmetik	852.400.000,00	755.265.858,00	(97.134.142,00)	88,60
26.	Pel.Khusus RSUD Psikiatri&NAPZA	1.500.000.000,00	1.334.920.722,00	(165.079.278,00)	88,99
27.	Pel. Khusus RSUD Psikologi	95.000.000,00	8.062.154,00	(86.937.846,00)	8,49
28.	Pel. Khusus RSUD Rehab Medik/Mental	60.000.000,00	209.538.999,00	149.538.999,00	349,23

NO	Unit Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
29	Lain-lain Pelayanan Kesehatan	18.105.794.405,00	9.401.074.100	(8.704.720.305,00)	51,92
	Jumlah	266.181.564.550,00	214.864.766.276,00	(51.316.798.274,00)	87,82

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Target realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak tercapai antara lain disebabkan pelayanan kesehatan dari poliklinik spesialis tidak dapat dibuka setiap hari di Puskesmas Swadana, sehingga berdampak kepada penurunan realisasi pendapatan.

b). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain :

- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- Intensifikasi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;
- Peningkatan koordinasi dengan unit terkait, dalam upaya pemberdayaan RT/RW dalam pemungutan retribusi sampah.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp7.754.603.400,00 atau 109,00 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp7.114.320.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terjadi peningkatan Rp640.283.400,00 atau 109,00 persen.

c). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP antara lain :

- Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan, sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi.

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp5.168.268.000,00 atau 177,77 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.907.310.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, target penerimaan retribusi ini terjadi peningkatan Rp2.260.958.000,00 atau 177,77 persen.

Pelampauan penerimaan retribusi yang sangat signifikan ini utamanya diperoleh dari penggantian biaya cetak kartu keluarga (KK), dan biaya cetak pencatatan mutasi data.

d). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil

Realisasi Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp2.518.034.000,00 atau 158,10 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.592.690.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, terdapat pelampauan target penerimaan Rp925.344.000,00 atau 58,10 persen.

Pelampauan target realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, diperoleh antara lain dari akte kelahiran, kematian, dan pernikahan.

e). Retribusi Pelayanan Pemakaman

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan Yayasan yang bergerak dibidang Pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp7.492.711.000,00 atau 108,16 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.927.400.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, terdapat pelampauan target penerimaan Rp565.311.000,00 atau 8,16 persen.

Pelampauan target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam dan perpanjangan sewa tanah makam.

f). Retribusi Parkir

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Parkir antara lain:

- Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan perparkiran.
- Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Survey potensi parkir yang intensif sebagai tolok ukur pengawasan.

Realisasi penerimaan Retribusi Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp14.685.218.848,00 atau 39,60 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp37.085.208.600,00 Dengan demikian realisasi Retribusi Parkir tidak mencapai target sebesar Rp22.399.989.752,00 atau 63,40 persen.

Realisasi Retribusi Parkir tidak mencapai target karena masyarakat pengguna lebih banyak yang beralih menggunakan jasa angkutan umum (busway) dan kereta api daripada kendaraan pribadi.

Penerimaan retribusi parkir tersebut di atas, bersumber dari Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Realisasi pendapatan terhadap 2 (dua) jenis Retribusi Parkir disajikan pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
Realisasi pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2007

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Parkir di Tepi Jalan Umum	24.683.858.601,00	8.994.061.481,00	(15.689.797.120,00)	36,44
2	Tempat Khusus Parkir	12.401.349.999,00	5.691.157.367,00	(6.710.192.632,00)	45,89
	Jumlah	37.085.208.600,00	14.685.218.848,00	(22.399.989.752,00)	39,60

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

g). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;

Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan umum bekerja sama dengan instansi terkait.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp23.044.282.500,00 atau 83,76 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2007 Rp27.512.381.000,00 Dengan demikian Tahun 2007 realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target Rp4.468.098.500,00 atau 16,24 persen. Turunnya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan menurunnya volume pengujian terhadap kendaraan baru.

h). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran antara lain peningkatan pengawasan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pembelian alat pemadam kebakaran ringan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp1.208.998.933,00 atau 101,10 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.195.850.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, terdapat pelampauan target penerimaan Rp13.148.933,00 atau 1,10 persen.

i). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah intensifikasi dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007

mencapai Rp516.506.760,00 atau 206,60 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp250.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, terdapat pelampauan target penerimaan Rp266.506.760,00 atau 6,60 persen.

j). Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp29.203.125.317,00 atau 79,06 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp36.937.825.639,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp7.734.700.322,00 atau 20,94 persen.

Realisasi penerimaan retribusi tersebut, bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja. Adapun realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2007 disajikan lebih rinci pada tabel 3.7.

TABEL 3.7

Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2007

No	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Dinas Pertamanan	420.000.000,00	667.785.000,00	(7.734.700.322,00)	79,06
2.	Dinas Pekerjaan Umum	4.800.000.000,00	1.711.122.534,00	(3.088.877.466,00)	35,65
3.	Dinas Perhubungan	680.000.000,00	580.211.500,00	(99.788.500,0)	85,33
4.	Dinas Perumahan	6.200.000.000,00	4.431.961.185,00	(1.768.038.815,00)	71,48
5.	Pemakaian gedung milik pemda	173.933.208,00	155.000.000,00	(18.933.208,00)	89,11
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	54.150.000,00	46.461.000,00	(7689.000,00)	85,80
7.	Dinas Kebersihan	31.200.000,00	32.065.000,00	865.000,00	102,77
8.	Bapedalda	990.500.000,00	1.255.793.000,00	265.293.000,00	126,78
9.	Dinas Olah Raga	718.886.771,00	976.433.250,00	257.546.479,00	135,83
10.	Dinas PJU dan SJU	496.000.000,00	1.694.848.424,00	1.198.848.424,00	341,70
11.	Kantor Tm. Ragunan	4.265.103.000	6.141.612.500,00	1.876.509.500,00	144,00
12.	Dinas Museum dan Kebudayaan	139.000.000,00	93.140.900,00	(45.859.100,00)	67,01

No	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
13.	Dinas Tata Pemakaman Umum	297.350.000,00	405.891.000,00	108.541.000,00	136,50
14.	Dinas Perindustrian	322.970.000,00	3.314.189.925,00	2.991.219.925,00	1.026,16
15.	Dinas Peternakan Perikanan & Kelautan	3.652.650.000,00	5.285.482.878,00	1.632.832.878,00	144,70
16.	Dinas Kesehatan	13.450.000,00	-	(13.450.000,00)	-
17.	Dinas Kependudukan	-	3.980.000,00	3.980.000,00	-
18.	Dinas Pertanian & Kehutanan	598.460.000,00	936.509.909,00	338.049.909,00	156,49
	Dinas Koperasi dan UKM	11.411.670.695,00	-	(11.411.670.695,00)	
19.	RSUD Koja	109.950.000,00	355.179.392,00	245.229.392,00	323,04
20.	RSUD Budhi Asih	60.350.000,00	11.908.250,00	(48.441.750,00)	19,73
21.	RSUD Duren Sawit	10.000.000,00	43.230.107,00	33.230.107,00	432,30
22.	Labkesda	1.492.201.965,00	1.060.319.563,00	(431.882.402,00)	71,06
	J u m l a h	36.937.825.639,00	29.203.125.317,00	(7.734.700.322,00)	79,06

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

k). Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan antara lain;

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Penambahan sarana dan prasarana yang disewakan kepada masyarakat;
- Intensifikasi pemungutan retribusi.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp2.543.620.256,00 atau 101,74 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.500.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan, dapat melampaui target penerimaan Rp43.620.256,00 atau sebesar 1,74 persen.

l). Retribusi Jasa Usaha Terminal

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain :

- Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp8.153.198.784,00 atau 75,49 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.800.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.646.801.216,00 atau sebesar 24,51 persen.

m). Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus antara lain :

- Penertiban terhadap perparkiran liar
- Peningkatan pelayanan jasa perparkiran dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp4.743.160.707,00 atau 55,31 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp8.575.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.831.839.293,00 atau sebesar 44,69 persen.

n). Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Khusus antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui intensifikasi jangka waktu pelayanan;
- Penempatan pos pelayanan ditempat-tempat tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Pelayanan untuk konsumen rumah tinggal dilayani dengan kendaraan tangki kecil berkapasitas 3 m ; oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan Kotamadya,
- Pelayanan untuk konsumen industri dilayani dengan kendaraan besar berkapasitas 6 m ; oleh Dinas Kebersihan.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp1.440.945.000,00 atau 92,70 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.554.480.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp113.535.000,00 atau sebesar 7,30 persen.

o). Retribusi Rumah Potong Hewan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan ternak potong di rumah potong hewan.
- Peningkatan pengawasan di lapangan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp1.118.963.125,00 atau 82,89 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.350.000.000,00 Tahun 2007, realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp231.036.875,00 atau 17,11 persen.

Tidak tercapainya target realisasi penerimaan retribusi ini, karena turunnya volume pemeriksaan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH), disamping itu dipengaruhi oleh frekuensi pemotongan sapi di RPH

pada umumnya adalah sapi import yang beratnya 2 (dua) kali dari sapi lokal, sementara itu biaya retribusi dikenakan berdasarkan satuan ekor.

p). Retribusi Jasa Usaha Pendaratan Kapal

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pendaratan Kapal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp20.070.000,00 atau 102,14 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp19.650.000,00 Tahun 2007, realisasi retribusi ini mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp420.000,00 atau 2,14 persen.

q). Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp18.696.047.875,00 atau 126,73 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp14.752.473.973,00 Tahun 2007, realisasi retribusi ini melampaui target Rp3.943.573.902,00 atau 26,73 persen.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2007 sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.

TABEL 3.8
Realisasi pendapatan Retribusi Rekreasi dan Olah raga
Tahun 2007

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pelayanan Museum Daerah	250.000.000,00	198.623.450,00	(51.376.550,00)	79,45
2.	Pelayanan Monas	2.486.000.000,00	3.144.464.125,00	658.464.125,00	126,49
3.	Pelayanan Planetarium & Obsv	1.093.576.973,00	582.961.500,00	(510.615.473,00)	53,31
4.	Citraganda/Multimedia	8.000.000,00	19.889.500,00	11.889.500,00	248,62
5.	Pelayanan Keolahragaan	2.180.000.000,00	2.202.423.500,00	22.423.500,00	101,03
6.	Pelayanan Tm. Ragunan	8.734.897.000,00	12.543.631.750,00	3.808.734.750,00	143,60
7.	Sanksi Keterlambatan	-	4.054.050,00	4.054.050,00	-
	JUMLAH	14.752.473.973,00	18.696.047.875,00	3.943.573.902,00	126,73

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

r). Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp161.948.964,00 atau 111,69 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp145.000.000,00 Tahun 2007, realisasi retribusi ini mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp16.948.964,00 atau 11,69 persen.

s). Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah antara lain:

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp25.770.554.359,00 atau 257,71 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.000.000.000,00 Dengan demikian terdapat pelampauan penerimaan Rp15.770.554.359,00 atau 157,71 persen.

t). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan antara lain;

- Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB;
- Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp267.418.441.621,64 atau 292,64 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp91.380.000.000,00 Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi penerimaan Rp176.038.441.621,64 atau 192,64 persen. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2007 sebagaimana disajikan pada tabel 3.9.

TABEL 3.9
Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tahun 2007

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	$\Delta\%$
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4:3)
1	Pelayanan Ketatakotaan				
2	Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota				
	JUMLAH				

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

u). Retribusi Izin Undang-undang Gangguan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan antara lain:

- Peningkatan pendataan tempat usaha secara terus menerus;

- Dilaksanakannya pelayanan keliling ke lokasi padat usaha dengan menggunakan sistem jemput bola;
- Peningkatan pemeriksaan pada tempat-tempat usaha baik yang sudah memiliki izin, maupun yang belum memiliki izin gangguan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Undang – undang Gangguan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp5.001.677.750,00 atau 142,91 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp3.500.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007 terdapat pelampauan target penerimaan Rp1.501.677.750,00 atau 42,91 persen.

v). Retribusi Izin Trayek

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek antara lain :

- Pemberian tegoran secara intensif kepada perusahaan angkutan, agar segera memperpanjang izin trayeknya;
- Dilakukannya penertiban dilapangan, bekerjasama dengan instansi terkait.

Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp1.706.016.900,00 atau 92,04 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.853.000,00 Dari realisasi tersebut terlihat bahwa target realisasi tidak dapat dicapai sebesar Rp147.483.100,00 atau 7,96 persen. Turunnya target ini disebabkan;

- Pengurusan perpanjangan izin trayek dan perizinan trayek baru terjadi penurunan seperti pada

pengurusan izin trayek mobil bus besar, bus sedang dan bus kecil, karena tidak adanya penambahan bus,

- Adanya keengganan pengusaha angkutan untuk memperpanjang izin trayek
- Banyaknya kendaraan yang tidak beroperasi sehingga tidak memperpanjang izin trayek.

Disamping penjelasan atas realisasi penerimaan retribusi tersebut di atas, terdapat realisasi penerimaan retribusi baru yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang pemungutannya secara efektif dilaksanakan mulai 1 Juli 2006 antara lain :

1. Retribusi UKM Tahun Anggaran 2007 realisasinya baru mencapai Rp3.654.260.000,00.
2. Retribusi Izin Pertambangan realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 Rp2.273.994.879,00 atau 69,97 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp3.250.000.000,00.
3. Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp15.389.768.500,00 atau 275,74 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp5.581.250.250,00. Dengan demikian terjadi pelampauan target penerimaan sebesar Rp9.808.518.250,00 atau 75,74 persen.
4. Retribusi pelayanan Ketenagakerjaan, realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp389.553.325,00, atau 77,91 persen dari proyeksi yang ditetapkan dalam

Tahun Anggaran 2007 yaitu sebesar Rp500.000.000,00, dengan demikian realisasi retribusi ini belum mencapai target sebesar Rp110.446.675,00 atau 22,09 persen.

3.2.2.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp144.011.966.494,00 atau 103,34 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2007 Rp. 139.351.196.434,00 Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp4.660.770.060 atau 3,34 persen. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp9.003.135.296.719,39 maka terlihat kontribusi Bagian Laba Usaha Daerah mencapai 1,60 persen. Realisasi penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2007 digambarkan pada tabel 3.10.

TABEL 3.10

**Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2007**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Berlebih (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
1	Perusahaan Daerah (PD)	34.049.070.744,00	35.301.900.445,00	1.252.829.701,00	103,68
2	PT. Patungan	101.526.200.690,00	106.312.351.820,00	4.786.151.130,00	104,71
3	Badan Pengelola	1.510.000.000,00	550.000.000,00	(960.000.000,00)	36,42
4	Royalty	-	-	-	-
5	Sewa Asset Daerah	525.000.000,00	192.115.000,00	(332.885.000,00)	36,59

No	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Berlebih (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
6	Kerja sama Asset Daerah	1.740.925.000,00	1.655.599.229,00	(85.325.771,00)	95,10
	JUMLAH	139.351.196.434,00	144.011.966.494,00	4.660.770.060,00	103,34

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

a). Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD)

Penerimaan bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan sebesar Rp34.049.070.744,00 adapun realisasinya sebesar Rp35.301.900.445,00 atau 103,68 persen. Tahun 2007 terlihat realisasi bagian laba ini dapat melampaui target sebesar Rp1.252.829.701,00 atau persen. Kontribusi Perusahaan Daerah pada Tahun Anggaran 2007 apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan maka Kontribusinya mencapai 24,51 persen. Rincian lebih lanjut dapat digambarkan pada tabel 4.12 dibawah ini.

TABEL 3.11

**Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha
Perusahaan Milik Daerah (PD)
Tahun 2007**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PDAM Jaya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100
2	PD. Dharma Jaya	549.070.744,00	461.953.920,00	(87.116.824,00)	84,13
3	PD. Pasar Jaya	27.000.000.000,00	26.011.796.000,00	(988.204.000,00)	96,34
4	PD. Pemb. Sarana Jaya	1.500.000.000,00	4.184.308.301,00	2.684.308.301,00	278,95
5	PD. PAL Jaya	2.000.000.000,00	1.543.842.224,00	(356.157.776,00)	82,19

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
	Jumlah	34.049.070.744,00	35.301.900.445,00	1.252.829.701,00	103,68

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya penjelasan penerimaan Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) adalah sebagai berikut :

1). PD. Air Minum Jaya

Dalam APBD Tahun Anggaran 2007 PD. Air Minum Jaya diproyeksikan Rp3.000.000.000,00 adapun realisasi setorannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp3.000.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007 kontribusi PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat mencapai target sesuai dengan proyeksi anggaran yang ditetapkan. Kontribusi PAD ini bukan dari bagian laba tetapi merupakan komitmen PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan "Financial Projection" yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan mitra swasta.

2). PD. Dharma Jaya

Rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 dari Perusahaan Daerah ini Rp549.070.744,00 adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp461.953.920,00 atau 84,13 persen. Realisasi penerimaan yang diperoleh dari PD. Dharma Jaya tidak mencapai target Rp87.116.824,00 atau 15,87 hal ini terjadi karena kontribusi PD. Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada realisasi pencapaian laba bersih.

3). PD. Pasar Jaya

Proyeksi penerimaan bagian laba PD. Pasar Jaya dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp27.000.000.000,00 namun realisasi penerimaan

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp26.011.796.000,00 dengan demikian terlihat adanya penurunan dari target penerimaan sebesar Rp988.204.000,00 atau 3,64 persen. Penerimaan ini Merupakan Kontribusi PD Pasar Jaya berdasarkan perolehan laba setelah dikurangi pajak untuk Tahun Buku 2007 .

4). PD. Pembangunan Sarana Jaya

Penerimaan yang berasal dari bagian laba PD. Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan sebesar Rp1.500.000.000,00 adapun realisasi Tahun 2007 mencapai Rp4.184.308.301,00 atau 278,95 persen. Realisasi ini diperoleh dari taksasi laba setelah pajak tahun buku 2007.

5). PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya

Penerimaan PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya pada Tahun Anggaran 2007 di proyeksikan sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.543.842.224,00 Tahun 2007, kontribusi PD PAL Jaya turun dari target yang ditetapkan Rp356.157.776,00 atau 17,91 persen.

b). Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga PT. Patungan

Realisasi bagian laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga (PT. Patungan) pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp106.312.351.820,00 atau 104,71 persen, dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp101.526.20.690,00 Kontribusi Realisasi Penyertaan Modal ini pada Tahun Anggaran 2007 melampaui target sebesar Rp4.786.151.130,00 atau 4,71

persen. Kontribusi yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga adalah 73,82 persen dari seluruh pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan ini dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT. Patungan) seperti dapat di lihat pada tabel 3.12.

TABEL 3.12
Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga (PT. Patungan)
Tahun 2007

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Pembangunan Jaya	1.750.000.000,00	2.800.000.000,00	1.050.000.000,00	160,00
2	PT. Food Station Cipinang	1.500.000.000,00	1.966.459.792,00	466.459.792,00	131,10
3	PT. JIEP	4.800.000.000,00	4.251.209.175,00	(548.790.825,00)	88,57
4	PT. Delta Jakarta	1.778.781.000,00	5.465.218.200,00	3.686.437.200,00	307,25
5	PT. Bumi Grafika Jaya	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-
6	PT. Pembangunan Jaya Ancol	36.200.000.000,00	36.287.999.968,00	87.999.968,00	100,24
7	PT. Ratax Armada	370.648.600,00	270.648.600,00	(100.000.000,00)	73,02
8	PT. Rheem Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-
9	PT. Kawasan Berikat Nusantara	1.100.000.000,00	808.760.462,00	(291.239.538,00)	73,52
10	PT. Alumindo Perkasa	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-
11	PT. Cemani Toka	-	400.000.000,00	400.000.000,00	-
12	PT. Jaya Nur Sukses	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
13	PT. Asuransi Bangun Askrida	2.246.771.090,00	2.396.820.155,00	150.049.065,00	106,68
14	PT. Jakarta Propertindo	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	-	100,00
15	PT. Bank DKI Jakarta	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	-	100,00
16	PT. Jakarta Tourisindo	900.000.000,00	915.235.468,00	15.235.468,00	101,69

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (PT Patungan) adalah sebagai berikut :

1). PT. Pembangunan Jaya

Pada Tahun Anggaran 2007 penerimaan deviden PT. Pembangunan Jaya diestimasikan sebesar Rp1.750.000.000,00 yang merupakan deviden untuk kinerja tahun buku 2006. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp2.800.000.000,00 atau mencapai 160 persen. Adapun saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 40 persen

2). PT. Food Station Cipinang

Realisasi penerimaan deviden PT. Food Station Cipinang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.966.459.792,00 atau 131,10 persen dari rencana yang ditetapkan Rp1.500.000.000,00 Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2007 kontribusi PT. Food Station Cipinang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp466.459.792,00 atau 31,10 persen. Realisasi bagian laba yang disetorkan pada Tahun Anggaran 2007 berdasarkan taksasi laba tahun buku 2006.

3). PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)

Penerimaan Deviden PT. JIEP ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 Rp4.800.000.000,00 Adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp4.251.209.175,00 atau 88,57 persen. Kontribusi PT. JIEP terhadap PAD tidak mencapai target Rp548.790.825,00 atau 11,43 persen. Kontribusi penerimaan PT JIEP berasal dari penyewaan gedung dan penjualan tanah kavling industri.

4). PT. Delta Jakarta

Penerimaan deviden PT. Delta Jakarta Tbk Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan Rp1.778.781.000,00,

realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp5.465.218.200,00 atau 307,25 persen. Realisasi penerimaan deviden yang diperoleh PT. Delta Jakarta dapat melampaui target Rp3.686.437.200,00 atau 207,25 persen. Pelampauan penerimaan ini dapat dicapai karena adanya peningkatan dalam pemasaran produk.

5). PT. Bumi Grafika Jaya

Proyeksi penerimaan deviden PT. Bumi Grafika Jaya pada APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp70.000.000,00 namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 PT. Bumi Grafika Jaya belum dapat merealisasikan kontribusinya.

6). PT. Pembangunan Jaya Ancol

Dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 penerimaan deviden PT. Pembangunan Jaya Ancol diproyeksikan sebesar Rp36.200.000.000,00 Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp36.287.999.968,00 atau 100,24 persen. Kontribusi PAD dari PT. Pembangunan Jaya Ancol terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 34,13 persen.

7). PT. Ratax Armada

Proyeksi penerimaan deviden PT. Ratax Armada dalam APBD Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan Rp370.648.600,00 Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp270.648.600,00 atau 73,02 persen. Dengan demikian kontribusi PT. Ratax Armada terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 0,25 persen.

8). PT. Rheem Indonesia

Proyeksi penerimaan deviden PT. Rheem Indonesia dalam APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan Rp450.000.00,00 Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp450.000.00,00 atau 100,00 persen. Dengan demikian realisasi penerimaan dari PT. Rheem Indonesia pada Tahun Anggaran 2007 tercapai 100,00 persen. Kontribusi PT. Rheem Indonesia terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga menjadi 0,42 persen.

9). PT. Kawasan Berikat Nusantara

Proyeksi penerimaan deviden PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan Rp1.100.000.000,00 Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp808.760.462,00 atau 73,52 persen. Sedangkan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11,25 persen. Kontribusi PAD dari PT. Kawasan Berikat Nusantara sebesar 0,76 persen terhadap kelompok penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

10).PT. Alakasa Industrindo Tbk d/h PT Alumindo Perkasa

Pada APBD Tahun Anggaran 2007 proyeksi penerimaan deviden PT. Alakasa Industrindo Tbk Rp60.000.000,00 namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 masih belum terealisasi.

11).PT. Jaya Nur Sukses

Realisasi penerimaan PT. Jaya Nur Sukses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp100.000.000,00 realisasi ini sesuai dengan target

yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 100 persen.

12).PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pada APBD Tahun Anggaran 2007 proyeksi penerimaan deviden PT. Asuransi Bangun Askrida Tbk ditetapkan sebesar Rp2.246.771.090,00 Realisasi setoran deviden sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2.396.820.155,00 atau 106,68 persen. Sedangkan jumlah penyertaan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 24,80 persen. Kontribusi PT. Asuransi Bangun Askrida terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan jumlah kelompok penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga adalah sebesar 2,25 persen.

13).PT. Jakarta Propertindo

Pada APBD Tahun Anggaran 2007 pembagian deviden dari PT. Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan sebesar Rp8.200.000.000,00 realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp8.200.000.000,00 atau 100 persen. Realisasi penerimaan ini berdasarkan taksasi laba bersih yang diperoleh PT Jakarta Propertindo.

14).PT. Bank DKI Jakarta

Proyeksi penerimaan PT. Bank DKI Jakarta pada APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp42.000.000.000,00 realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp42.000.000.000,00 atau 100 persen. Sedangkan realisasi ini disetorkan berdasarkan taksasi laba tahun buku 2006. Apabila

realisasi penerimaan yang diperoleh PT Bank DKI ini dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga maka terlihat kontribusi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 39,51 persen.

15).PT Jakarta Tourisindo

Proyeksi penerimaan PT. Jakarta Tourisindo pada APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00. Bagian laba perusahaan ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007, realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp915.235.468,00 atau 101,69 persen. Realisasi ini diperoleh berdasarkan taksasi laba tahun buku 2006.

16).PT Rumah Sakit Haji

PT Rumah Sakit Haji merupakan perubahan bentuk dari yayasan Rumah Sakit Haji yang ditetapkan berdasarkan Akte Notaris Soetjipto, SH Nomor 28 tanggal 5 Maret 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004. Perubahan bentuk ini bertujuan untuk menapaki dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif. Sejalan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi pada PT Rumah Sakit Haji yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2006 sehingga perseroan ini berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan kondisi tersebut, maka Rumah Sakit Haji sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 belum

dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

17).PT Rumah Sakit Cengkareng

PT Rumah Sakit Cengkareng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004, selanjutnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi pada perseroan ini yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2006 sehingga PT Rumah Sakit Cengkareng berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

18).PT Rumah Sakit Pasar Rebo

PT Rumah Sakit Pasar Rebo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2004, perubahan status hukum RSUD Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas adalah dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2006, sehingga perseroan ini berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

c). Badan Pengelola (BP)

Pada Tahun Anggaran 2007 Penerimaan Badan Pengelola diproyeksikan sebesar Rp1.510.000.000,00, adapun realisasinya sebesar Rp.550.000.000,00 atau 36,42 persen. Realisasi penerimaan Badan Pengelola

pada Tahun Anggaran 2007 tidak mencapai target Rp 960.000.000,00 atau 63,58 persen. Adapun kontribusi penerimaan Badan Pengelola kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,38 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lebih lanjut rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.13.

TABEL 3.13
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada
Badan Pengelola (BP) Tahun 2007

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	BP. THR Lokasari	210.000.000,00	50.000.000,00	(160.000.000,00)	23,81
2	BPLIP Pulogadung	1.300.000.000,00	500.000.000,00	(800.000.000,00)	38,46
	JUMLAH	1.510.000.000,00	550.000.000,00	(960.000.000,00)	36,42

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya penjelasan realisasi penerimaan Badan Pengelola sebagai berikut:

1). BP. THR Lokasari

Penerimaan pembagian Laba BP THR Lokasari pada Tahun Anggaran 2007 di proyeksikan sebesar Rp210.000.000,00, adapun realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 atau 23,81 persen. Realisasi ini didasarkan pada laba penerimaan tahun buku 2006.

2). BPLIP Pulogadung

Penerimaan dari pembagian laba BPLIP Pulogadung pada Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan sebesar Rp1.300.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 38,46 persen. Dengan demikian target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp800.000.000,00 atau 61,54 persen.

d). Sewa Aset Daerah

Rencana penerimaan Sewa Aset Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp525.000.000,00 adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp192.115.000,00 atau 36,59 persen. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi penerimaan yang tidak mencapai target sebesar Rp332.885.000,00 atau 63,41 persen.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Sewa Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 3.16.

TABEL 3.14

**Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
pada Sewa Aset Daerah Tahun 2007**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
2	Eks Komplek Unit Aloca	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	50,00
3	Eks Toko Tastra Jaya	120.000.000,00	30.000.000,00	(90.000.000,00)	25,00
4	PD. Undagi Klender	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-
5	Tanah Kav No.I C2 (PT. Jaya Nur S)	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-
6	Tanah Kav. Blok III A.A No 9 & 10	75.000.000,00	37.115.000,00	(37.885.000,00)	49,49
7	Eks Toko Pradipta	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH	525.000.000,00	192.115.000,00	(332.885.000,00)	36,59

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

e). Kerja Sama Aset Daerah

Penerimaan Kerja Sama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan sebesar Rp1.740.925.000,00, adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.655.599.229,00 atau 95,10 persen. Tahun 2007 realisasi Kerjasama aset ini, target yang belum dapat dicapai Rp85.325.771,00 atau 4,9 persen. Dengan demikian kontribusi PAD yang diperoleh dari Kerjasama Aset Daerah adalah sebesar 1,15 persen, terhadap Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Rincian lebih lanjut penerimaan Kerjasama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2007 dapat terlihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.15
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
pada Kerja Sama Aset Daerah Tahun 2007

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Langgeng Ayom Lestari	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	160,00
2	Yayasan Nawami Bhakti	35.000.000,00	45.777.802,00	10.777.802,00	130,79
3	PT. Rama Krishtira Perkasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
4	Pt. Duta Pertiwi	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-
5	Bakrie Investindo	-	83.276.610	83.276.610,00	-
6	PT. Dharma Alumas Sakti	76.325.000,00	146.544.817,00	70.219.817,00	-
7	PT. Jaya Real Property	-	-	-	-
8	PT. Rointa Eka Jaya	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	-
9	PT. Wahana Cipta Sejahtera	500.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	200,00
10	PT. AGB Tuna	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	150,00
111	PT. Pesona Marga M	229.600.000,00	-	(229.600.000,00)	-
11	Yayasan Dharma BM.	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
12	PT.Hotel Cikini Realty	-	-	-	-
	JUMLAH	1.740.925.000,00	1.655.599.229,00	(85.325.771,00)	95,10

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Rencana penerimaan Hasil Kerjasama Aset Daerah didasarkan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu :

1). PT Langgeng Ayom Lestari

Perjanjian kerjasama tahun 2002 tentang Pengelolaan Peralatan (*Emplacement*), Anjungan Terminal, Plaza dan Taman dilingkungan Terminal Blok M wilayah Jakarta Selatan untuk 5 (lima) tahun ketiga dari tanggal 16 September 2002 sampai dengan 16 September 2007.

2). Yayasan Sapta Nawami Bhakti

Perjanjian kerjasama tahun 1992 tentang pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit di DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua Yayasan Sapta Nawami Bhakti tanggal 31 Juli 1992.

3). PT. Rekatama Krishtira Perkasa

Perjanjian kerjasama tahun 2003 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan orang dengan fasilitas pertokoan yang menghubungkan antara bangunan Blok D Pasar Tanah Abang dengan bangunan pertokoan di sisi selatan Jalan Kebon Jati, jembatan penyebrangan dengan fasilitas pertokoan yang menghubungkan Pasar Kebon Jati dengan Bangunan Blok F Pasar Tanah Abang di sisi utara Jalan Kebon Jati dan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang menghubungkan jalan KS Tubun dengan Pasar Kebon Jati Jakarta Pusat.

4). PT Dharma Alumas Sakti

Perjanjian kerjasama tahun 1992 tentang Penataan, Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan GOR Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Komplek Seni Budaya dan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Kuningan Jakarta Selatan.

5). PT Jaya Real Property

Perjanjian kerjasama tahun 2001 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Kolam Renang, Lapangan Tenis yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor I Kodya Jakarta Selatan.

6). PT Rointa Eka Jaya

Perjanjian kerjasama tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan Orang beserta Fasilitas Pertokoan

yang menghubungkan antara Pusat Grosir Tekstil Pasar Tanah Abang Blok B dengan Pertokoan di sisi timur Jalan H. Fakhruddin Jakarta Pusat.

7). PT Wahana Cipta Sejahtera

Perjanjian kerjasama tahun 2004 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan Multiguna dengan fasilitas Pertokoan dan parkir yang menghubungkan antara pembangunan gedung pertokoan dengan gedung parkir di jalan Letjen. Sutoyo Kavling 76, Jangka waktu perjanjian selama 25 tahun.

8). PT AGB Tuna

Perjanjian kerjasama tertanggal 22 Februari 2004 tentang Pembangunan Cold Storage di Muara Angke, jangka waktu selama 20 tahun.

9). PT Pesona Marga Mandiri

Pembangunan dan pengelolaan kios perdagangan beserta fasilitasnya di atas sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 3.300m² yang terletak di bawah jembatan layang petak baru Pasar Pagi. Jangka waktu perjanjian selama 25 tahun.

3.2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp1.136.774.502.917,73 atau 95,41 persen dari proyeksi

yang ditetapkan Rp1.191.414.959.712,00 Dengan demikian Tahun 2007, target realisasi penerimaan PAD tidak dapat dicapai Rp54.640.456.794,27 atau 4,59 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya mencapai Rp9.003.135.296.719,39 maka terlihat kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD mencapai 12,63 persen.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007 digambarkan pada tabel 3.18.

TABEL 3.16
Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007

Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	70.774.670.000,00	20.172.433.128,00	(50.602.236.872,00)	28,50
▪ Penerimaan Jasa Giro	141.450.000.000,00	104.836.510.480,66	(36.613.489.519,34)	74,12
▪ Penerimaan Bunga Deposito	395.504.941.503,00	202.681.499.423,00	(192.823.422.080,00)	51,25
▪ Sumbangan Pihak Ketiga	45.000.000.000,00	70.765.376.087,00	25.765.376.087,00	157,26
▪ TPTGR	7.000.000.000,00	7.639.432.301,00	639.432.301,00	109,13
▪ Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	2.308.747.220,00	2.308.747.220,00	-
▪ Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	847.095.365,00	847.095.365,00	-
▪ Angsuran Cicilan Rumah	1.920.000.000,00	4.059.704.900,00	2.139.704.900,00	211,44
▪ Rupa-rupa Pendapatan	509.265.348.209,00	267.377.806.499,26	(241.887.541.709,74)	52,50
▪ Sewa	20.500.000.000,00	7.583.005.291,00	(12.916.994.709,00)	36,99
▪ Pengembalian	-	349.231.628.271,81	349.231.628.271,81	-
▪ Kontra Pos	-	97.092.539.370,00	97.092.539.370,00	-
Jumlah	1.191.414.959.712,00	1.136.774.502.917,73	(54.640.456.794,27)	95,41

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007, antara lain sebagai berikut:

a). Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dalam Tahun Anggaran 2007 diperoleh dari upaya antara lain :

- Penjualan jalan atau sarana, sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang usia pemakaiannya bertambah, karena telah dihapuskan seperti kendaraan bermotor, bangunan gedung dan inventaris kantor.
- Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi hasil Penjualan Barang Milik Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp20.172.433.128,00 atau 28,50 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp70.774.670.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasinya tidak mencapai target Rp50.602.238.872,00 atau 71,50 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2007 digambarkan pada tabel 3.19

TABEL 3.17

**Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
Tahun 2007**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Penjualan Jalan/Sarana	45.000.000.000,00	12.500.895.440,00	(32.499.104.560,00)	27,78

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
2.	Penjualan Inventaris/Barang Bekas	15.540.320.000,00	2.419.470.188,00	(13.120.849.812,00)	15,57
3.	Penjualan Brandgang	10.234.350.000,00	5.252.067.500,00	(4.982.282.500,00)	51,32
	Jumlah	70.774.670.000,00	20.172.433.128,00	(50.602.236.872,00)	28,50

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

b). Jasa Giro

Realisasi penerimaan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp104.836.510.480,66 atau 74,12 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp141.450.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasinya tidak mencapai target Rp36.613.489.519,34 atau 25,88 persen.

Penurunan realisasi penerimaan jasa giro tersebut disebabkan oleh :

- Menurunnya tingkat suku bunga Bank

c). Bunga Deposito

Bunga Deposito sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007, realisasinya mencapai Rp202.681.499.423,00 atau 51,25 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp395.504.941.503,00 Sehingga Tahun 2007 realisasinya tidak mencapai target Rp192.823.442.080,00 atau 48,75 persen.

Penurunan realisasi penerimaan Bunga Deposito tersebut disebabkan oleh :

- Menurunnya tingkat suku bunga Bank

d). Angsuran Cicilan Rumah

Realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp4.059.704.900,00 atau 211,44 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.920.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, terjadi pelampauan target penerimaan Rp2.139.704.900,00 atau 111,44 persen.

Pencapaian target realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah diupayakan dari:

- Cicilan uang muka rumah susun Rp89.175.606,00;
- Sewa beli rumah susun Rp3.969.122.054,00;
- Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli Rp1.407.240,00.

e). Rupa-rupa Pendapatan

Realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp267.377.806.499,26 atau 52,50 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp509.265.348.209,00 Dengan demikian Tahun 2007 realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan tidak mencapai target sebesar Rp241.887.541.709,74 atau 47,50 persen.

Selanjutnya realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan Tahun 2007 digambarkan pada tabel 3.20.

TABEL 3.18
Realisasi Penerimaan Rupa-Rupa Pendapatan pada
Perhitungan APBD Tahun 2007

No	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Uang Gambar/Bestek	-	4.371.000,00	4.371.000,00	-
2	Dinas Tenaga Kerja/Premi Asuransi	2.750.000.000,00	3.962.906.504,00	1.212.906.504,00	144,11
3	TM Ragunan	500.000.000,00	652.578.617,00	152.578.617,00	130,52
4	Jaminan untuk Pemasangan Reklame	-	1.271.098.392,00	1.271.098.392,00	-
5	Hasil Lelang Titik Reklame	40.000.000.000,00	19.387.047.277,00	(20.612.952.723,00)	48,47
6	RSUD Budhi Asih	6.434.100.000,00	5.672.890.801,00	(761.209.199,00)	88,17
	RSUD Pasar Rebo	30.993.500.000,00	30.779.622.873,00	(213.877.127,00)	99,31
7	RSUD Koja	375.327.000,00	977.328.435,00	602.001.435,00	260,39
8	RSUD Tarakan	581.793.000,00	-	(581.793.000,00)	-
9	RSUD Duren Sawit	35.000.000,00	92.279.932,00	57.279.932,00	263,66
11	Puskesmas	-	7.724.144.100,00	7.724.144.100,00	-
12	Biaya Penutupan galian	1.000.000.000,00	3.308.307.633,00	2.308.307.633,00	330,83
13	Sumbangan Perum Jasa	2.500.000.000,00	5.304.013.500,00	2.804.013.500,00	212,16

No	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
	Raharja				
14	Fasos/Fasum	9.204.537.000,00	2.769.477.000,00	(6.435.060.000,00)	30,09
15	Biaya penyelesaian desimal	-	6,26	6,26	-
16	Eks. Kanwil Deperindang	-	360.893.000,00	360.893.000,00	-
17	Sewa Rusun Sederhana Cipinang Muara	-	5.736.510,00	5.736.510,00	-
18	Penerimaan Pembayaran Air PDAM Rusunawa	160.000.000,00	691.249.988,00	531.249.988,00	432,03
19	Eks. Kanwil Dephub	-	457.873.800,00	457.873.800,00	-
20	Eks. Kanwil Depnaker	-	127.000,00	127.000,00	-
21	RSB Tambora Jakarta Pusat	-	-	-	-
22	RSB Cipinang Besar Utara Jakarta Timur	-	77.167.730,00	77.167.730,00	-
23	BP Trans Jakarta (Bus Way)	387.734.431.709,00	168.292.579.912,00	(219.441.851.797,00)	43,40
24	PT. Nakia Dwipardha	-	117.685.160,00	117.685.160,00	-
25	PT. Suwar Andhika Wahana Ujindo	-	229.904.720,00	229.904.720,00	-
26	PT. PLN	-	58.900.200,00	58.900.200,00	-
27	Jaminan Pek. Dinas PJU & SJU	-	465.127.020,00	465.127.020,00	-
	Jumlah	509.265.348.209,00	267.377.806.499,26	(241.887.541.709,74)	52,50

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

3.2.2.2 Bagian Dana Perimbangan

Tahun 2007 bagian penerimaan daerah dari Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang terdiri dari Penerimaan SDA sektor Perikanan, SDA sektor Minyak Bumi dan SDA sektor Gas Alam, serta Dana Alokasi Umum.

Dana Perimbangan merupakan penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

Realisasi penerimaan daerah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp7.254.014.183.565,00 atau 95,80 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp7.572.132.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp318.117.816.435,00 atau 95,80 persen.

Apabila realisasi penerimaan Dana Perimbangan ini dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah yang jumlahnya mencapai Rp16.941.075.526.484,40 maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 42,82 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan tersebut bersumber dari :

- Bagi Hasil Pajak realisasinya mencapai Rp7.005.071.183.565,00 atau 95,73 persen;
- Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya mencapai Rp128.893.818.101,00 atau 51,56 persen;
- Dana Alokasi Umum realisasinya mencapai Rp119.943.000.000,00 atau 100,00 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2007 digambarkan pada tabel 3.21.

TABEL 3.19

**Realisasi pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD
Tahun 2007**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
I.	Bagi Hasil Pajak	7.202.189.000.000,00	7.005.177.365.464,00	(197.011.634.536,00)	97,26
	▪ Pajak Bumi dan	1.724.768.000.000,00	1.492.338.658.997,00	(232.429.341.003,00)	86,52

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2007		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
II.	Bangunan				
	▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.390.189.000.000,00	1.248.369.783.965,00	(141.819.216.035,00)	89,80
	▪ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.000.000.000.000,00	4.055.240.346.330,00	55.240.346.330,00	101,38
	▪ Pendapatan Biaya Pemungutan PBB	-	121.954.635.500,00	121.954.635.500,00	-
	▪ Penerimaan PBB bagi Pemerintah Pusat yang diserahkan kembali	14.232.000.000,00	78.035.760.717,00	63.803.760.717,00	548,31
	▪ Penerimaan Insentif PBB bagi Pempus. u/ DATI II	61.000.000.000,00	-	(61.000.000.000,00)	-
	▪ Penerimaan BPHTB bagi Pempus. Yg diserahkan kembali	12.000.000.000,00	9.238.179.955,00	(2.761.820.045,00)	76,98
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	250.000.000.000,00	128.893.818.101,00	(121.106.181.899,00)	51,56
III.	▪ Pendapatan SDA Sektor Perikanan	2.500.000.000,00	2.912.843.884,00	412.843.884,00	116,51
	▪ Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi	232.500.000.000,00	114.543.462.590,00	(117.956.537.410,00)	49,27
	▪ Pendapatan SDA Sektor Gas Alam	15.000.000.000,00	11.437.511.627,00	(3.562.488.373,00)	76,25
	Dana Alokasi Umum	119.943.000.000,00	119.943.000.000,00	-	100,00
	• Dana Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	• Dana Rutin Daerah	119.943.000.000,00	19.943.000.000,00	-	-
	JUMLAH	7.572.132.000.000,00	7.254.014.183.565,00	(318.117.816.435,00)	95,80

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Dana Perimbangan, Tahun 2007 sebagai berikut :

3.2.2.2.1 Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp7.005.177.365.464,00 atau 97,26 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp7.202.189.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2007

terlihat target yang tidak dapat dicapai Rp197.011.634.536,00 atau 2,74 persen.

Apabila realisasi Bagi Hasil Pajak dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan, maka kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan sangat signifikan yaitu mencapai 96,57 persen.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain :

- Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Pemutakhiran data objek dan subjek PBB;
- Peningkatan sistem pelayanan pembayaran melalui ***“payment on line system”*** di beberapa bank, sebagai tempat pembayaran PBB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.
- Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB.

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp1.492.338.658.997,00 atau 86,52 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.724.768.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai Rp232.429.341.003,00 atau 13,48 persen.

b). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan BPHTB yaitu: peningkatan koordinasi dan kerja sama pengawasan terhadap setiap transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan PBB, dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara; serta pemberian penghargaan dan hadiah kepada PPAT yang berprestasi dalam pemungutan BPHTB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.

Bagian daerah dari penerimaan BPHTB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 realisasinya mencapai Rp1.248.369.783.965,00 atau 89,80 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.390.189.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp141.819.216.035,00 atau 10,20 persen.

c). Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan PPh yaitu peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan upaya tersebut telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2002 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-21/Pj/2004 tentang Koordinasi Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan Jakarta ditunjuk sebagai Pilot Proyek di seluruh Indonesia.

Bagian daerah Provinsi DKI Jakarta dari penerimaan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp4.055.240.346.330,00 atau 101,38 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp4.000.000.000.000,00.

Dengan demikian Tahun 2007, terdapat pelampauan target penerimaan PPh mencapai Rp55.240.346.330,00 atau 1,38 persen.

3.2.2.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp128.893.818.101,00 atau 51,56 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp250.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tidak dapat dicapai Rp121.106.181.899,00 atau 29,02 persen.

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA bersumber dari :

- Penerimaan SDA Sektor Perikanan realisasinya Rp2.912.843.884,00
- Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi realisasinya Rp114.543.462.590,00
- Penerimaan SDA Sektor Gas Alam realisasinya Rp11.437.511.627,00

3.2.2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp119.943.000.000,00 atau 100,00 persen, dari proyeksi yang telah ditetapkan Rp119.943.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2007, realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum dapat mencapai target. Realisasi penerimaan DAU ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006, dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2005 tanggal 12 Desember 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006.

3.2.3 Permasalahan dan Solusi

3.2.3.1 Permasalahan

Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah, terdapat beberapa permasalahan untuk pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif, disamping konsumsi otomotif tidak menjadi obyek pilihan utama bagi masyarakat dan menurunnya produksi dalam negeri pada sektor otomotif. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel disebabkan; menurunnya jumlah hunian kamar hotel bintang lima dan hotel bintang lima berlian sebagai dampak berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel dan tidak menjadi objek pilihan utama bagi sebagian masyarakat.

Selain itu, tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan permasalahan sebagai berikut :

- Pajak ini bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan kepada pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- Adanya pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, seperti menjamurnya bisnis pencucian kendaraan yang tidak diikuti dengan pengaturan kebijakan tentang pemungutan pajaknya.

Pada bagian ini, permasalahan yang dialami terhadap target realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak

tercapai antara lain disebabkan **pelayanan kesehatan dari poliklinik spesialis tidak dapat dibuka setiap hari di Puskesmas Swadana**, sehingga berdampak kepada penurunan realisasi pendapatan.

3.2.3.2 Solusi

Solusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk dapat mengatasi permasalahan meliputi hal-hal sebagai berikut untuk mencapai target realisasi penerimaan PKB BBN-KB berbagai langkah dan upaya dilakukan secara optimal, antara lain :

- Penyampaian Surat pemberitahuan (Super) PKB secara intensif.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak swasta seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pengusaha/pemilik showroom dan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor dan Gaikindo.
- Peningkatan pendataan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di kawasan tertentu.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, seperti pelayanan samsat keliling.
- Penelitian dan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang.
- Koordinasi pengawasan pembayaran PKB dilakukan lebih intensif melalui operasi/razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- Peningkatan pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan nilai jual kendaraan bermotor;
- Peningkatan survey dilapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta;

- Peningkatan pengawasan pembayaran BBN-I (kendaraan baru) yang tidak dibayar melalui modus ganti nama, ganti nomor chasis dan lainnya.

Untuk meningkatkan realisasi Pajak Hotel, sesuai yang dilakukan Pemerintah Provinsi meliputi :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa pajak hotel;
- Penagihan secara intensif atas tunggakan Pajak Hotel termasuk penagihan dengan surat paksa;
- Pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan di lapangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar;
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam upaya solusi pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berbagai langkah dan upaya dilakukan meliputi :

- Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan terhadap titik-titik sumur air bawah tanah bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar (belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peningkatan kegiatan survey/observasi di lapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi permasalahan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor, Retribusi terus dilakukan seperti :

- Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan perparkiran.
- Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Survey potensi parkir yang intensif sebagai tolok ukur pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan target realisasi penerimaan Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor yang tidak tercapai, berbagai upaya terus dilakukan seperti : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; dan Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan umum bekerja sama dengan instansi terkait.

Sementara itu, solusi permasalahan tidak tercapai target penerimaan Retribusi Terminal, berbagai upaya dilakukan secara intensif seperti : Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi; Peningkatan pemantauan di terminal-terminal; dan Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.

Mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target realisasi retribusi kebersihan antara lain dilakukan : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui intensifikasi jangka waktu pelayanan serta Penempatan pos pelayanan ditempat-tempat tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Pelayanan untuk konsumen rumah tinggal dilayani dengan kendaraan tangki kecil berkapasitas 3m³ oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan Kotamadya,
- Pelayanan untuk konsumen industri dilayani dengan kendaraan besar berkapasitas 6m³ oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi RCH yang tidak mencapai target ditempuh dengan upaya-upaya antara lain Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan ternak potong di rumah potong hewan, Peningkatan pengawasan di lapangan, serta Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi permasalahan pada Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak mencapai target, dilakukan solusi : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi; Peningkatan pelayanan keolahragaan kepada masyarakat; serta Peningkatan pemantauan dan penyuluhan tempat rekreasi dan olah raga secara periodik kepada masyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi ini, secara intensif antara lain; dengan melakukan Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas.

3.3 Pengelolaan Daerah

3.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam perencanaan program dan kegiatan tetap mengacu Renstrada 2002-2007, sementara untuk kebijakan pelaksanaan APBD 2007 masih menggunakan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Perda Nomor 5 Tahun 2007, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Surat Edaran Bappenas dan perubahannya.

Disamping itu, pengelolaan Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (*performance-based budgeting*).

3.3.2 Target dan Realisasi Belanja

3.3.2.1 Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan

TABEL 3.20
Realisasi Belanja Daerah menurut Bidang Pembangunan
Tahun 2007

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hukum Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa	847.643.081.323,00	673.016.657.093,00	79.40
2	Pemerintahan	8.230.280.633.587,00	6.966.642.066.394,00	84.65
3	Ekonomi	856.907.448.823,00	666.107.693.957,00	77.73
4	Pendidikan dan Kesehatan	2.881.616.036.624,00	2.306.937.925.616,00	80.06
5	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	286.087.785.336,00	249.904.032.475,00	87.35
6	Sosial dan Budaya	919.383.176.461,00	570.278.118.571,00	62.03
7	Sumberdaya Alam dan Lingk.Hidup	1.495.350.233.176,00	1.083.663.362.185,00	120.62
8	Sarana dan Prasarana Kota	5.118.801.084.248,00	3.058.041.474.232,00	59.74
	Jumlah	20.636.069.479.578,00	15.574.591.330.523,00	78.96

3.3.2.2 Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja
Tahun 2007

No.	KELOMPOK/JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	APARATUR	6.464.297.988.003,00	4.948.676.752.861,00	76.55
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	3.941.998.960.981,00	3.325.815.858.316,00	84.37
	1. Belanja Pegawai	2.812.429.194.214,00	2.555.556.516.324,00	90.87

No.	KELOMPOK/JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2. Belanja Barang dan Jasa	985.790.468.232,00	668.629.661.491,00	67.83
	3. Belanja Perjalanan Dinas	8.060.000.000,00	6.047.099.354,00	75.03
	4. Belanja Pemeliharaan	135.719.298.535,00	95.582.581.147,00	70.43
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1.547.954.331.605,00	1.030.091.334.117,00	66.55
	1. Belanja Pegawai	654.940.537.275,50	435.972.332.692,00	66.57
	2. Belanja Barang dan Jasa	712.946.023.045,00	470.910.426.777,00	66.05
	3. Belanja Perjalanan Dinas	35.454.891.950,00	21.117.015.904,00	59.56
	4. Belanja Pemeliharaan	144.612.879.334,50	102.091.558.744,00	70.60
III	BELANJA MODAL	974.344.695.417,00	592.769.560.428,00	60.84
	PELAYANAN PUBLIK	14.171.771.491.575,00	10.625.914.577.662,00	74.98
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	3.207.589.635.705,00	3.076.598.740.770,00	95.92
	1. Belanja Pegawai	3.032.360.612.235,00	2.947.860.267.295,00	97.21
	2. Belanja Barang dan Jasa	138.909.916.841,00	104.901.874.993,00	75.52
	3. Belanja Pemeliharaan	36.319.106.629,00	23.836.598.482,00	65.63
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	5.109.978.081.500,00	3.958.126.631.834,00	77.46
	1. Belanja Pegawai	922.805.184.783,00	674.231.149.145,00	73.06
	2. Belanja Barang dan Jasa	3.248.509.512.109,00	2.537.186.641.848,00	78.10
	3. Belanja Perjalanan Dinas	17.971.468.500,00	10.748.773.162,00	59.81
	4. Belanja Pemeliharaan	920.691.916.108,00	735.960.067.679,00	79.94
III	BELANJA MODAL	5.151.664.200.683,00	2.964.348.240.084,00	57.54
IV	BELANJA BANTUAN KEU	679.052.619.333,00	625.707.279.974,00	92.14
V	BELANJA TIDAK TERSANGKA	23.486.954.354,00	1.133.685.000,00	4.83
	Jumlah	20.636.069.479.578,00	15.574.591.330.523,00	75.47

Sementara itu menurut jenis belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2007 dapat digambarkan pada tabel 3.24.

Tabel 3.22

**Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja
Tahun 2007**

No.	JENIS	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI %	REALISASI	
				(Rp)	(%)
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	7,149,588,596,686.00	34.65	6,402,414,599,086.00	89.55
	1. Belanja Pegawai	5,844,789,806,449.00	28.32	5,503,416,783,619.00	94.16
	2. Belanja Barang dan Jasa	1,124,700,385,073.00	5.45	773,531,536,484.00	68.78
	3. Belanja Perjalanan Dinas	8,060,000,000.00	0.04	6,047,099,354.00	75.03
	4. Belanja Pemeliharaan	172,038,405,164.00	0.83	119,419,179,629.00	69.41
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	6,657,932,413,105.00	32.26	4,988,217,965,951.00	74.92
	1. Belanja Pegawai	1,577,745,722,059.00	7.65	1,110,203,481,837.00	70.37

No.	JENIS	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI %	REALISASI	
				(Rp)	(%)
	2. Belanja Barang dan Jasa	3,961,455,535,154.00	19.20	3,008,097,068,625.00	75.93
	3. Belanja Perjalanan Dinas	53,426,360,450.00	0.26	31,865,789,066.00	59.64
	4. Belanja Pemeliharaan	1,065,304,795,443.00	5.16	838,051,626,423.00	78.67
III	BELANJA MODAL	6,126,008,896,100.00	29.69	3,557,117,800,512.00	58.07
IV	BELANJA BANTUAN KEU	679,052,619,333.00	3.29	625,707,279,974.00	92.14
V	BELANJA TIDAK TERSANGKA	23,486,954,354.00	0.11	1,133,685,000.00	4.83
	Jumlah	20.636.069.479.578,00		15.574.591.330.523,00	75,47

3.3.2.2.1 Belanja Administrasi Umum

Pada Tahun Anggaran 2007, Belanja Administrasi Umum dialokasikan sebesar Rp7,149,588,596,686.00 atau 34,64 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp6,402,414,599,086.00 atau 89,55 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp747,173,997,600.00.

Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp5,844,789,806,449 atau 81,75 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp5,503,416,783,619.00 atau 94,16 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 341,373,022,830.00

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp1,124,700,385,073 atau 15,73 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp773,531,536,484.00 atau 68,78 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 351,168,848,589.00

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp8,060,000,000 atau 0,11

persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp6,047,099,354.00 atau 75,03 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,012,900,646.00. Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp 1,065,304,795,443 atau 2,46 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp119,419,179,629.00 atau 69,41 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp52,619,225,535.00.

3.3.2.2.2 Belanja Operasi Dan Pemeliharaan

Kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp6,657,932,413,105 atau 32,26 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4,988,217,965,951.00 atau 74,92 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1,669,714,447,154.00.

Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1,577,745,722,059 atau 23,69 persen dari total kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp1,110,203,481,837.00 atau 70,37 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 467,542,240,222.00.

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp3,961,455,535,154 atau 59,49 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp3,008,097,068,625.00 atau 75,93 persen

sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 953,358,466,529.00.

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp53,426,360,450 atau 0,80 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp31,865,789,066.00 atau 59,64 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 21,560,571,384.00 Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1,065,304,795,443 atau 16,00 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp838,051,626,423.00 atau 78,67 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp227,253,169,020.00.

3.3.2.2.3 Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp6,126,008,896,100 atau 29,68 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp3,557,117,800,512.00 atau 58,07 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2,568,891,095,588.00.

3.3.2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;

- Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan.

Obyek belanja transfer adalah organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi lainnya seperti biaya operasional KPUD, BP Trans Jakarta, bantuan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, Yayasan Jantung Anak Indonesia dan Bantuan Masjid Al Mujahidin.

Kelompok Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp679,052,619,333.00 atau 3,29 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp625.707.279.974,00 atau 92,14 persen.

3.3.2.2.5 Belanja Tidak Tersangka

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. Belanja Tidak Tersangka juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp23,486,954,354.00 atau 0,11 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp1.133.685.000,00 atau 4,83 persen. Rendahnya realisasi menunjukkan kinerja perencanaan keuangan dimana

pengeluaran dalam Belanja Tidak Tersangka hanya digunakan untuk hal-hal mendesak yang memerlukan penanganan segera.

3.3.3 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa permasalahan utama belanja daerah yang dapat dikemukakan antara lain; **Pertama**, terlambatnya pengesahan APBD sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kemungkinan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2007 yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan/rincian kegiatan sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi rendah. **Kedua** masih adanya beberapa kesalahan yang harus disesuaikan pada belanja pegawai, dan Telepon, Air, Listrik (TAL), **Ketiga** Tidak ada kecocokan harga dalam beberapa kasus pembebasan tanah (Bantar Gebang, BKT, dll). dan **Keempat**, masih terdapatnya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening, volume dan satuan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), sehingga perlu adanya revisi dalam rangka penyesuaian, yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka solusi harus dilakukan adalah **Pertama**, pengesahan APBD dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. **Kedua** perlu ada sistem penghitungan gaji dan TAL yang valid.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007. Rencana Program dalam Renstrada meliputi Program Dedicated dan Program 8 (delapan) Bidang Pembangunan. Dengan demikian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Program Dedicated
2. Program menurut Bidang Pembangunan :
 - a. Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
 - b. Bidang Pemerintahan
 - c. Bidang Ekonomi
 - d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - e. Bidang Sosial Budaya
 - f. Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
 - g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - h. Bidang Sarana Prasarana Kota
3. Permasalahan dan solusinya

4.1. PROGRAM DEDICATED

a. Banjir Kanal Timur

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah telah dibebaskannya lahan seluas 53,9 Ha dengan rincian :

- Untuk pembebasan lahan dengan menggunakan anggaran APBD lahan yang terbebaskan seluas 48,1 ha yang terdiri dari 27,3 ha profil basah dan 20,8 ha koridor .
- Sedangkan untuk pembebasan lahan dengan menggunakan anggaran APBN lahan yang terbebaskan seluas 5,8 ha yang terdiri dari 3,8 ha profil basah dan 1,9 ha koridor.

Dengan demikian, pembebasan tanah untuk mendukung Banjir Kanal Timur sampai akhir tahun 2007 telah mencapai 184,7 Ha atau 72,82 % dari total lahan profil basah sedangkan untuk koridor, lahan yang sudah terbebaskan seluas 35 ha atau 23,11 %.

b. Normalisasi Sungai, Situ dan Saluran

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Pembangunan waduk Sunter Hulu, Cimanggis, Cilangkap, Rawa Lindung dan Rawa Badung.
- Normalisasi Kali Sekretaris, Kali Banglio, Kali Tanjung dan Kali Ciliwung Gajah Mada
- Pembangunan Situ Rawa Lindung dan Parkir Air Kali Sunter Hulu Pondok Ranggan
- Lancarnya saluran Penghubungan dan saluran mikro sepanjang 13,59 km

c. Pelabuhan Laut,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terbangunnya Dermaga Muara Angke

d. Busway

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terpeliharanya jalur busway koridor 1 sampai dengan koridor 7
- Tersedianya Jalur Busway koridor 8,9,10
 - Koridor 8 (Lebak Bulus - Harmoni)
 - Koridor 9 (Pinang Ranti - Grogol - Pluit)
 - Koridor 10 (Cililitan - Tanjung Priok)
- Terbangunnya 2 lokasi *park and ride* (Terminal Bis Ragunan dan Terminal Bis Kampung Rambutan),
- Terbangunnya prasarana penunjang pool busway di 2 lokasi yaitu di lahan eks pool PPD Cililitan dan Daan Mogot.

- Dengan selesainya Koridor 1 sampai dengan 7 maka total panjang jalur busway dari Koridor I sampai dengan 7 adalah 97,35 Km
- Empat (4) koridor busway yang baru dan interkoneksinya dengan 7 koridor busway terdahulu serta dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan armada diharapkan akan dapat menampung 1,1 milyar penumpang (potential demand) per tahun.
- Dilakukan penataan trayek angkutan umum yang bersinggungan dengan 7 koridor ini.

e. Mass Rapid Transit (MRT)/Subway,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Telah dilaksanakan studi oleh Special Assistance for Project Implementation (SAPI)Team dan Special Assistance for Procurement Management (SAPMAN) Team yang dibiayai oleh JBIC.
- Telah dilaksanakan Seminar tentang Jakarta MRT (28 Mei 2007).
- Telah dilaksanakan 2nd Advisory Committee Meeting (6 Agustus 2007).
- Telah disusun Naskah Akademis pendirian BUMD MRT.
- Finalisasi SK Gubernur Tentang Trace MRT.
- Telah dilaksanakan Publikasi MRT melalui media cetak dan pembuatan bahan publikasi dalam bentuk audio visual.
- Telah dilaksanakan penyempurnaan jalan-jalan alternatif pra-konstruksi

f. Fly-over dan Underpass (FO/UP).

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Berfungsinya 3 Flyover yaitu FO. Roxy, FO Yos Sudarso, FO Martadinata
- Berfungsinya 2 Underpass yaitu Underpass Angkasa, Underpass Kebayoran Lama.

g. Perumahan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terbangunnya 1200 unit rusun Marunda, 280 unit rusun Pinus Elok, 63 unit rusun Cakung Barat, 48 unit rusun Pulo Jahe dan 100 unit rusun Pulo Gebang dan dilakukannya perbaikan lingkungan di 56 RW kumuh.

b. Kaki Lima dan Pembangunan Terminal Agribisnis,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Berfungsinya 16 lokasi binaan (Lokbin) di Jakarta
- Pembangunan “One Village One Product” 1 (satu) kawasan di Pondok Rangon
- Berfungsinya pusat ikan hias di Johar Baru
- Telah diselesaikan kajian Terminal Agribisnis.

c. Ijo Royo-royo,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terbangunnya taman Rusunawa Pasar Jumat, Rusunawa Sindang Koja, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara dan Rusun Tipar Cakung;
- Penataan jalur hijau pada beberapa koridor busway;
- Meningkatnya kuantitas ruang terbuka hijau antara lain dengan pembangunan taman interaktif seluas 4.356,67 m²; pembangunan jalur hijau tepian air seluas 9.988,33 m²; refungsi jalur hijau seluas 6.000 m²;
- Berfungsinya Taman Persija Menteng.

d. Waste-To-Energy

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terlaksananya Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Tinggi kepada masyarakat.

- Terlaksananya Gelar Sosialisasi dan Aksi untuk Pembangunan ITF di 2 Wilayah Kodya.
- Tersusunnya AMDAL ITF Duri Kosambi

e. PPMK

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Meningkatnya jumlah dana PPMK di Kelurahan dari Rp.723.370.324.783,- (2006) menjadi Rp 989.340.393.889,- (2007)
- Jumlah pemanfaat dana bina ekonomi sebanyak 364.609 orang/kelompok (2006); menjadi 405.380 orang / kelompok (2007)
- Terlatihnya tenaga unit pengaduan masyarakat (dumas) sebanyak 267 orang
- Terselenggaranya penyempurnaan sistim informasi dan monitoring PPMK

f. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terlaksananya 3 kewenangan Lurah sesuai Pergub 46 tahun 2006
- Kegiatan kebersihan antara lain, kerja bakti lingkungan tingkat Kelurahan
- Kegiatan keamanan lingkungan antara lain, pelaksanaan pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gangguan sosial dan ketertiban umum.
- Kegiatan kesehatan masyarakat antara lain, penggerakan masyarakat untuk pencegahan demam berdarah.

g. Peningkatan kualitas layanan publik Kecamatan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Terlaksananya 13 kewenangan Camat sesuai Pergub Nomor 46 Tahun 2006
- Kecamatan diberi wewenang keuangan sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah
- Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemeliharaan saluran mikro, penopongan pohon, pemeliharaan jalan MHT, peningkatan pelayanan PJU, tutup lobang.

h. Pendidikan,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Rehab Total 5 gedung SDN dan 4 gedung SMPN

i. Kesehatan,

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, adalah :

- Berfungsinya Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan Bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
- Penyedia pelayanan kesehatan oleh 82 Rumah Sakit, 1 yayasan ginjal dan 44 Puskesmas yang diikat dengan Kontrak.
- Pelayanan JPK Gakin dan SKTM, meliputi:
 - Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Puskesmas: 420.033 orang
 - Rawat Inap (RI) Rumah Sakit : SKTM 28.456 orang, gakin 11.802 orang
 - Rawat Jalan (RJ) Rumah Sakit : SKTM 98.642 orang, gakin 133.610 orang.
 - Pelayanan Bencana dan KLB, meliputi:
 - DBD : 38.435 orang, orang sakit DBD dari DKI dan yang sedang bertamu ke Jakarta
 - Gizi Buruk : 586 kasus terdiri dari 201 orang
 - GED : 3.203 orang

- KDRT : 745 orang
- Flu Burung : 97 orang dengan status suspek dan flu burung positif 9 orang, yang dirawat di RS Sulianti Saroso dan RS Persahabatan.
- Lumpuh Layu : 5 orang dirawat gakin, dan 63 orang yang dirujuk.
- Korban Kebakaran/Banjir : 71.692 orang yang dirawat dari pasien 133.490 orang termasuk yang dilayani di posko Kesehatan.

j. Penyelenggaraan PILKADA

Penyelenggaraan PILKADA Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Provinsi DKI Jakarta penyelenggaraan PILKADA dilaksanakan pada bulan November 2007 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2007 – 2012. Adapun hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan PILKADA Provinsi DKI Jakarta adalah :

1. Terselenggaranya PILKADA Provinsi DKI Jakarta yang damai dan aman;
2. PILKADA Provinsi DKI Jakarta diikuti 2 pasang Calon Kepala Daerah yaitu Pasangan Adang Daradjatun, Dani Anwar dan pasangan H. Fauzi Bowo, Prijanto.
3. Jumlah daftar pemilih tetap PILKADA Provinsi DKI Jakarta adalah 5.719.285 pemilih tetap yang terdiri dari 2.890.227 pemilih laki-laki dan 2.829.058 pemilih perempuan;
4. Terlaksananya pemungutan suara PILKADA di 11.256 TPS;
5. Tersediannya 5.719.285 surat suara resmi dan 142.982 surat suara tambahan;
6. Tersediannya 22.512 bilik suara;
7. Terselenggaranya Posko Bersama Pilkada di tingkat Provinsi, tingkat kota/Kabupaten Administrasi, tingkat kecamatan dan kelurahan;

8. Terselenggaranya pengamanan penyelenggaraan PILKADA di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4.2. PROGRAM MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN

4.2.1 Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

4.2.1.1 Fungsi Hukum

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyusun, menata, mengembangkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, dengan melaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.1.1.1 Program Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 , antara lain :

- Penyempurnaan Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, dan Nomor 4 Tahun 1968 tentang Peraturan kendaraan dan atau alat pengangkut (penomoran kendaraan)
- Penambahan produk hukum baru berupa 5 draft Raperda dan 3 draft Rapergub.
- Penetapan 182 Raperda baru
- Penetapan 172 Peraturan Gubernur.

4.2.1.1.2 Program Peningkatan Kesadaran Hukum

Hasil yang dicapai pada Tahun 2007 adalah tersosialisasinya peraturan perundangan provinsi DKI Jakarta, antara lain melalui :

- Gema Hukum Ibukota di media TV sebanyak 3 episode;
- Terselenggaranya sosialisasi permasalahan tindak pidana korupsi bagi pejabat dan pegawai sebanyak 150 orang;
- Talk show interaktif melalui radio sebanyak 10 kali;
- Kampanye kesadaran hukum kepada 1.000 siswa, dan 300 mahasiswa.

4.2.1.1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain :

- terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat terhadap 200 sengketa pertanahan .
- terselesaikannya 45 perkara (perdata, pidana dan TUN).

4.2.1.2 Fungsi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana

ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan melaksanakan 4 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.1.2.1 Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terlatihnya 2.705 anggota linmas RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya dan Provinsi sebagai linmas,
- Terlatihnya 78/bulan anggota linmas dalam penanggulangan bencana,
- Terlatihnya 100 orang Pol PP dalam pengendalian massa.
- Terkoordinirnya instansi terkait (termasuk muspida) dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat,
- Berkurangnya tawuran masyarakat dari 31 kasus (2006) menjadi 9 kasus (2007).

4.2.1.2.2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain :

- Terevakuasinya korban bencana di 78 lokasi,
- Pemantauan dan penyaluran bantuan ke 1.250 lokasi bencana,

- Operasi penyelamatan korban bencana di 78 lokasi bencana,
- Berkurangnya pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 1988 dari 17.027 kasus (2006) menjadi 15.814 kasus (2007).

4.2.1.2.3 Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Waktu respon penanggulangan kebakaran dipertahankan rata-rata 15 menit setiap kejadian,
- Terjadinya kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran, dengan korban 3 petugas PTT meninggal dunia
- Meningkatnya jumlah hidrant dari 1.340 titik (2006) menjadi 1.390 (2007)
- Waktu pemadaman menjadi lebih cepat
- Pemeriksaan kesiapan gedung terhadap bahaya kebakaran pada 269 bangunan tinggi, 134 bangunan menengah dan 82 bangunan rendah.

4.2.1.2.4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain:

- Kemampuan memonitor ruang publik sebanyak 160 titik lokasi.
- Frekuensi patroli tramtib kelurahan 4 kali dalam sehari.
- Berfungsinya crisis center dalam penanggulangan gejolak massa dan bencana

- Terselenggaranya Pekan Sadar Bencana (Disaster Awareness Week)

4.2.1.3 Fungsi Kesatuan Bangsa

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokrasi dan berwawasan kebangsaan, serta membina hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan melaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.1.3.1 Program Pemantapan Integrasi Bangsa, dan HAM

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terselenggaranya sosialisasi implementasi HAM bagi guru SD, SLTP, dan SLTA sebanyak 340 orang.
- Terselenggaranya sosialisasi HAM bagi aparat dan masyarakat sebanyak 425 orang.
- Meningkatnya peran tokoh agama dalam rangka memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama sebanyak 540 orang.
- Meningkatnya wawasan kebangsaan sebanyak 680 orang.

4.2.1.3.2 Program Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terlaksananya dialog interaktif antara legislatif dan pemerintah dengan masyarakat sebanyak 340 orang.
- Terlatihnya manajemen bagi orsospol sebanyak 165 orang.
- Terselenggaranya dialog interaktif dalam rangka penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat sebanyak 240 orang.

4.2.2 Bidang Pemerintahan

4.2.2.1 Fungsi Pemerintahan Umum

Fungsi Pemerintahan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistim pemerintahan daerah dengan melaksanakan 9 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.2.1.1 Program Pengembangan Otonomi Daerah

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terumuskannya rekomendasi model-model pengembangan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta,
- Tersusunnya hasil koordinasi peningkatan manajemen kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta,
- Tersusunnya rumusan pola/model penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi, Kodya/Kab Adm, Kecamatan dan Kelurahan

- Terumuskannya reformasi birokrasi pelayanan masyarakat di wilayah

4.2.2.1.2 Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Tersusunnya rumusan model pengelolaan data dan informasi kinerja pemerintahan wilayah dan pemanfaatan informasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan kecamatan dan kelurahan,
- Tersusunnya hasil evaluasi pemanfaatan ruang kantor lurah untuk lembaga keuangan mikro sebagai pengelola dana ekonomi/bergulir,
- Tersusunnya draft keputusan gubernur tentang pembinaan perangkat wilayah,
- Tersusunnya rumusan peningkatan pelayanan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta
- Tersusunnya keputusan gubernur tentang pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4.2.2.1.3 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain

- Diperolehnya penghargaan berupa Piala Adipura
- Diperolehnya penghargaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Diperolehnya penghargaan Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3)

- Diperolehnya penghargaan Indeks Pemabngunan Manusia (IPM)
- Diperolehnya penghargaan Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes)
- Beroperasinya kantor Walikota Jakarta Pusat sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
 - Terkoordinasikannya penyelesaian kasus/sengketa
- Beroperasinya 8 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat
- Beroperasinya 44 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Beroperasinya pelayanan ketatakotaan ISO 9001-2000 di 2 Kecamatan :
- Beroperasinya pelayanan Kesehatan ISO 9001-2000 di 5 Puskesmas :
- Berfungsinya 13 Sasana Krida Karang Taruna (SKKT)
- Beroperasinya pelayanan prima satu atap
- Berkurangnya kerusakan pada saat penertiban kaki lima
- Terdistribusinya raskin.

4.2.2.1.4 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Beroperasinya kantor Walikota Jakarta Utara sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
- Terdistribusinya beras untuk rakyat miskin (raskin) kepada 48.469 keluarga miskin (kk).
- Beroperasinya 6 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat,
- Beroperasinya 31 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Berfungsinya 17 Sasana Krida Karang Taruna (SKKT)
- Beroperasinya pelayanan prima satu atap;
 - Pertanahan 7000 pelayanan
 - Pelayanan PBB/Bank DKI 2212 pelayanan
 - Perindustrian dan Perdagangan 514 pelayanan
 - Tata Kota 117 pelayanan
 - Pendapatan Daerah 343 pelayanan

- Kas Daerah 5793 pelayanan
- Penataan dan Pengawasan Bangunan 299 pelayanan
- Pelayanan Kesehatan 563 pelayanan
- Kanwil Pelayanan Pemakaman 872 pelayanan
- Kependudukan dan Capil 433 pelayanan
- Berkurangnya kerusakan pada saat penertiban kaki lima

4.2.2.1.5 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Beroperasinya kantor Walikota Jakarta Barat sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
- Beroperasinya 8 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
- Beroperasinya 56 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Berfungsinya 28 Sasana Krida Karang Taruna (SKKT)
- Terdistribusinya raskin

- Berkurangnya kerusakan pada saat penertiban kaki lima

4.2.2.1.6 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Diperolehnya penghargaan berupa Piala Adipura
- Beroperasinya kantor Walikota Jakarta Selatan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
- Beroperasinya 10 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat
- Beroperasinya 65 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Berfungsinya 33 Sasana Krida Karang Taruna (SKKT)
- Beroperasinya pelayanan prima satu atap;
- Terdistribusinya raskin
- Berkurangnya kerusakan pada saat penertiban kaki lima

4.2.2.1.7 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Beroperasinya kantor Walikota Jakarta Timur sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
 - Pengawasan dan Penertiban PK-5 liar
 - Terlaksananya Pembebasan lahan taman Jl. Cilangkap Baru Cipayung
 - Penjangkauan dan pegendalian sosial PMKS jalanan
 - Pelayanan sosial Penanggulangan
 - Bencana dan pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana
- Beroperasinya 10 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat
- Beroperasinya 65 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Berfungsinya 48 Sasana Krida Karang Taruna (SKKT)
- Beroperasinya pelayanan prima satu atap;
- Terdistribusinya raskin

- Berkurangnya kerusakan pada saat penertiban kaki lima

4.2.2.1.8 Program Pengembangan Pemerintahan Kepulauan Seribu

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Beroperasinya kantor Kabupaten Kep. Seribu sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain;
 - Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Penerbitan Advis Planning
 - Penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB)
 - Penerbitan Ijin Bidang Kesehatan
 - Penerbitan UUG
- Beroperasinya 2 kantor kecamatan sehingga dapat melayani masyarakat
- Beroperasinya 6 kantor kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat, antara lain :
 - Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan untuk kepentingan dokumen kependudukan, Surat Keterangan untuk kepentingan perniagaan, dan Surat Keterangan untuk kepentingan pencari kerja
- Terjaganya kebersihan di 6 lokasi TPU yaitu TPU Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Harapan dan Pulau Karya.

4.2.2.1.9 Program Penataan Administrasi Pertanahan

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terdatanya status kepemilikan tanah tahun 2007

- Tersosialisasinya InGub 32 tahun 2004 tentang penggunaan peta TM 3 sebagai peta dasar di Pemprov DKI Jakarta
- Terdidik dan terlatihnya 50 orang pegawai pada pelatihan Land Information System dan Geografis Information system

4.2.2.2 Fungsi Aparatur

Fungsi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan administrasi kepegawaian, kemampuan dan ketrampilan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menambah/menata struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif melalui 4 program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

4.2.2.2.1 Program Pengembangan SDM Aparatur

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Bimbingan emotional spiritual quotation (ESQ) bagi 120 orang,
- Penyempurnaan 6 SK peraturan kepegawaian.
- Terlaksananya uji kompetensi bagi 225 pejabat Pemda DKI Jakarta dan pegawai potensial.
- Pembentukan tim penilai angka kredit jabatan fungsional pada unit kerja sebanyak 44 orang
- Terlaksananya analisis pengembangan diklat peningkatan kompetensi sikap dan kepribadian pejabat eselon II dan III sebanyak 60 orang.

4.2.2.2.2 Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Terlaksananya proses kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
- Terseleksinya 3.184 CPNS sebagai pegawai Pemda DKI Jakarta;
- Pemberian pensiun terpadu dan penelitian data perorangan calon penerima (DPCP) kepada 3604 orang,
- Pengembangan perpustakaan kepegawaian sebanyak 5000 judul

4.2.2.2.3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain:

- Terlaksananya diklatpim tingkat IV dan III
- Terlaksananya pengiriman peserta diklatpim tingkat II
- Terlaksananya diklat teknis umum dan jabatan fungsional sebanyak 12 jenis diklat
- Terlaksananya diklat teknis substantif sebanyak 10 jenis diklat
- Pengiriman pegawai tugas belajar.

4.2.2.2.4 Program Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Hasil yang dicapai dalam tahun 2007 adalah, antara lain :

- Tersusunnya Rapergub tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- Tersusunnya Rapergub tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BLUD Prov. DKI Jakarta;
- Tersusunnya rancangan Permendagri tentang Pedoman Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta;
- Tersusunnya laporan evaluasi kelembagaan Lembaga non struktural Pemprov. DKI Jakarta;
- Tersusunnya analisa jabatan Satpol PP;
- Tersusunnya Beban Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- Tersusunnya formasi jabatan Pranata Humas, jabatan perancang peraturan perundang-undangan, jabatan pengawas mutu pakan.

4.2.2.3 Fungsi Perencanaan dan Pengawasan

Fungsi Perencanaan dan Pengawasan dimaksudkan untuk menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pikiran seluruh elemen masyarakat (stakeholders) dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan. Pada Tahun Anggaran 2007, Fungsi Perencanaan dan Pengawasan mendapat alokasi Belanja untuk melaksanakan 4 Program.

Adapun penjelasan masing-masing program sebagai berikut:

4.2.2.3.1 Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga perencanaan daerah, dengan hasil antara lain :

- Tersusunnya LKPJ Tahun 2006,
- Tersusunnya LKPJ AMJ 2002-2007,
- Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD 2006,
- Tersusunnya Kebijakan Umum APBD-P (KUA-P) Tahun 2007,
- Tersusunnya PPA-Perubahan Tahun 2007,
- Tersusunnya Dokumen Lampiran RAPBD-P Tahun 2007,
- Tersusunnya RKPD Tahun 2008,
- Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2008,
- Tersusunnya PPAS Tahun 2008,
- Tersusunnya Dokumen Lampiran RAPBD 2008,
- Tersusunnya RPJMD 2007-2012,
- Tersusunnya Draft RPJPD 2007-2027,
- Tersusunnya Penyempurnaan Draft dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2.3.2 Program Penelitian dan Pengembangan

Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah, antara lain:

- Tersusunnya Pergub tentang mekanisme penelitian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
- Tertatanya Dokumen hasil Perencanaan Pembangunan dan Hasil Penelitian
- Terlaksananya koordinasi internal kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD).

4.2.2.3.3 Program Peningkatan Pengawasan Fungsional

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga pengawasan daerah, dengan hasil antara lain:

- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan APBD dan tutup buku unit Satuan Kerja Tahun 2007, Burel dan Anev Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007,
- Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP),
- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2006,
- Terlaksananya pengawasan pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 8 (delapan) kasus,
- Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional Auditor sebanyak 45 (Empat puluh lima) orang dan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 50 (Lima puluh) orang.

4.2.2.3.4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga kerjasama antar daerah, dengan hasil antara lain:

- Terselenggaranya forum internasional di Jakarta (PRCUD, joint project ANMC 21),
- Terkirimnya delegasi Pemprov DKI Jakarta dalam forum internasional
- Terselenggaranya forum kerjasama dalam negeri (raker APPSI)

- Terkirimnya delegasi Pemprov DKI Jakarta dalam pembelajaran pengalaman pemerintahan kota lain (sister city).
- Tersedianya hasil 4 penelitian dan evaluasi yang berkaitan dengan kerjasama.

4.2.2.4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktifitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem administrasi dan pengelolaan aset-aset daerah untuk menjaga, memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2007 fungsi keuangan daerah mendapat alokasi belanja yang dipergunakan untuk membiayai 4 program.

Adapun penjelasan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

4.2.2.4.1 Program Peningkatan Perbendaharaan Daerah

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga perbendaharaan daerah, dengan hasil antara lain:

- Terlaksananya rekonsiliasi dan konfirmasi data penerimaan PKB/BBN-KB Kantor Kas Samsat,
- Terlaksananya Penyelesaian SPP Akhir Tahun dan Tutup Buku Tahun 2007,
- Terlaksananya konfirmasi data pengeluaran/belanja daerah perkode rekening dengan unit - unit kerja,

- Terlaksananya pengendalian likuiditas APBD Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2.4.2 Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga keuangan daerah, dengan hasil antara lain:

- Terlaksananya penyusunan perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2006,
- Terlaksananya penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007,
- Terlaksananya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008,
- Terlaksananya bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan satuan kerja Dinas (UPT) Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan keuangan Daerah,
- Tersusunnya Neraca Daerah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2006, Penyusunan Kebijakan Pedoman Penilaian Penetapan PPK-BLUD Provinsi DKI Jakarta, Penyusunan Pedoman Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU Daerah Provinsi DKI Jakarta,
- Terlaksananya penyempurnaan Peraturan/ Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Gubernur Nomor 37 dan 130 Tahun 2007 dan ,
- Terlaksananya penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.2.4.3 Program Peningkatan Penerimaan Daerah

Hasil yang dicapai Program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersedianya sarana pemungutan pajak daerah, sarana pemungutan PBB dan sarana prasarana PPh, canvassing/penjaringan objek pajak,
- Terlaksananya perbaikan sarana Gedung Kantor Samsat Timur, Samsat Barat, Samsat Polda, dan Gedung Abdul Muis,
- Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik TV Swasta dan media cetak,
- Terlaksananya pengembangan sistem pajak reklame,
- Terlaksananya kegiatan pelayanan PKB dan BBN-KB melalui samsat keliling.

4.2.2.4.4 Program Peningkatan Administrasi dan pengelolaan Aset Daerah

Hasil yang dicapai Program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya pensertifikatan tanah aset Pemda sebanyak 100 (seratus) lokasi,
- Terlaksananya pembuatan IMB gedung aset Pemda sebanyak 50 (lima puluh) lokasi,
- Pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 60 (enam puluh) unit,
- Pengadaan bus antar jemput pegawai sebanyak 10 (sepuluh) unit,
- Pengadaan HT trunking digital, pengadaan dan pemasangan RBS radio trunking/digital,

- Pengadaan papan kepemilikan aset daerah sebanyak 6 (enam) lokasi, serta pengembangan SIMA-GIS

4.2.2.5 Fungsi Sistem Informasi

Fungsi sistem informasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem informasi, teknologi informasi dan geo informasi dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan secara terpadu melalui usaha pembangunan sistem statistik, sistem data elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu juga untuk meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

Pada penetapan anggaran Tahun 2007 fungsi ini untuk melaksanakan 5 Program sebagai berikut :

4.2.2.5.1 Program Pengembangan Statistik Daerah

Hasil yang dicapai Program ini pada tahun 2007, adalah diterbitkannya buku Data dan Informasi, antara lain :

- Tersusunnya Buku Jakarta Dalam Angka 2007,
- Tersusunnya Data Pertumbuhan Ekonomi, 2006
- Tersusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2007.
- Tersusunnya Incremental Capital Output Ratio

4.2.2.5.2 Program Pengembangan Teknologi Informasi

Kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga pengelola teknologi informasi, dengan hasil antara lain:

- Terlaksananya pengembangan SI Penerimaan Daerah, perawatan dan pengembangan SI Keuangan Daerah, Implementasi Masterplan TI (Pembangunan SI Pengelolaan Keuangan Daerah),
- Terlaksananya pengadaan Mainframe z-series (Peripheral), sewa software Mainframe OS/390, sewa jaringan Fiber Optik, jaringan komunikasi Kelurahan dan kecamatan.

4.2.2.5.3 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga pengelola arsip, dengan hasil antara lain:

- Terpeliharanya 7.000. box arsip in aktif dan 12.500. berkas arsip dinamis dari SKPD dan perekaman 1.200. arsip statis berbentuk mikro film, dan 6.000. arsip berbentuk photo.
- Berjalannya operasional kearsipan dengan penataan 4.000. box arsip in aktif, dan rekonstruksi 3000 boks arsip biro keuangan
- Pengadaan 3 unit peralatan SIMARS, dan perekaman SIMARS untuk 50.000. halaman
- Meningkatnya pengetahuan tentang kearsipan di lingkungan karyawan Pemprov DKI Jakarta dan profesi kearsipan melalui pelatihan mengenai kearsipan bagi 240 peserta
- Terawatnya arsip/dokumen negara era Kabinet Gotong royong dan arsip/dokumen negara era Kabinet Persatuan Nasional.

4.2.2.5.4 Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga Kehumasan dan Keprotokolan, dengan hasil antara lain:

- Terpublikasinya acara/kegiatan Pemprov DKI Jakarta
- Pembuatan filler AMJ Gubernur 7 buah dan penayangannya sebanyak 83 kali,
- Terliputnya kegiatan pemerintahan DKI Jakarta peliputan, melalui radio, televisi dan Koran,
- Pemuatan advertorial di Koran 12 kali, sosialisasi/wawancara melalui televisi 6 kali radio 9 kali,
- Terselenggaranya acara bang yos bicara di televisi
- Berjalannya informasi media on line beritajakarta.com
- Terselenggaranya acara Gubernur, berupa jamuan tamu, penerimaan delegasi, dan acara lainnya.

4.2.2.5.5 Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan

Indikator kinerja program ini adalah berfungsinya lembaga pemetaan dan informasi pertanahan, dengan hasil antara lain:

- Tersediannya peta mengenai, lokasi sebaran SPBU dan pasar swalayan/tradisional,
- Tersediannya peta perubahan garis pantai utara Jakarta dan bathimetri kedalaman garis pantai utara Jakarta,

4.2.3 Bidang Ekonomi

4.2.3.1 Fungsi Pariwisata

Fungsi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui Pengembangan Produk Pariwisata, Pengembangan Pasar Pariwisata serta Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata. Fungsi Pariwisata pada tahun 2007 mempunyai 3 program.

Program-program yang telah dilaksanakan pada fungsi pariwisata adalah sebagai berikut :

4.2.3.1.1 Program Pengembangan Produk Pariwisata

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersusunnya desain penataan art street Cikini Raya sebanyak 1 dokumen;
- Terselenggaranya lomba desain master plan Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII sebanyak 1 dokumen.
- Terpilihnya Abang dan Nene Jakarta Tahun 2007.
- Terselenggaranya Enjoy Jakarta : Golf Festival 2007 dan Shopping Festival sebanyak 1 kali,
- Terselenggaranya atraksi kesenian budaya di kota tua sebanyak 1 kali,
- Terselenggaranya Adikarya Wisata sebanyak 1 kali, atraksi Pariwisata Unggulan sebanyak 6 event dan Jak Jazz Festival 1 kali,
- Tersedianya Master Plan Pariwisata DKI Jakarta.
- Tertatanya estetika pada koridor Pasar Baru .

- Ditayangkannya iklan pariwisata DKI di CNBC Hongkong dan CNN Amerika.

4.2.3.1.2 Program Pengembangan Pasar Pariwisata

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersedianya “Guide Book to Jakarta” sebanyak 26.758.000 buku, brosur “Kenalilah Jakarta” sebanyak 41.250 eksemplar, souvenir promotion bag sebanyak 12.860 buah, poster “Welcome to Asia” campaign sebanyak 3000 lembar dan CD promosi “Enjoy Jakarta” sebanyak 25.125 keping.
- Terpasangnya iklan pariwisata Jakarta pada media cetak di negara ASEAN : 15 insertion, ASIA : 6 insertion, Australia : 3 insertion, Arab : 1 insertion, Majalah Pasific Asia Travel Association (PATA) Indonesia : 1 insertion, Majalah Garuda Inflight : 1 insertion, Media Cetak kota-kota di Indonesia : 9 insertion.
- Keikutsertaan pada kegiatan National Association of Travel Agents Singapore (NATAS) sebanyak 1 kegiatan;
- Keikutsertaan pada kegiatan Pert Royal Show Australia sebanyak 1 kegiatan;
- Keikutsertaan pada kegiatan Malasysia Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair Malaysia sebanyak 1 kegiatan;
- Keikutsertaan pada kegiatan China International Travel Market (CTIM) sebanyak 1 kegiatan;
- Keikutsertaan pada kegiatan Japan Association of Travel Agents (JATA) World Travel Fair Jepang sebanyak 1 kegiatan;

- Keikutsertaan pada kegiatan International Meeting and Exhibition (IMEX) 2007 di Frankfurt Jerman sebanyak 1 kegiatan;
- Kegiatan Familiarization Trip sebanyak 1 kegiatan; (11). Penyelenggaraan Jakarta Tourism Summit sebanyak 1 kegiatan.
- Pengadaan booklet panduan perijinan dan retribusi industri pariwisata tidak dapat dilaksanakan karena persediaan masih mencukupi sampai akhir tahun 2007; (2).
- Tourism Promotion Organization (TPO) tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan oleh pihak penyelenggara yang berkedudukan di Kinabalu Malaysia;
- Keikutsertaan pada The Executive Commite Meeting of Tourism Promotion for Asia Pasific Cities tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan oleh pihak penyelenggara yang berkedudukan di Thailand.
- Peningkatan kunjungan Wisman dari 1.219.132 orang (2006) menjadi 1.105.258 orang (2007) dan Kunjungan Wisnu dari 12.777.571 orang (2006) menjadi 20.734.180 orang (2007)
- Penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan, untuk akomodasi sebesar Rp.377.235.000,-, dan ruang rapat sebesar Rp.24.200.000,-. Sedangkan retribusi Graha Wisata TMII, untuk akomodasi sebesar Rp.351.615.000,- dan ruang rapat sebesar Rp.6.000.000,-. Untuk Graha Wisata Ragunan, penerimaan retribusi akomodasi mencapai Rp.197.070.000,- dan ruang rapat sebesar Rp.8.800.000,-.

- Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sebesar Rp.1.206.540.869.651,- dan penerimaan Retribusi Kepariwisata sebesar Rp.3.375.220.000,-.
- Peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata dari Rp 1.072.298.325.096 (2006) menjadi Rp.1.209.916.089.651 (2007).

4.2.3.1.3 Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Selesaiannya renovasi gedung kantor Dinas Pariwisata;
- Tersedianya perencanaan pembangunan ruang serba guna Graha Wisata Ragunan;
- Diterbitkannya sertifikat profesi Pramuwisata Muda/Madya sebanyak 32 orang, Waiter/Waitress sebanyak 46 orang, Receptionist sebanyak 32 orang, Bar tender sebanyak 48 orang, Head Wisata sebanyak 38 orang, Juru Masak sebanyak 44 orang, dan Room Boy sebanyak 36 orang.

4.2.3.2 Fungsi Industri dan Perdagangan

Fungsi Industri dan Perdagangan diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu menyerap lapangan kerja, teknologi ramah lingkungan, meningkatkan nilai tambah industri serta berorientasi ekspor. Sementara perdagangan di DKI Jakarta diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan penekanan pada kepuasan pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan, Penataan dan Pengembangan Produk

Industri dan Perdagangan, Penataan Jaringan distribusi Produk Industri dan Perdagangan, Pengembangan Ekspor. Fungsi Industri dan Perdagangan dilaksanakan untuk membiayai 4 (empat) program, sebagai berikut :

4.2.3.2.1 Program Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat oleh perusahaan industri dan perdagangan, serta telah mendapat rekomendasi pada tahun 2007 sebanyak 26 dokumen;
- Peningkatan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- Peningkatan peran industri kecil dan dagang kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat;
- Memanfaatkan keunggulan kooperatif dan penciptaan keunggulannya dalam menghadapi persaingan global;
- Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian;
- Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi di era globalisasi;
- Pengembangan SDM sektor industri dan perdagangan secara intensif melalui transformasi teknologi, dan yang terpenting terjaminnya mutu produk melalui standarisasi;

- Penguatan dan pengembangan sumber daya informasi dalam mendorong pembangunan sektor industri dan perdagangan;
- Terlaksananya persiapan sertifikasi ISO 9001-2000 untuk perusahaan ILMEA sebanyak 4 perusahaan,
- Pendampingan penyusunan dokumen mutu untuk penerapan ISO 9001-2000 sebanyak 4 perusahaan,
- Tersedianya prototype dan desain IPAL bengkel dan percetakan
- Diterapkannya Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada industri makanan dan minuman.

4.2.3.2.2 Program Penataan dan Pengembangan Produksi Industri dan Perdagangan

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meraih juara nasional yang dilaksanakan di Padang Sumatera Barat;
- Pengembangan SDM sektor industri dan perdagangan secara intensif melalui transformasi teknologi, dan yang terpenting terjaminnya mutu produk melalui standarisasi.
- Ditetapkannya bengkel-bengkel pelaksana pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor di 5 wilayah DKI Jakarta.
- Tersusunnya pedoman pengembangan industri non polusi, hemat air dan berteknologi.

- Diterapkannya Gugus Kendali Mutu pada 25 perusahaan ILMEA.
- Terlatihnya 10 perusahaan dalam sertifikasi bengkel kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2.
- Terlatihnya 50 orang pegawai industri Garment dalam desain pakaian jadi.

4.2.3.2.3 Program Penataan Jaringan Distribusi Industri dan Perdagangan

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Kegiatan pasar lelang agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan 85 transaksi untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat DKI Jakarta;
- BPSK Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berhasil menangani 68 sengketa di bidang jasa dan perdagangan, peningkatan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- Peningkatan peran industri kecil dan dagang kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat;
- Memanfaatkan keunggulan kooperatif dan penciptaan keunggulannya dalam menghadapi persaingan global;
- Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian.
- Terselenggaranya penerapan cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) industri kosmetik sebanyak 40 perusahaan,

- Terlaksananya pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi industri makanan dan minuman sebanyak 75 perusahaan,
- Peningkatan pasar produk industri dan jaringan distribusinya dengan terlaksananya pengembangan kerjasama supply bahan baku, barang jadi (pemasaran) lintas daerah 4 provinsi sebanyak 4 kali,
- Terlaksananya pengembangan kemitraan antara Asosiasi/Kadin sektor Indag.

4.2.3.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Pencapaian realisasi ekspor sampai dengan bulan September 2007 dengan volume sebesar 10.109.445 ton atau nilai ekspor tahun 2007 sebesar US\$ 11,96 milyar.
- Peningkatan Realisasi total ekspor melalui DKI Jakarta senilai 29.504.366.400 U\$ (2006) menjadi 17.227.285 U\$ (2007)
- Terdaftarkannya 50 merek dagang produksi kerajinan
- Terselenggaranya Upaya Promosi meliputi Temu Usaha industri furniture ekspor, pameran industri makanan dan minuman, pameran produksi dalam negeri, pameran Gift Item & Toys Fair Hongkong, pameran Naning di Shanghai China, publikasi industri dan perdagangan melalui media elektronik

4.2.3.3 Fungsi Pengembangan Usaha Daerah

Fungsi Pengembangan Usaha Daerah diarahkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha daerah sehingga mampu berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi sebagai sumber penerimaan daerah.

Untuk mencapai kebijakan dimaksud, maka diperlukan strategi mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi usaha daerah dalam rangka memperbaiki kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha daerah, sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi serta meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan iklim investasi yang kondusif, sehingga swasta mampu berkembang dalam era pasar bebas, mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, melalui pelaksanaan 3 program.

Program-program yang telah dilaksanakan pada Fungsi Pengembangan Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

4.2.3.3.1 Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT, Patungan)

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari BUMD yaitu sebesar Rp.137.085271.434,- pada tahun 2006 menjadi Rp.142.294.252265 pada tahun 2007 atau naik 3.80%.
- Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi Pengurus BUMD sebanyak 100 orang, melalui Lokakarya Good Corporate Government (GCG)

dan Lokakarya Corporate Social Responsibility (CSR) serta Pembinaan Kepengurusan BUMD.

- Terbangun dan beroperasinya Sistem Informasi Pendayagunaan Asset BUMD, sehingga sangat membantu dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta tersedianya konsep Keputusan Provinsi DKI Jakarta, sebagai usulan penyempurnaan atas ketentuan yang telah ada sebelumnya.
- Tersedianya data dan informasi BUMD secara lengkap terhimpun dalam buku Direktori BUMD.

4.2.3.3.2 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Dengan adanya peningkatan fasilitas fungsi pelayanan penanaman modal maka pemberian persetujuan satu berkas dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari (2006) untuk bidang jasa menjadi 3 (2007)
- Tersedianya fasilitas penanaman modal berupa Pelayanan Satu Atap (one gate service).
- Terdidiknya SDM BPM dan PKUD sebanyak 53 orang guna menunjang peningkatan pelayanan penanaman modal.
- Tersedianya Web Site BPM dan PKUD sebagai sarana informasi untuk pelayanan penanaman modal.
- Telah dilakukan 22 promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.

- Telah dilakukan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 134 perusahaan PMA/PMDN dan yang memenuhi aturan 128 PMA/PMDN sedangkan yang tidak memenuhi aturan 6 PMA/PMDN.
- Terlaksananya forum investasi dalam rangka informasi investasi dan memulihkan iklim investasi di DKI Jakarta

4.2.3.3.3 Program Pemberdayaan Aset Daerah

Hasil pencapaian program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terbangunnya SIM Asset komersial daerah, untuk memudahkan bagi para investor mengetahui asset yang dapat dikerjasamakan. serta meningkatnya jumlah asset yang dikerjasamakan dari 6 asset (2006) menjadi 10 asset (2007).
- Meningkatnya jumlah kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pihak ketiga dari Rp.2.489.050.000,- (2006) menjadi Rp.1.847.714.229 (2007).

4.2.3.4 Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi perekonomian perkotaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan usaha skala mikro yang sehat dan dinamis berlandaskan sistem ekonomi partisipatif dalam rangka mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ekonomi serta menata usaha kaki lima.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha di bidang koperasi adalah dengan cara memperluas dan mengembangkan usaha koperasi, memperluas kesempatan berusaha bagi koperasi dan memperkuat kelembagaan koperasi agar menjadi koperasi sebagai gerakan masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan pada fungsi usaha kecil, menengah dan koperasi sebanyak 4 program sebagai berikut:

4.2.3.4.1 Program Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro

Hasil pencapaian program ini tahun 2007, adalah antara lain :

- Terpasangnya interior, sarana dan prasarana serta terpasangnya mekanik elektrikel di Gedung Produksi dan Promosi One Village One Produk, Pondok Ragon Jakarta Timur.
- Terkelolanya sarana dan prasarana di 16 lokasi binaan
- Tertata dan tertibnya 700 PKL yang menempati tempat pada lokasi yang ditetapkan
- Terbangunnya pujasera di Pulau Untung Jawa.

4.2.3.4.2 Program Pemberdayaan UKM & Koperasi

Hasil pencapaian program ini tahun 2007 adalah, antara lain:

- Tersedianya Draft Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta
- Terbangunnya sistem data retribusi UMKM,
- Sosialisasi NPAK dalam pelayanan pembuatan akta badan hukum koperasi kepada 73 Notaris,

- Terbinanya 730 pedagang dan pengelola pasar mikro,
- Terlaksananya penilaian 100 UKM berprestasi,
- Terlaksananya kerjasama UKM antar 6 Provinsi,
- Terlaksananya pengembangan informasi dan penyelenggaraan festival di Gedung Jakarta UKM (SME's Co) Center,
- Tersebaranya informasi UKM di DKI Jakarta melalui peluncuran Newsletter Online melalui internet,
- Terwujudnya Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pembinaan pada Lokasi Binaan,
- Penilaian Klasifikasi kepada 100 Koperasi Tingkat Provinsi,
- Terlaksananya bimbingan terhadap 50 anggota Koperasi Angkutan, 100 anggota Koperasi Perikanan/Pertanian, 50 anggota Peternakan Sapi Perah dan 100 anggota KSU/Koppas,
- Partisipasi Pameran dan Promosi KUKM 11 event,
- Terselenggaranya gelar pasar rakyat 2 kali,
- Terpublikasikannya informasi mengenai Jakarta UKM Center melalui media TV, Radio dan Media cetak,
- Terselenggaranya event Jakarta Smesco's dengan peserta 65 UKM dan event Pekan Raya Koperasi dengan peserta 73 peserta di Gedung UKM Center,
- Terbentuknya usaha baru sebagai tindak lanjut kegiatan Penciptaan Model Pertumbuhan Usaha Baru bagi sarjana pencari kerja.

4.2.3.4.3 Program Pengembangan Kewirausahaan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya Diklat perkoperasian Tingkat Dasar dan Lanjutan terhadap 125 Pengurus/Pengawas koperasi,
- Terlaksananya kajian Analisis Kebutuhan Pelatihan Koperasi,
- Terlaksananya Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan,
- Terlaksananya Studi Banding Manajemen Diklat Usaha Kecil dan Menengah ke Hongkong,
- Terlaksananya Pembuatan Modul Diklat Penyuluhan dan Konsultasi Koperasi dan UKM,
- Terlaksananya Diklat Ekspor-Impor terhadap 50 UKM, Diklat Keterampilan Manajemen Usaha Kecil bagi 42 orang Kasi Kecamatan KUKM, Diklat Perpajakan bagi 50 orang Pengelola Koperasi, dan Diklat Kewirausahaan bagi 75 orang UKM Handicraft dan UKM Garmen.
- Terlaksananya pemahaman tentang cara penanggulangan kebersihan dan keamanan bagi pedagang di Lokasi Binaan.
- Peningkatan kemampuan teknis pembuatan souvenir produk kayu bagi pengrajin kayu,
- Terselenggaranya penataan barang di Lokasi Binaan Bintaro, Lokasi Binaan Muria Dalam dan Lokasi Binaan Makasar.

4.2.3.4.4 Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Terfasilitasinya program pembiayaan dan bisnis plan kredit UKM kepada 75 KJKS/UJKS dan KUKM Pola Syariah dari Perbankan Syariah dan bukan Bank Konvensional,
- Tersusunnya draft Pergub Provinsi DKI Jakarta tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT Jakarta SME's Co Center dan Lokbin,
- Tersosialisasinya kewajiban UMKM membayar Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi kepada 700 UMKM.
- Terpilihnya KSP/USP yang sehat.

4.2.3.5 Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok usaha peternakan, perikanan dan meningkatkan sumber daya hasil laut dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang ditempuh pada fungsi ini antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil ternak, mengawasi peredaran daging, BAH (Bahan Asal Hewan) dan HBAH (Hasil Bahan Asal Hewan) sehingga ketersediaan hasil ternak selalu terpenuhi, tercukupi dan dapat dikonsumsi secara aman dengan harga terjangkau. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.3.5.1 Program Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Tersedianya sarana pemasaran , produksi hasil perikanan yang memadai (Pasar Grosir & Parkir di Muara Angke 1.626 m2, Sirkulasi Air BBI Ciganjur , Hatchery ikan di Kep.Seribu),
- Meningkatnya kebutuhan hasil ternak dan ikan (2006 – 2007) yaitu : Daging 223.955.000 kg, Telur 40.805.000 kg, Susu 242.994.000 liter, Ikan 220.065.600 kg,
- Meningkatnya pelayanan melalui Posko AI disetiap 5 wilayah kota madya, dalam rangka pelayanan cepat terjadinya kasus-kasus Avian Influenza (AI),
- Meningkatnya pengendalian penyakit Rabies , di 5 wilayah kotamadya melalui koordinasi, pengawasan, dan mempertahankan DKI bebas rabies yaitu Vaksinasi 6.825 ekor, Penangkapan HPR 448 ekor dan Observasi 10 ekor,
- Terbangunnya RPH Babi Kapuk 1 unit, dalam upaya meningkatnya kualitas lingkungan dan mutu serta jaminan keamanan pangan hasil ternak,
- Meningkatnya informasi hasil pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan melalui (Pameran ,Promosi Jak Aqua Zoo dan festival bahari)
- Terbina dan terkendalnya penyakit reproduksi kambing,
- Terlaksananya sertifikasi kesehatan unggas 5 wilayah,
- Terkendalnya penyebaran penyakit AI pada unggas dari 5 wilayah kotamadya menjadi 3 wilayah kotamadya sehingga masyarakat merasa

nyaman terhadap penularan penyakit Avian Influenza (AI) dan aman mengkonsumsi produk unggas

4.2.3.5.2 Program Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan pada hari besar keagamaan di 5 wilayah DKI Jakarta yaitu : sapi 3.759 ekor, kerbau 97 ekor, kambing 23.325 ekor dan domba 1.500 ekor hasilnya telah direkomendasikan bahwa hewan dimaksud aman untuk dikonsumsi karena terhindar dari penyakit zoonosis,
- Terkendalnya pengawasan lalu lintas peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) yang dilaksanakan di sentra pemasaran (pasar-pasar tradisional, penampungan, dan pemotongan hewan) sehingga terjadi penurunan pelanggaran yang pada tahun 2006 sebanyak 339 menjadi 326 pelanggaran tahun 2007,
- Terbitnya 50 Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan kepada unit pengolahan ikan dan 10 Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) tradisional
- Terkendalnya pemakaian bahan kimia terlarang (formalin, zat warna dan lain-lain berbahaya bagi kesehatan) terhadap penanganan/pengolahan ikan di 5 tempat pendaratan ikan, 20 swalayan, 10 pasar tradisional,

- Meningkatnya ekspor ikan konsumsi tahun 2007 sebesar 2,8 % jika dibandingkan tahun 2006, yaitu : Volume 28.139.201 kg., Nilai US\$.211.721.911,00 dan Retribusi Rp.1.472.268.680,00

4.2.3.5.3 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Terwujudnya koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan antara Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
- Tingkat penurunan kegiatan illegal fishing 60%, dan telah di tertibkan/pembinaan kepada 30 pemilik kapal ikan yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak ramah lingkungan.
- Meningkatnya tertib administrasi perizinan kapal ikan (SLO, Surat Keterangan Asal) di tempat pendaratan ikan,
- Sertifikasi ikan hias terhadap 31 nelayan kapal ikan hias, 2 eksportir dan 2 pengumpul ikan hias.
- Meningkatnya populasi jenis-jenis ikan pada 890 titik fish shelter,
- Meningkatnya luasan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat sebesar 66,1 ha, yang berlokasi di 7 pulau/gosong perairan Kepulauan Seribu.

- Tersedianya 140 buah “fish shelter” di Kepulauan Seribu yaitu di 2 lokasi : Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Kelapa.

4.2.3.6 Fungsi Pertanian Dan Kehutanan

Fungsi Pertanian dan Kehutanan diarahkan untuk menciptakan pola pertanian perkotaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi tinggi, Menciptakan ketersediaan pangan dan gizi yang cukup dengan harga terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan melalui penghijauan, konservasi hutan lindung dan hutan kota serta meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.3.6.1 Program Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Tertatanya 1 lokasi budidaya tanaman hias/anggrek di Provinsi DKI Jakarta,
- Tersedianya pengembangan tanaman toga di kebun-kebun bibit dinas pertanian dan kehutanan Provinsi DKI Jakarta,
- Tersedianya 2 lokasi sarana dan penerapan teknologi hidroponik dan pematangan lahan di Agrowisata Cilangkap 582 m³, dan Balai Benih Induk (BBI) Sukapura 804,10 m³
- Terbangunnya kantor mushola, pos jaga green house, mekanikal/elektronik,

- Tersedianya database penguatan pangkalan data OPT di Provinsi DKI Jakarta,
- Terbangunnya sarana Taman Anggrek Ragunan, jalan, saluran, pagar dan pintu air.
- Terlaksananya rehab gedung dan tersedianya 4.000 kg benih,
- Terbangunnya 1 paket sarana penunjang pendidikan dan rekreasi Kebun Agrowisata Cilangkap, Out Bond 1 unit, areal parkir (pemasangan 36 buah bingkai kastin pohon), perbaikan dermaga pemancingan 1 unit (lantai pemancingan 72 m² dan atap 72 m²), jalan setapak 215 m, perkerasan rabat beton 596 m, jalan keliling areal danau 630 m, pemasangan rolling besi 15 m, areal fitness 7 unit, pengerasan lantai plaza penerima 2 unit, pergola 2 buah,
- Tertanamnya 1.050 pohon steger bambu sebanyak 2.300 batang dengan panjang 1,5 meter
- Tersedianya laporan pengawasan bulanan sebanyak 30 buku,
- Tersosialisasinya di 3 Provinsi dan Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang mutu dan keamanan pangan/peredaran hasil pertanian.

4.2.3.6.2 Program Pengembangan Hutan

Hasil yang dicapai pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya pengurugan lahan 11.479,68 m³, deep well/sumur artesis 120 m, pengeboran 120 m,
- Tertanamnya tanaman produktif sebanyak 11.700 pohon di Provinsi DKI Jakarta, pemeliharannya tanaman di Kebun Bibit,

- Terlaksananya pemeliharaan tanaman di Kebun Bibit 3.700 pohon,
- Pemeliharaan tanaman di masyarakat 13.580 pohon,
- Penanaman tanaman (penyulaman) sebanyak 1.000 pohon,
- Terlaksananya 1 paket hutan kota banjir kanal,
- Terlaksananya 1 paket rehabilitasi mangrove,
- Penanaman mangrove jenis bakau-bakau 1.003 pohon, pekerjaan guludan posisi utara timur ukuran 4.50 x 9.00 m²,
- Tertanamnya 1 paket mangrove jenis bakau-bakau 555 pohon, pekerjaan guludan ukuran 4.50x 9.00 m², dalam 350m, 65 kotak, pemasangan cerucuk bambu 13.500 batang, pembuatan jalan (antar guludan) 21 m², perbaikan jalan lingkungan 55 m², obat-obatan anti hama,
- terselesainya 148 m pembangunan Jalan Kontrol Hutan Lindung Angke Kapuk,
- terselesainya 200 m Pembangunan Jalan Kontrol kawasan mangrove Tol Sedyatmo, terlaksananya pengawasan 1 bulan 1 buku,
- terbangunnya 1 lokasi Pagar Pengaman Hutan Lindung Angke Kapuk, tersusunnya laporan pengawasan 5 set.
- Terlaksananya 1 lokasi pembangunan kebun bibit cengkareng terdiri dari : pekerjaan springkel, pekerjaan deep weel lebih kurang 120 s/d 150 m² unit, pekerjaan pintu gerbang, pekerjaan penerangan kebun dan pengawasan oleh konsultan secara optimal,

- Terlaksananya 5742 m² pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Jakarta Selatan(Jagakarsa),
- Terlaksananya 1 paket sarana dan prasarana hutan kota UI terdiri dari : pekerjaan signage, pembangunan pagar, 1.305m, pembuatan taman /lanskap,
- Terbangunnya Break Water sepanjang 296 m, tinggi 1,75 m TSM Pulau Rambut, tersedianya laporan pengawasan bulanan sebanyak 15 buku dan laporan akhir 10 buku,
- Terbangunnya 2 lokasi (Hutan Lindung Angke Kapuk dan Taman Suaka Margasatwa Pulau Rambut) : Jaring sampah di hutan lindung Angke kapuk seluas 2.240 m², Jaring di TSM Pulau Rambut seluas 82 m, terkumpulnya sampah sebanyak 150m³.

4.2.4 Bidang Pendidikan dan Kesehatan

4.2.4.1 Fungsi Pendidikan

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melaksanakan 5 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.4.1.1 Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Penyelenggaraan 2.251 SDN dan 290 SMPN; pembinaan 775 SDS dan 650 SMPS,
- Berkurangnya penerimaan murid baru SD dari 158.057 (2006) menjadi 157.615 (2007)
- Bertambahnya lulusan SD dari 126.216 (2006) menjadi 128.608 (2007)
- Bertambahnya jumlah lulusan SD/MI dari 96,93% (2006), menjadi 100% (2007)
- APK SD/MI mencapai 120,40%, dan APM SD/MI mencapai 98,84% (2007)
- Penurunan jumlah murid SD/MI yang putus sekolah 867 (2006) menjadi 535 (2007)
- Penyerapan biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI Negeri sebesar 97,65% (2006), menjadi 99% (2007)
- Bertambahnya murid SMP dari 346.868 (2006), menjadi 351.127 (2007)
- Berkurangnya lulusan SMP dari 109.688 (2006), menjadi 109.343 (2007)
- Bertambah baiknya nilai UAN SMP dari 7,23 (2006) menjadi 7,45 (2007)
- Bertambahnya jumlah lulusan SMP/MTs dari 99,84% (2006), menjadi 99,99% (2007)
- APK SMP/MTs mencapai 105,33% (2006) menjadi 112% (2007) dan APM SMP/MTs mencapai 92% (2006) menjadi 93,47% (2007)
- Penurunan jumlah murid SMP/MTs yang putus sekolah 2.172 murid (2006), menjadi 1.875 murid (2007)

- Penyerapan biaya operasional sekolah bagi siswa SMP/MTs Negeri sebesar 97,40% (2006), menjadi 99% (2007)
- Program Wajib Belajar 9 Tahun Provinsi DKI Jakarta telah Tuntas Paripurna.
- Meningkatnya jumlah dan kualifikasi Guru SDN/SMPN dari 1.560 Guru D3 ke Strata-1 (2006), menjadi 1.842 Guru (2007),
- Terlaksananya uji sertifikasi Kompetensi Guru SDN dan SMPN tingkat provinsi dan nasional,
- Terlaksananya rintisan SD/SMPN bertaraf internasional,
- Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru SMP on line,
- Tersedianya layanan informasi Pendidikan Dasar melalui internet,

4.2.4.1.2 Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Angka Buta Aksara mencapai 0,98 %
- Berkurangnya peserta pendidikan Keaksaraan Fungsional yang putus sekolah dari 95.873 (2006), menjadi 88.073 (2007)
- Meningkatnya jumlah peserta pendidikan luar sekolah Kejar Paket A dari 710 orang (2006), menjadi 2.280 orang (2007)
- Meningkatnya jumlah peserta pendidikan luar sekolah Kejar Kejar Paket B dari 5.489 orang (2006), menjadi 21.480 orang (2007)

- Meningkatnya jumlah peserta pendidikan luar sekolah Kejar Paket C dari 17.933 orang (2006), menjadi 18.738 orang (2007)
- Meningkatnya jumlah Tutor bersertifikat dari 1.008 orang (2006), menjadi 1.168 orang (2007)
- Meningkatnya kapasitas layanan PKBM dari 202 (2006), menjadi 244 (2007)
- Meningkatnya jumlah Anak Jalanan yang mengikuti pendidikan kesetaraan SLTP (Paket B) dari 200 orang (2006), menjadi 200 orang (2007)
- Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha mitra Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) dari 50 Kelompok Usaha (2006), menjadi 153 Kelompok usaha (2007)

4.2.4.1.3 Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Beroperasinya 116 SMAN dan 61 SMKN;
- Meningkatnya inisiasi wajib belajar 12 tahun bagi siswa SMA/SMK dari 1.612 siswa (2006), menjadi 2568 siswa (2007)
- Meningkatnya APK SMA/SMK dari 81,53% (2006) menjadi 81,65% (2007), dan APM SMA/SMK dari 57,69% (2006), menjadi 57,76% (2007)
- Meningkatnya jumlah guru SMA/SMK yang lulusan S1 dari 26.073 guru (2006), menjadi 27.544 guru (2007)
- Bertambahnya jumlah Guru SMA/SMK lulus sertifikasi sebanyak 2.836 guru.

- Berkurangnya Alih Fungsi Guru SMA/SMK dari 600 orang (2006), menjadi 100 orang (2007)
- Pengembangan rintisan “Science Center” di 14 SMA/SMK,
- Penyelenggaraan program Akselerasi di 7 SMA unggulan,
- Pemberdayaan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada 87 Mata Pelajaran,
- Terselenggaranya lomba Kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Nasional XIV Tahun 2007,
- Menurunnya jumlah siswa SMA/SMK dari 375.257 (2006), menjadi 373.836 siswa (2007)
- Menurunnya lulusan SMA/SMK dari 117.800 (2006), menjadi 116.834 siswa (2007)
- Nilai UAN SMA meningkat dari 7,58 (2006), menjadi 7,70 (2007)
- Nilai UAN SMK meningkat dari 6,96 (2006), menjadi 7,17 (2007)
- Meningkatnya nilai UN (SMA/SMK) rata-rata menjadi 7,44 melalui program Penerimaan Siswa Baru (PSB) sistem online pada 176 sekolah,
- Bertambahnya kapasitas SMAN/SMKN yakni 95 RKB, 7 unit sekolah, dan 15 ruang Laboratorium,
- Diperolehnya juara II olimpiade fisika tingkat nasional dan juara II Lomba Keterampilan Siswa (LKS) tingkat nasional.

4.2.4.1.4 Program Pengendalian dan Informasi Perguruan Tinggi

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain pembekalan mahasiswa tentang

Teknopreneurship dan *Agripreneurship* pada 500 mahasiswa perguruan tinggi swasta.

4.2.4.1.5 Program Pengembangan Perpustakaan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 65.353 orang (2006), menjadi 609.884 orang (2007).
- Meningkatnya koleksi/bahan pustaka dari 13.881 judul (2006), menjadi 155.380 judul (2007)
- Berfungsinya 130 Perpustakaan Pemukiman
- Meningkatnya jenis Layanan Perpustakaan yaitu Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Perpustakaan Permukiman, apresiasi Hanjaba, bedah buku, pameran, *story-telling*, *talkshow*, dan Abnon pecinta Buku.

4.2.4.2 Fungsi Kesehatan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif pada masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan; meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui dukungan sarana, prasarana dan SDM bidang kesehatan yang lebih baik; meningkatkan kecepatan dan kesiapan dalam memberikan penanganan keadaan darurat, dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada serta SDM bidang kesehatan, tanpa melihat dari golongan mana masyarakat yang membutuhkan pelayanan; dan perbaikan

kebijakan dan manajemen kesehatan dengan melaksanakan 4 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.4.2.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya imunisasi BCG dari 212.622 (2006) menjadi 218.316 (2007), DPT dari 227.239 (2006) menjadi 716.804 (2007), Polio dari 203.849 (2006) menjadi 220.582 (2007), Hepatitis dari 230.390 (2006) menjadi 168.091 (2007) dan Campak dari 196.569 (2006) menjadi 225.592 (2007);
- Cakupan BIAS dari 94% (2006) pada tahun 2007 tetap 94 %.
- Pasien DBD yang meninggal meningkat dari 51 orang (2006) menjadi 86 orang (2007), karena terjadi banjir sehingga mengurangi daya tahan tubuh, dan terjadi KLB, sedangkan pasien Flu Burung dari 10 orang (2006) menjadi 9 orang (2007).
- Berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk dan bawah garis merah menjadi 1.792 (2006), menjadi 864 anak termasuk gizi buruk berjumlah 201 anak (2007)
- Meningkatnya penemuan pasien TBC (BTA+) dari 81% (2006) menjadi 85,6% (2007), dan Angka Kesembuhan TBC mencapai 85% (2006) menjadi 87,4% (2007)

- Seluruh Darah PMI telah dilakukan screening HIV/AIDS,
- 30 Puskesmas telah mampu melayani kasus narkoba.
- “Respon Time” Rumah Sakit terhadap penyakit yang berpotensi KLB 24 jam,
- Angka bebas jentik nyamuk aedes agypti 97% (2006) menurun menjadi 85% (2007) karena kondisi cuaca dan musim penghujan.
- 100% RW mempunyai jumantik tingkat RW, 50% RW mempunyai Posko PSN DBD aktif, dan 50% sekolah mempunyai PSN DBD aktif.

4.2.4.2.2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Meningkatnya jumlah pasien rawat inap rumah sakit dari 656.953 pasien (2006), menjadi 689.713 (2007)
- Jumlah pasien yang diangkut ambulans 15 unit yang layak operasional sebanyak 14.785 pasien.
- 73% Puskesmas Kecamatan telah melaksanakan Quality Assurance (QA) dan memperoleh sertifikat ISO 9001-2000,
- 87% pelanggan external Puskesmas menyatakan puas terhadap layanan Puskesmas,
- 100% Kelompok Lansia dapat dilayani Puskesmas,
- 46% Rumah Sakit telah melaksanakan Quality Assurance (QA) dengan standar ISO 9001-2000 atau standar Akreditasi Depkes,

4.2.4.2.3 Program Penanganan Gawat Darurat dan bencana

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Pasien Gakin dan SKTM yang memperoleh pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas sebanyak 420.033 orang, Rawat Inap di Rumah Sakit sebanyak 40.258 orang, dan Rawat Jalan di Rumah Sakit sebanyak 232.152 orang;
- Pasien Gakin dan SKTM yang memperoleh pelayanan DBD sebanyak 38.435 orang, gizi buruk 201 anak dengan 586 kasus, lumpuh layu sebanyak 5 orang, flu burung sebanyak 97 orang, yang dirawat di RS Sulianti saroso dan RS Persahabatan dengan suspek flu burung positif. GED sebanyak 3.203 orang, KDRT sebanyak 745 orang dan kebakaran/kebanjiran sebanyak 21.692 orang,
- Disempurnakannya pedoman pelayanan kesehatan pada keadaan Gawat Darurat dan Bencana.
- Dalam program JPK Gakin selain pasien miskin masuk juga pasien korban bencana dan KLB yang terdiri dari dari pasien-pasien : JKP Gakin, Gizi buruk, GED, KDRT, Korban Banjir, Kebakaran, Lumpuh layu, flu burung.

4.2.4.2.4 Program Perbaikan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersusunnya Draft Raperda tentang Sistem kesehatan,
- Tersedianya “provincial health account”,
- Tersedianya dokumen kebijakan pembiayaan kesehatan,

4.2.5 Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.2.5.1 Fungsi Kependudukan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil dengan melaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung fungsi ini adalah sebagai berikut :

4.2.5.1.1 Program Pengendalian Kependudukan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Dapat dipertahankannya angka kelahiran total (Total Fertility Ratio =TFR) pada kisaran angka 2 (menurut hasil sementara survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2007, TFR Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,24);
- Meningkatnya usia perkawinan pertama dari 21,4 tahun (2006) menjadi 23 tahun (2007);
- Meningkatnya jumlah peserta KB mandiri dari 550.611 akseptor (2006), menjadi 560.942 akseptor (2007);

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi dari 89,50% (2006) menjadi 93,00% (2007);
- Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlayani program KB dari 56,86% (2006) menjadi 58,24% (2007).

4.2.5.1.2 Program pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Pencatatan perkawinan luar balai sebanyak 5.558 pasangan pengantin
- Terselenggaranya Workshop Catatan Sipil & Statistik sebanyak 100 peserta
- Terlaksananya Sosialisasi Urbanisasi dengan penayangan dari 5 stasiun tv swasta (Global TV, TPI, Lativi, Metrotv dan Trans 7)
- Terlaksananya updating data penduduk hasil pemutakhiran data P4B untuk kepentingan Pilkada Provinsi DKI Jakarta.

4.2.5.2 Fungsi Ketenagakerjaan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta agar terampil dan mahir, mampu menyelesaikan tugas-tugas ketenagakerjaan secara handal dan profesional sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, pembangunan fungsi ketenagakerjaan ini juga dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.5.2.1 Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terciptanya kelompok wira usaha baru (WUB) sebanyak 5 Kelompok.
- Terkirimnya transmigran asal DKI sebanyak 45 KK dengan tujuan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Bungo.
- Meningkatnya jumlah Fasilitas pemberian rekomendasi pembuatan Paspor TKI dari 40.363 orang (2006) menjadi 48.580 orang (2007).
- Menurunnya jumlah Pengangguran dari 14,31% (2006) menjadi 13,27% (2007)
- Terfasilitasinya penempatan tenaga kerja penyandang cacat sebanyak 75 orang
- Terlaksananya pembinaan terhadap 60 lembaga penyalur tenaga kerja

4.2.5.2.2 Program Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pemeriksaan norma kerja ketenagakerjaan, pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna bahan kimia, pemeriksaan khusus terhadap tempat-tempat penampungan Calon TKI serta pemeriksaan dan pengujian tabung bahan bakar gas (BBG)

- Terfasilitasinya pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 1145 PP dan 116 PKB .
- Terlaksananya pembinaan ketenagakerjaan terhadap 80 organisasi dari unsur organisasi pekerja / pengusaha.
- terselesaikannya 508 kasus perselisihan hubungan industrial
- Ditetapkannya upah minimum provinsi (UMP) tahun 2007
- Meningkatnya jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja dari 19.630 perusahaan (2.427.007 pekerja) tahun 2006 menjadi 23.969 perusahaan (5.040.124 pekerja) tahun 2007.
- Meningkatnya jumlah peserta JKDK dari 4.555 perusahaan (452.505 pekerja) menjadi 6.116 perusahaan (551.910 pekerja) tahun 2007
- Menurunnya kasus pelanggaran ketenagakerjaan dari 627 kasus (2006) menjadi 469 kasus (2007).

4.2.5.2.3 Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peningkatan produktifitas kerja pada perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK) dan lembaga latihan swasta (LLS).
- Terlaksananya pemagangan sebanyak 104 orang ,terdiri dari pemagangan dalam negeri 20 orang dan luar negeri (Melalui sister city) sebanyak 9

orang serta pemagangan ke Jepang sebanyak 75 orang .

- Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja pada 7 BLK / BLKD sebanyak 2.860 orang, 1.667 (58,27%) diantaranya telah disalurkan untuk menempati kesempatan kerja yang tersedia.

4.2.6 Bidang Sosial dan Budaya

4.2.6.1 Fungsi Keagamaan

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan saling menghormati dengan menyempurnakan kualitas pelaksanaan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing serta meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.6.1.1 Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama,

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Berkurangnya konflik antar etnis, pemeluk agama, kampung/warga dari 31 kasus (2006) menjadi 25 kasus (2007).
- Berfungsinya Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKKUB).

4.2.6.1.2 Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya Orientasi kepemimpinan lembaga keagamaan;
- Meningkatnya ESQ bagi pengurus lembaga keagamaan;
- Tersedianya peta penyebaran tempat ibadah dan potensi TPA/TKA/TPQ/RA/MD/sekolah minggu;
- Terbinanya lembaga sosial keagamaan;
- Terselenggaranya sarasehan organisasi keagamaan;
- Pengadaan buku-buku keagamaan;
- pembinaan manasik haji bagi masyarakat dan jamaah haji;
- Penyampaian informasi haji daerah;
- Penyetoran BPIH;
- Pembinaan petugas haji daerah,
- Terbantunya lembaga sosial keagamaan.

4.2.6.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat, meningkatkan SDM dan fasilitas sarana prasarana kesejahteraan sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, dan memantapkan penanganan PMKS, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.6.2.1 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Berkurangnya jumlah penghuni panti sosial anak dari 4.543 orang (2006) menjadi 4321 orang (2007).
- Panti sosial remaja dapat melayani 660 orang.
- Bertambahnya jumlah penghuni panti sosial lanjut usia dari 1.209 orang (2006) menjadi 1250 orang (2007), panti sosial penyandang cacat dari 1.707 orang (2006) menjadi 1.912 (2007).
- Meningkatnya pelayanan non panti dari 5.119 orang (2006) menjadi 5200 orang (2007), layanan lanjut usia dari 4.398 orang (2006) menjadi 4412 orang (2007)
- Terlayannya korban bencana dan musibah lainnya sebanyak 55.120 orang;
- Menurunnya layanan korban tindak kekerasan dari 650 orang (2006) menjadi 335 orang (2007).

4.2.6.2.2 Program Peningkatan Peran Serta Sosial Masyarakat

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
- Meningkatnya jumlah dan keterampilan tenaga kesejahteraan sosial.

- Bertambahnya kader berperspektif gender yang terlatih;
- Bertambah kuatnya pemberdayaan pilar-pilar sosial;
- Bertambah kuatnya jejaring kerja antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam merespon masalah sosial;
- Bertambah eratnya kemitraan orsos, pokja kesuma dan BKKKS;
- Terwujudnya tali silaturahmi Gubernur dengan para perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya.

4.2.6.2.3 Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Berfungsinya sebanyak 94 TPU tahun 2006 dan sebanyak 109 TPU tahun 2007;
- Bertambahnya kapasitas pemakaman;
- Terlayaninya pelayanan kendaraan jenazah 24 jam;
- Tersedianya pengadaan kantong jenazah, ramuan jenazah, kain kafan, peti jenazah bagi jenazah terlantar/tunawan;
- Terselenggaranya pelayanan pemakaman tahun 2006 sebanyak 31.640 jenazah dan tahun 2007 sebanyak 30.738 Jenazah, jenazah terlantar tahun 2006 sebanyak 1.271 jenazah dan tahun 2007 sebanyak 2.210 jenazah, tumpangan sebanyak 3.622 jenazah dan tahun 2007 sebanyak 3.578, Pengabuan (kremasi)

- jenazah/kerangka tahun 2006 sebanyak 1.063 jenazah dan tahun 2007 sebanyak 1.049 jenazah;
- Terlayannya pengangkutan jenazah keluar Jakarta tahun 2006 sebanyak 416 jenazah keluar Jakarta, dan tahun 2007 sebanyak 242 jenazah;
 - Pelayanan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam tahun 2006 sebanyak 84.031 petak makam dan tahun 2007 sebanyak 84.007 petak makam;
 - Tersedianya petak makam siap pakai tahun 2006 sebanyak 7.631 petak makam dan tahun 2007 sebanyak 4.969 petak makam;
 - Terselenggaranya penyuluhan pemakaman melalui media cetak dan elektronik;
 - Terselenggaranya pelayanan angkutan dan perawatan jenazah terlantar dari TKP ke RSCM, dari RSCM dan Panti sosial ke TPU Tahun 2006 sebanyak 1.992 jenazah dan Tahun 2007 sebanyak 2.210 jenazah;
 - Terselenggaranya pelayanan angkutan jenazah dalam kota tahun 2006 sebanyak 458 jenazah dan tahun 2007 sebanyak 412 jenazah;
 - Terselenggaranya pengurusan izin angkut dalam negeri tahun 2006 sebanyak 6.928 izin dan tahun 2007 sebanyak 7.234 izin;
 - Terselenggaranya pengurusan izin angkut keluar negeri tahun 2006 sebanyak 92 izin dan tahun 2007 sebanyak 59 izin;
 - Terselenggaranya pengurusan izin menahan jenazah tahun 2006 sebanyak 5.676 izin dan tahun 2007 sebanyak 5.647 izin;

- Terselenggaranya Pandapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan pemakaman tahun 2006 sebesar Rp. 7.388.841.000,- (109,46 % dari target Rp. 6.750.000.000,-) dan tahun 2007 sebesar Rp. 7.897.797.000,- (105,3 % dari target Rp. 7.500.000.000,-).

4.2.6.3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kembangkan prakarsa serta partisipasi masyarakat sebagai sumber daya insani pembangunan dalam upaya pemerataan pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta terciptanya masyarakat Jakarta sebagai warga kota yang mandiri dan sejahtera. Melalui fungsi ini diharapkan masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya melalui pemanfaatan potensi yang ada padanya agar mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasinya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.6.3.1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penerapan Tehnologi Tepat Guna (TTG) serta mendapat Juara I (Satu) dalam kepesertaan Gelar Tehnologi Tepat Guna tingkat Nasional di Manado Sulawesi Utara;

- Terselenggaranya pemetaan keluarga miskin di 267 kelurahan;
- Disempurnakannya arah, strategi dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat (Gotromas) tingkat provinsi;
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan tingkat provinsi;
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Menurunnya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dari 675.716 jiwa pada tahun 2006 menjadi 405.700 jiwa pada tahun 2007.

4.2.6.3.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi pengolahan limbah rumah tangga, daur ulang sampah, pengelolaan air bersih berbasis komunitas di 6 wilayah;
- Penyempurnaan sistem informasi dan monitoring PPMK;
- Terlatihnya tenaga unit pengaduan masyarakat (dumas) sebanyak 267 orang;
- Terselenggaranya promosi dan pengembangan jaringan usaha KKMB di 6 wilayah kotamadya / kabupaten;

- Terselenggaranya fasilitasi pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat di 6 wilayah;
- Meningkatnya partisipasi / peran warga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan;

4.2.6.3.3 Program Pemberdayaan Perempuan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Meningkatnya kapasitas penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan;
- Terselenggaranya evaluasi upaya pencegahan KDRT tingkat Provinsi;
- Terselenggaranya sosialisasi PUG bagi guru agama dan aparat sebanyak 250 orang;
- Tersusunnya profil statistik dan indikator gender Provinsi DKI Jakarta;
- Terselenggaranya evaluasi program gerakan sayang ibu (GSI) di 44 kecamatan;
- Terselenggaranya temu konsultasi tim koordinasi program pemberdayaan perempuan (TKP3) Provinsi DKI Jakarta.

4.2.6.4 Fungsi Pelestarian Budaya Dan Permuseuman

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, dan melakukan pembinaan dan pengembangan museum dan peninggalan cagar budaya/sejarah yang dapat diharapkan berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.6.4.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terselenggaranya promosi budaya sebanyak 120 event untuk tingkat lokal, 15 event untuk tingkat nasional dan 5 event untuk tingkat internasional
- Revitalisasi kota tua berupa 4 konservasi fisik bangunan
- Berfungsinya *Guideline* Kota Tua

4.2.6.4.2 Program Pengembangan Museum dan Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya/Sejarah

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Rekatalogisasi koleksi pada Museum Senirupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil dan Museum Sejarah Jakarta
- Terselenggaranya konservasi bangunan Museum Tekstil
- Meningkatnya sarana pelayanan kepada masyarakat dengan berfungsinya teropong dan kereta antar jemput pengunjung di Monumen Nasional (Monas)
- Meningkatnya kunjungan museum sebesar 10,44%

4.2.6.4.3 Program Pengawasan Pemugaran

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Peningkatan pengawasan seni budaya dan pemugaran
- Pengawasan benda cagar budaya (BCB) kelas A, B dan C

4.2.6.5 Fungsi Olahraga dan Kepemudaan

Fungsi olah raga dan kepemudaan ditujukan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan dan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana pendewasaan untuk melindungi seluruh generasi muda dari bahaya destruktif. Disamping itu juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan pemasaran olah raga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga, pendidikan olah raga dan pembinaan pramuka. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.6.5.1 Program Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- terselesaikannya peningkatan mutu melalui rehabilitasi 8 prasarana kepemudaan
- tercapainya pembinaan terhadap 3.790 orang melalui pemberdayaan organisasi pemuda/pelajar
- tercapainya pembinaan terhadap 2.380 orang melalui aktivitas kepemudaan.

4.2.6.5.2 Program Peningkatan Prestasi Olahraga.

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Menjadi juara umum POMNAS X/2007 di Kalimantan Selatan.
- Menjadi *runner-up* pada POPNAS IX/2007 di Kalimantan Timur
- Peningkatan mutu prasarana olahraga melalui rehabilitasi 5 fasilitas olahraga dan pembangunan 1 asrama atlet baru

4.2.6.5.3 Program Pembinaan Olahraga Masyarakat

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Pemassalan bela diri bagi 750 orang
- Pemassalan olahraga squash bagi 180 orang
- Pemassalan olahraga bagi 5000 mahasiswa, pemuda, pelajar, karyawan dan masyarakat di DKI Jakarta.

4.2.7 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4.2.7.1 Fungsi Sumber Daya Alam

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan 2 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.7.1.1 Program Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersedianya informasi dan data geologi antara lain : data identifikasi dan pemetaan gempa DKI Jakarta, data pengukuran dan evaluasi penurunan tanah dan daya dukung tanah di Jakarta Utara, peta kondisi bawah tanah;
- Tersedianya kajian, informasi dan data pengelolaan migas dan kelistrikan antara lain: pra studi kelayakan pembangunan PLTG/PLTGU di pulau Damar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, evaluasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, kajian penggunaan energi alternatif di DKI Jakarta serta peta kebutuhan SPBU dan SPBG serta pola penyebarannya;
- Tersedia dan terdistribusinya BBM Solar untuk Genset PLTD Pulau Seribu;
- Tersedianya listrik di Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Payung dan Pulau Tidung melalui jaringan transmisi listrik kabel laut dari Teluk Naga.

4.2.7.1.2 Program Pengembangan Sumber Air Tanah

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Dipertahankannya ISO 9001:2000 terhadap pelayanan perijinan air bawah tanah dan bahan galian;
- Terbangunnya sumur dalam untuk rusun Marunda;

- Tersedianya base map pemanfaatan/ pengendalian air bawah tanah;
- Terbangunnya 1 sumur pantau di Kuningan;
- Tersedianya alat monitoring perubahan muka air tanah dengan sistem telemetri;
- Terbangunnya sumur resapan 112 titik sumur resapan.

4.2.7.2 Fungsi Lingkungan Hidup

Dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan 4 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.7.2.1 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Beroperasinya sarana apung dan tersedianya laboratorium Apung Pemantauan Laut;
- Terlaksananya perlindungan dan peningkatan daya manfaat Sungai Ciliwung;
- Terlaksananya pemeriksaan uji emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi sejumlah 15.918 kendaraan dengan rincian 61% (9.751 kendaraan) lulus dan 39% (6.167 kendaraan) tidak lulus;
- Terlaksananya sosialisasi Perda 2 tahun 2005 antara lain : dialog interaktif sebanyak 10 kali (radio,kampanye, kegiatan HBKB), terlaksananya pembuatan dan penayangan iklan layanan

masyarakat /PSA tentang KDM durasi 30 detik sebanyak 84 spot di satu stasiun TV dan 5 buah billboard;

- DitetapkanNya Pergub 141/2007 tentang Penerapan Kebijakan Pemanfaatan BBG bagi Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Dinas dan Pergub. baku mutu KUDR dan baku mutu emisi;
- Meningkatnya koordinasi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan di Jabodetabekjur dengan hasil : a) terlaksananya kerjasama pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Ciliwung terpadu; b) terlaksananya kerjasama pemulihan penanggulangan kerusakan situ; c) terpadunya konsepsi pengelolaan pesisir dan perairan Teluk Jakarta; d) Rencana pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS Ciliwung.

4.2.7.2.2 Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya penilaian dokumen AMDAL dan UKL/UPL sebanyak 272 dokumen ;
- Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen pengelolaan lingkungan sebanyak 332 dokumen (di Jakarta barat sebanyak 29 perusahaan, Jakarta Pusat : 59 perusahaan, Jakarta Selatan : 56 perusahaan,

Jakarta Timur : 8 perusahaan dan Jakarta Utara : 90 perusahaan);

- Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan sebanyak 14 kasus dengan hasil : 8 kasus tahap verifikasi, 2 kasus pelaksanaan kesepakatan, 4 kasus telah selesai penanganannya;
- Terlaksananya penegakkan hukum sebanyak 29 perusahaan dengan status : 8 perusahaan wajib melakukan perbaikan, 3 perusahaan penutupan, 16 kegiatan penghentian kegiatan, 2 kegiatan masuk dalam status pidana;
- Dipertahankannya Adipura pada 4 wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Selatan, Barat dan Timur serta didapatkannya Adipura untuk Kotamadya Jakarta Utara.

4.2.7.2.3 Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Peningkatan penghijauan sebanyak 206.449 pohon diantaranya pengadaan produktif, tanaman hias dan pengadaan bibit pohon pelindung di kebun bibit;
- Penataan jalur hijau tepian air seluas 1.723 m2.
- Pemeliharaan sarana/prasarana jalur hijau kota seluas 1.225.420 m2.
- Penataan taman kota seluas 41.500 m2;
- Penataan jalur hijau jalan seluas 48.401,29 m2;
- Penataan jalur hijau penyempurna seluas 12.604,33 m2;
- Penataan jalur pedestrian seluas 188,80 m2;

- Penataan taman bangunan umum seluas 3.000 m² dan pembangunan taman bangunan umum seluas 489,75 m²;
- Pemeliharaan sarana/prasarana taman kota seluas 1.442.220 m²;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan RTH melalui penyuluhan untuk SD, SLTP, SMU dan masyarakat umum serta pelatihan kader pertamanan sebanyak 380 orang.
- Terbangunnya Taman Bermain di Pulau Untung Jawa \pm 1000 meter (Kepulauan Seribu).

4.2.7.2.4 Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Peningkatan kualitas ornamen kota berupa pembangunan air mancur di 2 lokasi dan lampu taman di 227 lokasi;
- Peningkatan kualitas ornamen kota yaitu berupa air mancur di 24 lokasi, jam kota 64 buah, lampu taman 1.346 tiang, patung/monumen di 42 buah buah/lokasi dan instalasi penyiraman sebanyak 7.703 buah;
- Pembebasan Lahan RTH permukiman padat penduduk di wilayah Jakarta Timur.

Sebagian kegiatan yang tidak terlaksana pada program ini adalah :

- Pembebasan lahan RTH pada permukiman padat penduduk di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan,

- Kegiatan refungsi taman kota seperti refungsi SPBU jalur hijau di beberapa lokasi;
- Penggalangan kemitraan terhadap masyarakat.

4.2.7.3 Fungsi Kebersihan

Dimaksudkan untuk menciptakan kota yang bersih, bebas dari polusi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan 2 program. Adapun rincian hasil masing-masing program adalah sebagai berikut:

4.2.7.3.1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersedianya Tractor Head sebanyak 6 unit, Kontainer semi Trailer sebanyak 5 unit, prime mover 1 unit, shovel loader sebanyak 10 unit, Truck Compactor besar sebanyak 20 unit, Street washer sebanyak 5 unit, Truk typer kecil sebanyak 20 unit, kendaraan Arm Roll sebanyak 20 unit;
- Tersusunnya Amdal ITF (Duri Kosambi).
- Terbangunnya TPS Indoor sebanyak 20 unit.

4.2.7.3.2 Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Terlaksananya swastanisasi kebersihan di 28 kelurahan dan areal Monas;
- terlaksananya pemadatan sampah di SPA Sunter sebanyak 284.384,38 ton dan di SPA Cacing sebanyak 209.563,98 ton;

- Terlaksananya pengangkutan sampah dan pemusnahan sampah di TPA Bantar Gebang ± 6000 ton/hari;
- Terlaksananya penanggulangan sampah laut dan teluk Jakarta;
- Terlaksananya pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap kebersihan antara lain melalui penyuluhan di media TV, radio, Media Cetak dan sosialisasi kebersihan kepada produsen sampah plastik, pelajar, mahasiswa, anak gakin serta pelatihan Kader kebersihan dan Juru Penegak Kebersihan serta kegiatan lomba kebersihan dan kerja bakti (Silahturahmi Minggu Pagi) di lima wilayah.

4.2.8 Bidang Sarana dan Prasarana Kota

4.2.8.1 Fungsi Kelengkapan Kota

Dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum serta jaringan utilitas, pelayanan air bersih, dan pelayanan air limbah yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program sebagai berikut :

4.2.8.1.1 Program Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain:

- Tersusunnya masterplan Pembangunan Ducting System Sarana jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta;

- Tersusunnya Standar Penempatan dan Kelengkapan Utilitas (di bawah tanah, laut, dan udara).

4.2.8.1.2 Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Bertambahnya 4.303 titik lampu penerangan jalan di jalan arteri, kolektor, lokal, jembatan penyebrangan orang, flyover & underpass, penunjang transportasi, gedung pemerintahan, bersejarah, tempat ibadah dan sarana olahraga, bantaran kali, ruang terbuka hijau;
- Meningkatnya kualitas 462 titik lampu PJU pada jalan arteri, jalan kolektor, pedestrian dan persimpangan, serta di Kepulauan Seribu. Bertambahnya titik lampu koridor busway 9 dan 10, serta meningkatnya kualitas penerangan PJU pada jalur Busway koridor 1 s.d. 7. sebanyak 1.221 titik lampu.

4.2.8.1.3 Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Berfungsinya IPAL Kantor Dinas Teknis
- Berfungsinya IPAL KOPTI Semanan
- Meningkatnya kapasitas IPAL di pemerintahan dan dinas teknis,
- Berkurangnya pencemaran di Waduk Melati tahap II dan Waduk Grogol Tahap III.

4.2.8.1.4 Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya perbaikan dan penyuluhan di IPAB yang sudah terbangun di 5 wilayah kotamadya.

4.2.8.2 Fungsi Tata Air

Dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 2 program sebagai berikut.

4.2.8.2.1 Program Pengendalian Banjir

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terkendalinya genangan di beberapa titik rawan genangan dengan berfungsinya rumah pompa, pompa dan pintu air.
- Terpasangnya saringan sampah Waduk Sunter, Waduk Pulo Mas, Waduk Sunter Utara, Kali Sunter Kresek
- Terselenggaranya pembebasan tanah Banjir Kanal Timur seluas 53,9 ha,
- Beroperasinya sarana prasana pengendali banjir yang telah ada.

4.2.8.2.2 Program Peningkatan Drainase Kota

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Sunter Hulu, Cimanggis, Cilangkap, Rawalindung dan Rawabadung;
- Lancarnya aliran air buangan rumah tangga dan air hujan lokal secara gravitasi maupun sistem polde.

4.2.8.3 Fungsi Perhubungan

Arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota pada fungsi perhubungan adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana perhubungan dalam memberikan pelayanan dan daya dukung kota. Strategi fungsi perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kota besar seperti kemacetan lalu lintas, rendahnya pelayanan angkutan umum, rendahnya pelayanan untuk pejalan kaki dan lain lain. Fungsi perhubungan melaksanakan 3 program. Program-program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

4.2.8.3.1 Program Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya perbaikan darurat berat, ringan (tutup lubang) di 5 wilayah di DKI Jakarta
- Terlaksananya perencanaan program,
- Terbangunnya 3 Flyover dan 2 Underpass,
- Terpeliharanya jalur busway koridor 1 sampai dengan 7,
- Tersedianya jalur busway koridor 8, 9, dan 10

- Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan (arteri, kolektor, dan lokal) dan trotoar
- Tersedianya fasilitas trotoar
- Terpeliharanya alat-alat besar

4.2.8.3.2 Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terkendalinya dan terawasinya arus lalu lintas dan angkutan umum,
- Tersedianya fasilitas penyeberangan orang, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan,
- Bertambah dan terpeliharanya halte dan jembatan penyeberangan orang,
- Terpeliharanya rambu-rambu, marka jalan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku,
- Terawatnya dan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor agar mendapatkan hasil uji yang akurat dan memperpanjang umur pemakaian,
- Terpeliharanya dan terkendalinya kebersihan, taman dan bangunan di terminal bus,
- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan mengenai tugas yang terkait dibidang perhubungan,
- Terlaksananya perencanaan program
- Terpeliharanya peralatan pemantau, observasi dan pengawas frekuensi.

- Terbangunnya jembatan orang Pulau Tidung sisi Timur menghubungkan P. Tidung Besar dan P. Tidung Kecil sepanjang 400 meter (di Kab. Kepulauan Seribu)

4.2.8.3.3 Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terciptanya kedisiplinan pengemudi, pengguna jasa angkutan dan pemakai jalan lainnya,
- Terkendalinya penertiban,
- Pengawasan dan pengendalian jalur busway,
- Terbangunnya Dermaga Muara Angke,
- Terciptanya pengembangan sistem angkutan umum massal,
- Terbangunnya 2 lokasi Park and Ride (Ragunan dan Kp. Rambutan),
- Terbangunnya prasarana penunjang pool busway

4.2.8.4 Fungsi Perumahan dan Permukiman

Fungsi ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, sehingga tersedia kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 3 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.8.4.1 Program Pengembangan Perumahan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Berfungsinya 300 unit rusun Marunda dan 600 unit rusun Tipar Cakung
- Terbebaskannya lahan untuk rusun di Km.12 Daan Mogot seluas 28.604 m², Jakarta Barat, dan pembebasan tanah untuk rusun Rawa Bebek seluas 19.950 m².

Sebagian kegiatan yang tidak terlaksana pada program ini adalah :

Pembebasan lahan untuk lokasi rusun di beberapa lokasi seperti di Pinus Elok, Jl. Bekasi Timur, Duri Kosambi, Cilincing Nagrak, Cipinang, dimana disebabkan administrasi pembebasan yang tidak lengkap.

4.2.8.4.2 Program Pengembangan Lingkungan Permukiman

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Dilakukannya perbaikan lingkungan di 56 RW kumuh;
- Tersosialisasinya tertib penghunian rusun melalui sinetron maupun pembuatan video dokumenter;
- Menurunnya sengketa penghunian rumah ber SIP di lima wilayah kota administrasi
- Perbaikan maupun perawatan rumah susun di beberapa lokasi

4.2.8.4.3 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya penyusunan program pembangunan permukiman;
- Tersusunnya kajian pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di kawasan permukiman;
- Pembuatan deep well di rusun Tambora dan rusun Sukapura,
- Sedangkan untuk pembuatan Deep Well rusun Kapuk Muara tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan anggaran sehingga waktu pelaksanaannya tidak cukup.

4.2.8.5 Fungsi Tata Ruang

Dimaksud untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif, berdasarkan prinsip adil, efisiensi dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program sebagai berikut :

4.2.8.5.1 Program Perencanaan Ruang

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlatihnya SDM Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugas pokok perencanaan dan pelayanan ketatakotaan,
- Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan ISO 9001:2000 pada 3 SDTK dan 10 Seksi DTK Kecamatan,
- Terlaksananya Upgrading dan Updating peta operasional pelayanan dalam bentuk digital maupun hardcopy serta databasenya sebanyak 169 blad,

- Ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembuatan Rencana Tata Ruang Bawah Tanah,
- Tersosialisasinya perencanaan dan pelayanan ketatakotaan melalui berbagai media

4.2.8.5.2 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Tersedianya trace jalan untuk aksesibilitas ke Sentra Primer Timur,
- Tersusunnya hasil pengkajian pemanfaatan lahan sebagai bahan/materi Rapim Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT),
- Tersedianya Daftar dan Informasi Lembar Rencana Kota (LRK) 5 Wilayah.

4.2.8.5.3 Program Penataan dan Pengawasan Bangunan

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya survei Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan membangun sebanyak 1.734 bangunan.
- Tersediannya informasi data bangunan sebanyak 12.950 bangunan.
- Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan SMM ISO 9001:2000 di 5 Suku Dinas P2B dan 10 Seksi Kecamatan P2B.
- Tersosialisasinya Ketentuan Membangun Kepada Masyarakat sebanyak 5.200 orang.
- Terlaksananya Penuntasan Tindakan Penertiban terhadap 1.033 bangunan,

- Tertanganinya 69 kasus pengaduan dan sengketa bangunan

4.2.8.5.4 Program Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis

Kegiatan program ini tidak bisa terlaksana karena hambatan administrasi, yaitu keterlambatan turunnya anggaran yang berakibat pada terlambatnya proses pelelangan.

4.2.8.6 Fungsi Tata Bangunan

Dimaksudkan untuk menyediakan bangunan gedung pemda dan menata lingkungan yang secara memadai agar dapat terwujud tata ruang yang harmonis, adil dan berkelanjutan.

Diarahkan untuk mewujudkan penataan bangunan gedung pemda yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 1 program yaitu :

4.2.8.6.1 Program Penataan Bangunan dan Gedung Pemda

Hasil yang dicapai program ini pada tahun 2007, antara lain :

- Terlaksananya pekerjaan struktur cor lantai dan balok lantai 13 dan kolom lantai 14 Gedung Blok B (16 Lt) dan annex (2 Lt) Walikota Administrasi Jakarta Barat,
- Terlaksananya pemasangan genset pada bangunan sayap dan penambahan struktur menjadi 7 lantai gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan,

- Terlaksananya pemasangan Chiller dan Penambahan Struktur 2 lantai gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur,
- Terlaksananya penyelesaian pekerjaan pondasi Pile Cap, Pemasangan Genset dan Urugan Tanah Untuk Peninggian gedung Blok Q Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara,
- Terlaksananya pekerjaan Bor Pile (Pondasi) Masjid Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat,
- Terlaksananya pekerjaan pemasangan M&E serta finishing arsitektur gedung Islamic Center Jakarta (Sarana Sosbud),
- Tersusunnya Perencanaan /DE gedung Blok H dan G Balaikota Provinsi DKI Jakarta,
- Terbangunnya gedung Blok B dan D gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta,
- Terlaksananya Pembangunan Gedung Prasada Sarana Karya (PSK) Provinsi DKI Jakarta,
- Terlaksananya Pekerjaan lanjutan Tiang Pancang sebanyak 180 titik untuk pondasi Pembangunan Fasilitas dan Rekreasi Olah Raga Boker Jakarta Timur,
- Terlaksananya pekerjaan Pemancangan pondasi dan urugan tanah untuk peninggian Pembangunan Gedung Serba Guna PKP Provinsi DKI Jakarta
- terselesaikannya Penataan Halaman dan Plaza Dinas Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

- Tersusunnya Masterplan dan Perencanaan/DE Pembangunan Gedung BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta.

4.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

Secara umum permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang busway koridor 8, 9, 10 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu solusinya anggaran dimasukan dalam mekanisme Multiyears.
- (2) Tidak terlaksananya pembebasan lahan untuk lokasi rusun di beberapa lokasi seperti di Pinus Elok, Jl. Bekasi Timur, Duri Kosambi, Cilincing Nagrak, Cipinang, dimana disebabkan administrasi pembebasan yang tidak lengkap.
- (3) Keterlambatan penetapan Perda APBD Tahun 2007 berdampak pada tidak terlaksananya program dan kegiatan secara penuh. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang diharapkan pembahasan Raperda APBD dilakukan dengan jadwal yang ketat dan ditaati oleh Eksekutif dan Legislatif.
- (4) Beberapa kegiatan pembebasan tanah untuk sarana prasarana umum masih belum dapat dilaksanakan karena sebagian masyarakat masih menginginkan harga di atas NJOP. Untuk itu, pada masa mendatang perlu lebih berani untuk menerapkan Perpres 36 Tahun 2006.
- (5) Terjadi beberapa kesalahan kode rekening, sehingga perlu diperbaiki yang hanya dapat dilakukan pada Perubahan APBD. Untuk itu, pada tahun mendatang sebaiknya Perda APBD tidak perlu mencantumkan kode rekening, sehingga perubahan kode rekening dapat dilakukan oleh Eksekutif tanpa menunggu Perubahan APBD.
- (6) Pemahaman aparat tentang Kepres 80 Tahun 2003 beserta penyempurnaannya masih kurang, sehingga proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan.

- (7) Kekhawatiran pelaksana kegiatan (Pengguna Anggaran Cabang dan Panitia Lelang) akan resiko yang harus dipikul berdampak adanya beberapa aparat yang tidak mau lulus dalam Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga sulit untuk menunjuk pelaksana kegiatan.
- (8) Adanya beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur 37 Tahun 2007 yang tidak sejalan dengan Perpres 80 Tahun 2003 beserta penyempurnaannya. Untuk itu, pada tahun mendatang Keputusan Gubernur tersebut perlu disempurnakan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Dasar hukum dari Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan Sistem dan Prosedur Penugasan Pemerintah kepada Daerah serta Penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten dan atau dari Kotamadya/Kabupaten ke Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi.

Sesuai mekanisme, pemberi tugas pembantuan tidak secara langsung memerintahkan untuk melaksanakan tugas pembantuan, namun terlebih dahulu memberitahukan secara resmi kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan.

Tugas pembantuan yang diterima oleh Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 sebanyak 29 kegiatan yang tersebar pada 11 SKPD. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

5.1.1 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.1.1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat alokasi sebesar Rp. 1.245.570.000 untuk melaksanakan 1 program

yaitu Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan 4 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Ketrasmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.125.059.000 dari anggaran sebesar Rp.142.550.000 dengan hasil kegiatan yaitu : terlaksananya sistem informasi manajemen ketrasmigrasian, serta pengembangannya dengan data-data yang terekam pada program kerja.
- b) Kegiatan Perencanaan Teknis Pemukiman dan Perpindahan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp.48.490.000 dari anggaran sebesar Rp.62.700.000 dengan hasil kegiatan yaitu : terjalinnya kerjasama dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan serta dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi di sektor ketrasmigrasian.
- c) Kegiatan Promosi, Investasi dan Kemitraan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp.128.630.000 dari anggaran sebesar Rp.219.120.000 dengan hasil kegiatan yaitu terjaringnya animo calon transmigran asal Provinsi DKI Jakarta, serta mensosialisasikan dan penyebarluasan informasi program transmigrasi.
- d) Kegiatan Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp.657.314.959 dari anggaran sebesar Rp.821.200.000 dengan hasil kegiatan yaitu berhasilnya memberangkatkan serta menempatkan trasnmigran asal

Provinsi DKI Jakarta sebanyak 45 KK ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

5.1.1.2 BPPD Provinsi DKI Jakarta mendapat alokasi sebesar Rp.500.000.000 untuk melaksanakan 1 program dengan 3 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi kegiatan :

- a) Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana, Kerja dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 18.800.000. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini Rp.0, hal ini karena adanya efisiensi yaitu tidak digunakannya belanja perjalanan dinas.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi dengan anggaran sebesar Rp.35.530.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.34.930.000 dengan hasil 84 OB dan untuk memperlancar administrasi kegiatan selama 12 bulan.
- c) Kegiatan Pengembangan Produktivitas & Pembinaan Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp.445.670.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.390.495.000 dengan hasil : terlatihnya 110 orang calon pengusaha dan UKM untuk peningkatan pengembangan manajemen usaha, terlatihnya 50 orang peserta UKM dalam rangka peningkatan motivasi usahanya, terlatihnya 180 orang karyawan perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, serta terlaksananya konvensi mutu dan produktivitas terhadap 140 orang peserta dalam rangka menyebarluaskan arti pentingnya mutu dan produktivitas.

5.1.1.3 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat melaksanakan 2 program dengan 6 kegiatan, yaitu :

5.1.2.3.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK

- a) Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana, Kerja dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.3.200.000 dengan hasil terselenggaranya rapat koordinasi untuk dalam rangka penyusunan program dan RKA.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 153.280.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.120.825.000 dengan hasil yaitu terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis terhadap 48 orang, pengembangan Sistem Informasi Manajemen, dan tersedianya 1 unit peralatan kantor.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Non Institusional/Pelatihan Keliling (MTU) dengan anggaran sebesar Rp.76.920.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.68.935.000 dengan hasil terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat kepada 48 orang.

5.1.2.3.2 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

- a) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp.124.010.000. Adapun realisasi anggaran

kegiatan ini mencapai Rp.112.585.000 dengan hasil tersedianya 2 unit komputer sebagai pengolah data serta meningkatnya efektivitas IPK dan Bursa Kerja Online.

- b) Kegiatan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan anggaran sebesar Rp.50.290.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.39.100.000 dengan hasil terselenggaranya pembinaan terhadap 30 orang Pengguna Tenaga Kerja Asing.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif dengan anggaran sebesar Rp.150.700.000. Adapun realisasi kegiatan ini mencapai Rp.148.300.000 dengan hasil terselenggaranya pemberdayaan terhadap 66 orang tenaga kerja penganggur.

5.1.1.4 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan yaitu :

5.1.1.4.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja :

- a) Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana, Kerja dan anggaran dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.4.603.500 dengan hasil terlaksananya koordinasi.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.153.280.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.148.633.350

dengan hasil lancarnya administrasi kegiatan, terlaksananya diklat teknis, pengembangan SIM, penyuluhan dan penyebaran informasi, monitoring dan evaluasi serta tersedianya peralatan kantor.

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Non Institusional/Pelatihan Keliling (MTU) dengan anggaran sebesar Rp.76.920.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.74.451.000 dengan hasil terlaksananya pelatihan MTU di pedesaan sebanyak 3 paket.

5.1.1.4.2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dengan kegiatan yaitu Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.850.000. Adapun realisasi keuangan mencapai Rp.113.646.000 dengan hasil kegiatan terlaksananya penerapan sistem manajemen K3 pada 30 perusahaan serta pemetaan status kerawanan ketenagakerjaan sebanyak 1 paket.

5.1.1.5 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, melaksanakan 2 program dengan 4 kegiatan, yaitu :

5.1.1.5.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK

- a) Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana, Kerja dan anggaran dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp.0, hal ini karena adanya ketentuan bahwa biaya perjalanan

hanya bisa dipakai 30% dan anggaran tersebut tidak dicairkan.

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.153.280.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp. 145.880.000 dengan hasil terlatihnya tenaga kerja sebanyak 48 orang di bidang komputer dengan program microsoft office dan desain grafis, tersusunya buku informasipelatihan dan leaflet tentang IPK.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Non Institusional/Pelatihan Keliling (MTU) dengan anggaran sebesar Rp.76.920.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.73.780.000 dengan hasil kegiatan terlatihnya pencari kerja sebanyak 48 orang untuk bidang kejuruan salon, sablon dan merangkai bunga.

5.1.1.5.2 Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja alokasi anggaran sebesar Rp.129.175.000. Adapun realisasi keuangannya mencapai Rp..... dengan hasil kegiatan pembimbingan pada 30 orang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerisaaan terhadap 150 perusahaan untuk pemetaan status kerawanan perusahaan.

- 5.1.1.6 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja melalui Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja alokasi anggarannya sebesar Rp. 129.175.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.111.775.000 dengan hasil kegiatan terlaksananya pembinaan teknis K3 di 30 perusahaan kecil dan menengah serta tersedianya data pemetaan status kerawanan di 150 perusahaan.
- 5.1.1.7 Sudin Tenaga Kerja dan Transigrasi Jakarta Utara melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja melalui Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.175.000. Adapun arealisasi kegiatan ini mencapai Rp.102.075.000 dengan hasil kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 30 personil K3 di perusahaan kecil dan menengah, serta terlaksananya pemetaan status kerawanan ketenagakerjaan di sejumlah 150 perusahaan.

5.1.2 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000 untuk melaksanakan 2 program dengan 2 kegiatan yaitu :

- 5.1.2.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya anggarannya sebesar Rp1.500.000.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.915.716.000 dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya alat kesehatan puskesmas, alat pengelola data, dan alat laboratorium puskesmas.

- 5.1.2.2 Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan Kegiatan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan anggarannya sebesar Rp.4.000.000.000. Anggaran ini dikembalikan ke Depkes mengingat kegiatan dengan sasaran rumah sakit swasta (FK UKI Cawang) tersebut belum memiliki dasar hukum serta tidak ada dalam perencanaan Dinas Kesehatan.

5.1.3 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Pertanian

- 5.1.3.1 Dinas Pertanian dan Kehutanan melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan. Adapun realisasi kegiatan ini mencapai Rp.111.385.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp.188.725.000 dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya benih padi varietas Ciherang (padi non hibrida) kelas benih sebar sebanyak 16.095 kg untuk wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
- 5.1.3.2 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mendapat alokasi tugas pembantuan sebesar Rp.189.682.000 untuk melaksanakan Program Pengembangan Agribisnis dengan Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak. Adapun realisasi kegiatan ini mencapai Rp.111.526.265 dari alokasi anggaran sebesar Rp.129.682.000 dengan hasil pembuatan biogas

sebanyak 1 unit, dan pembuatan pupuk organik di Pondok Rangun Jakarta Timur.

5.1.4 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan

5.1.4.1 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.59.741.000 dari anggaran Rp.60.000.000 dengan hasil laptop sebanyak 1 unit, dan meja laboratorium/meja periksa sebanyak 10 unit.

5.1.4.2 Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp.0, dari anggaran sebesar Rp.875.000.000. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan dananya diblokir sehingga harus ada persetujuan dari DJA.

5.2 Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang pembentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kota dan Kabupaten serta Desa Otonom. Lima Kotamadya, 1 Kabupaten dan 267 Kelurahan yang ada di DKI Jakarta semuanya bersifat administrasi. Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan tugas pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja Sama Antar Daerah/Kota

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga tuntutan kebutuhan akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/sister cities (kota di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

a. Kerjasama antar Daerah

Daerah-daerah dalam negeri yang melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergabung di dalam beberapa forum/lembaga, yaitu:

- 1) Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek).

Kerja Sama Pembangunan Jabotabek telah berkembang dengan masuknya Kabupaten Cianjur ke dalamnya. Hal ini terjadi setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten

Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Juni 2005 yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek. Guna mengaktualkan BKSP Jabodetabek sesuai dengan perkembangan daerah dan permasalahannya, maka Kepmendagri tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

2) Forum Mitra Praja Utama (MPU), yang saat ini meliputi 10 Provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat , dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Forum lain seperti APPSI, APEKSI, APKASI

Kerjasama antar daerah meliputi berbagai bidang sebagaimana tampak pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Bidang Kerjasama DKI Jakarta dengan Daerah Lain

No	Bidang	Tujuan	Daerah Mitra
1	Pemeliharaan Situ di Jabodetabekjur	Pelestarian dan perlindungan Situ	Bodetabekjur
2	Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan sarana pendidikan SD dan SMP	Bodetabekjur

No	Bidang	Tujuan	Daerah Mitra
3	Sampah	serta Puskesmas Pengelolaan sampah dan TPA sampah	Bekasi
4	Manajemen Sampah	Penambahan lokasi TPA (tahap uji coba) di Nambo	
5	Kependudukan	Sosialisasi dan pengenalan sistem	Bodetabekjur
6	Sosial	Pembangunan panti untuk PMKS	Bodetabekjur
7	Lingkungan Hidup	Pemantauan DAS Ciliwung-Cisadane dan pemantaun Baku Mutu	Jabar dan Banten
8	Pertanian	Koordinasi pemasaran dan kelancaran lalu lintas hasil pertanian	Jabar dan banten
9	Pertanian, Peternakan dan Pariwisata	Ketahanan pangan, dan menekan arus urbanisasi	Kab. Toba Samosir, Kab. Dairi, Kab. Garut
10	Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kesejahteraan Sosial	Pemerataan penduduk, membuka kesempatan kerja	Kab. Ogan Koring Ilir
11	Ketransmigrasian	Pemerataan penduduk, membuka kesempatan kerja	Kab. Bungo
12	Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Kesenian, Ketenagakerjaan, Sosial dan PAD	Distibusi pangan, lapangan kerja, pembinaan PMKS, menekan urbanisasi, peningkatan keterampilan petani, pengembangan potensi daerah	Provinsi Lampung
13	Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, dan Pariwisata	Distibusi pangan, lapangan kerja, menekan urbanisasi, peningkatan keterampilan petani, pengembangan potensi daerah	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi	Pemenuhan bahan baku industri, peningkatan keterampilan petani, peningkatan distribusi perikanan dan pengembangan potensi daerah	Provinsi Sulawesi Utara
15	Pertanian, Peternakan dan Peternakan	Fasilitasi kerjasama dengan kabupaten di	Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang	Tujuan	Daerah Mitra
16	Pertanian, Peternakan dan Peternakan	Sumatera Utara Meningkatkan distribusi dan kualitas bahan pangan	Provinsi NTB
17	Perindustrian, Kehutanan, Nakertrans	Pemenuhan bahan baku industri, dan menekan urbanisasi	Provinsi Sumatera Selatan
18	Nakertrans, Sosial, Agribisnis dan investasi	Pemenuhan bahan baku industri, penempatan tenaga kerja dan menekan urbanisasi	Provinsi Jambi
19	Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perindag, Kesehatan, Perekonomian, Pariwisata, Kesos, Kehutanan, Infokom, Perhubungan, ke-PU-an, Pertambangan, Kependudukan, dan Tenaga kerja	Kerjasama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Angota MPU - Lampung - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DIY - Jawa Timur - Bali - NTB - NTT
20	Pemerintahan	Meningkatkan kerjasama guna peningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat	Provinsi seluruh Indonesia
21	Pemerintahan	Membangun jaringan komunikasi, seminar, work shop, pelatihan	Kabupaten Seluruh Indonesia

Sumber : Biro KAKDA Tahun 2007

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kerjasama Antar Daerah

Sesuai dengan prinsipnya bahwa kerjasama antar daerah bersifat saling menguntungkan, maka dari kerjasama ini tercermin hasil-hasil sebagai berikut.

- 1) Dalam kerjasama Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan Kota dan Kabupaten Bodetabekjur telah dilakukan peningkatan sarana bangunan SD, SMP dan Puskesmas. Dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 untuk kerja

sama ini adalah Rp. 24 milyar, masing-masing Rp. 3 milyar untuk 8 Kota dan Kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten, Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok dan Kota Bogor. Tahun 2007 anggaran kerjasama bidang pendidikan dan kesehatan meningkat menjadi Rp. 40 milyar atau masing-masing Kota/Kabupaten sebesar Rp. 5 milyar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan kepada Sekretariat BKSP sebesar Rp 12.755.865.000 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, dengan rincian sebagaimana Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Bantuan Keuangan Kepada Sekretariat BKSP
Jabodetabekjur Tahun 2003-2007

No	Tahun	Jumlah Rp
1	2003	3.605.865.000
2	2004	2.650.000.000
3	2005	1.500.000.000
4	2006	2.000.000.000
5	2007	3.000.000.000
Jumlah		12.755.865.000

Sumber : Biro KAKDA Prov. DKI Jakarta

- 2) Kesepakatan Kerjasama pelestarian dan perlindungan situ-
situ dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur
Provinsi Banten serta 8 (delapan) daerah di wilayah
Bodetabekjur yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota
Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota
Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur.
- 3) Hingga saat ini masih berlangsung kerja sama pengelolaan
sampah dengan Kota Bekasi, yaitu adanya TPA
Bantargebang.

- 4) Terpenuhinya pasokan bahan pangan untuk warga Jakarta, khususnya dari daerah yang menjalin kerjasama dengan Jakarta.
- 5) Pelatihan bagi para petani di Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi, Garut, Lampung sebagai produsen sayuran yang hasilnya dikirim ke Jakarta.
- 6) Terbangunnya gedung Pelatihan di Panti Karya Lampung.
- 7) Tersedianya bahan baku untuk keperluan industri di DKI Jakarta.
- 8) Tersedianya lahan transmigrasi bagi transmigran asal DKI Jakarta di beberapa daerah di luar Jawa.
- 9) Terjalannya temu usaha pengrajin DKI Jakarta dengan pengusaha Sumatera Selatan.
- 10) Terbangunnya gedung Tourism Information Centre di Kuta Bali sebagai sarana informasi bagi Provinsi anggota Mitra Praja Utama.
- 11) Penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) Gubernur, Raker Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam APPSI, APKASI dan APEKSI.
- 12) Tersusunnya Local Government Self Assesment Tools untuk membantu Kota dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah.
- 13) Seminar Manajemen Asset Legislatif dan Teknik Prakiraan Peningkatan PAD melalui forum APEKSI.
- 14) Terlaksananya Raker Gubernur MPU Tahun 2006 di Jakarta
- 15) Bantuan hand tractor ke Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 26 unit.

- 16) Bantuan hand tractor ke Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 unit.
 - 17) Bantuan Sertifikasi tanah kepada Transmigran Swakarsa Mandiri ke daerah Rantau Alai, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 100 KK.
 - 18) Bantuan pembangunan sarana air bersih perpipaan di lokasi pembangunan transmigrasi Timbalasi, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
 - 19) Bantuan Pembangunan Panti Karya Lempasing Provinsi Lampung untuk sarana pembinaan dan pelatihan PMKS asal DKI Jakarta.
 - 20) Kontribusi bersama pembangunan Gedung Tourism Information Centre (TIC) MPU di Kuta Provinsi Bali untuk sarana informasi wisata dan potensi Jakarta.
- b. Kerjasama antar Kota (Sister Cities)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 15 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi dan Istambul. Selain itu telah pula ditandatangani Letter of Intent (LoI) Kyiv, Athena, Kwazulu Natal, Maputo dan Tripoli.

Kerjasama antar kota (siter cities) meliputi berbagai bidang sebagaimana tampak pada tabel 6.3

Tabel 6.3
Bidang Kerjasama DKI Jakarta dengan Kota Lain (Sister Cities)

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
----	------	-------------------------------	----------------------	--------------------------

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAKAN
1.	Jeddah, Saudi Arabia	Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 1979.	Tidak aktif	1) Pengiriman tenaga ahli 2) Mengadakan bimbingan teknis dan latihan kerja di bidang Tata Kota, Tata Bangunan 3) Penghijauan Kota 4) Land Scaping dan Administrasi.
2.	Seoul, Korea Selatan	Memorandum of understanding (MoU) tanggal 25 Juli 1984.	Aktif	1) Sistem Adm. Umum dan Kependudukan. 2) Manajemen dan Perencanaan Kota. 3) Penataan lalu lintas dan transportasi. 4) Pengawasan dan penataan lingkungan. 5) Pembangunan masyarakat. 6) Program kesenian dan kebudayaan. 7) Peningkatan program ketenagakerjaan.
3.	Islamabad, Pakistan	Deklarasi Bersama tanggal 25 oktober 1984.	Tidak aktif	1) Peningkatan hubungan baik dan saling pengertian 2) kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintah daerah 3) Pertukaran Kebudayaan 4) Pembinaan Generasi Muda 5) Perdagangan dan Pariwisata
4.	Rotterdam, Belanda	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 1 Agustus 1986	Aktif	1) Sistem Informasi Manajemen 2) Teknologi Penanganan Sampah padat dan pemusnahan 3) Sampah 4) City Cargo Terminal 5) Bidang-bidang yang disetujui oleh kedua kota.
5.	Tokyo, Jepang	Pernyataan Bersama tanggal 23 Oktober 1989.	Tidak aktif	1) Manajemen perkotaan 2) kebudayaan. 3) Kesenian. 4) Olahraga dan bidang-bidang lain yang disepakati kedua Pemerintah Kota.
6.	Los Angeles, USA	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 27 Januari 1991.	Kurang aktif	1) Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi. 2) Perjalanan dan Pariwisata. 3) Kesehatan Lingkungan dan Perencanaan Kota. 4) Kebudayaan dan Kesenian. 5) Kepemudaan, Pendidikan dan IPT.ek.
7.	Casablanca, Maroko	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 27 Mei 1991	Tidak aktif	1) Pertukaran tenaga ahli dalam rangka peningkatan pengelolaan kota. 2) Perdagangan dan Pariwisata.

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
				3) Administrasi dan Penerangan. 4) Kebudayaan dan Kesenian. 5) Kepemudaan dan Olahraga.
8.	Beijing, RRC	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 4 Agustus 1992		1) Administrasi Perkotaan. 2) Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Perkotaan. 4) Manajemen Pariwisata. 5) Industri Kecil dan Kerajinan.
9.	Berlin, Jerman	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 13 April 1994	Aktif	1) Perencanaan Kota. 2) Angkutan Umum Kota. 3) Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah. 4) Perencanaan Pembangunan Perumahan. 5) Ekonomi. 6) Kebudayaan.
10.	Arkansas, USA	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 17 November 1993	Tidak aktif	1) Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi. 2) Investasi. 3) Kesenian dan Kebudayaan. 4) Kedokteran Bedah Anak dan Rumah sakit Kanker.
11.	New South Wales, Australia	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 30 Mei 1994	Tidak aktif	1) Investasi 2) Pembangunan Ekonomil Pembangunan Perkotaan 3) Sistem Informasi Geografi 4) Pendidikan dan Pelatihan 5) Pariwisata dan Kebun Binatang.
12.	Paris, Perancis	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 8 SePT.ember 1995	Tidak aktif	1) Penataan kota, lalu lintas dan angkutan umum. 2) Perlindungan lingkungan hidup. 3) Organisasi administrasi kota. 4) Pendidikan staf administrasi dan teknik. 5) Pengembangan kebudayaan, pendidikan dan olahraga
13.	Bangkok, Thailand	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 21 Januari 2002	Aktif	1) Perdagangan dan investasi 2) Promosi pariwisata dan manajemen 3) Traffic control 4) Perencanaan perkotaan 5) Sumber daya manusia 6) Administrasi pemerintah daerah
14.	Hanoi, Vietnam	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 23 November 2004	Kurang aktif	1) Perencanaan kota dan manajemen 2) Ekonomi dan perdagangan 3) Pelatihan 4) Pariwisata, kebudayaan dan olahraga

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
				5) Kerjasama dibidang lain yang disepakati bersama.
15.	Jakarta-Istanbul, Turki	Letter of Intent (LoI) tanggal 30 Oktober 1998		1) Pariwisata, Kebudayaan, Seni dan Olah raga 2) Pengelolaan Bangunan Bersejarah 3) Ekonomi dan Perdagangan 4) Lingkungan Hidup dan Penghijauan 5) Transportasi Kota dan Manajemen Lalu Lintas 6) Administrasi Pemerintahan Daerah 7) Bidang-bidang lain yang disetujui
16.	Jakarta-Athena, Yunani	Letter of Intent (LoI) tanggal 29 Oktober 2001		1) Administrasi Pemerintahan 2) Pelayanan Pemerintah 3) Pelatihan Kejuruan dan Manajemen Kepegawaian pada Perusahaan 4) Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda & Olah raga 5) Lingkungan Hidup 6) Kesejahteraan Sosial dan 7) Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama
17.	Jakarta-Kyiv, Ukraina	Letter of Intent (LoI) tanggal 30 Mei 2005		1) Transportasi Kota; 2) Taman Kota dan Kawasan Rekreasi; 3) Perdagangan; 4) Kegiatan Kebudayaan; 5) Pariwisata; 6) Olah Raga dan Kesenian; 7) Pembangunan Perkotaan; dan 8) Bidang-bidang yang disepakati
18.	Jakarta-Kwazulu Natal, Afrika Selatan	Letter of Intent (LoI) tanggal 30 November 2005		1) Perdagangan dan Industri 2) Promosi Pariwisata dan Manajemen 3) Perencanaan Kota dan Infrastruktur 4) Olah raga, Budaya dan Seni dan 5) Kerjasama antar DPRD
19.	Jakarta-Maputo, Mozambique	Letter of Intent (LoI) tanggal 28 November 2005		1) Perdagangan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah 2) Promosi Pariwisata 3) Perencanaan Kota dan Infrastruktur 4) Pertamanan dan Rehabilitasi Taman Kota 5) Konstruksi Jalan dan Pemeliharaan 6) Olah raga, Budaya dan Kegiatan Sosial, dan 7) Kerjasama antar DPRD

Sumber : Biro KAKDA Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan perkembangan kegiatan dan hasil secara khusus dari masing-masing sister city dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) International Union of Local Authorities (IULA) atau sekarang disebut United Cities and Local Government (UCLG). Sejak 1979 Jakarta telah menjadi anggota eksekutif yang ikut berperan aktif dalam pembentukan UCLG dan Gubernur berperan sebagai Dewan Pengurus dan Anggota Council di tingkat dunia maupun Asia-Pasific. Tujuan forum ini adalah sebagai sarana tukar-menukar pikiran dan pengalaman antar pejabat pemerintah dalam mengelola kota.

Kegiatan yang pernah diikuti antara lain :

- Standing Commission on Metropolitan Government.
- Urban Poverty and Environment.
- Urban Wasted Management.
- Metropolitan Performance Measurement.
- Water Management.
- Lokakarya lainnya mengenai berbagai isu perkotaan.

- 2) Asean Network of Major Cities 21 (ANMC 21) atau Jaringan Kota-Kota Besar Asia abad 21, merupakan organisasi Pemerintahan Kota yang dibentuk di Tokyo oleh 12 Kota Besar Asia pada tanggal 18 Oktober 2001. Kedua belas kota tersebut adalah Tokyo, Bangkok, Beijing, Seoul, Manila, Singapura, Kualalumpur, Taipei, Hanoi, New Delhi, Jakarta dan Yangon. Tujuan dari forum ini adalah membangun citra yang baik bagi anggota ANMC 21 di mata dunia, terutama aspek keamanan dan pelayanan kota, serta sebagai ajang promosi bagi perindustrian, perdagangan dan kebudayaan serta pariwisata Asia.

- 3) Joint Projects ANMC 21 yang diikuti oleh Jakarta, antara lain :

- Promosi pembangunan pesawat jet penumpang ukuran kecil dan menengah.
- Proyek belajar jarak jauh Asia.
- Jaringan pariwisata, budaya, kerajinan dan kesenian Asia.
- Jaringan kota-kota Asia untuk pengendalian emisi kendaraan bermotor.
- Pengembangan manajemen dan daur ulang limbah.
- Perumusan rencana angkutan umum kota yang terpadu.
- Pelatihan klinis bagi konsultan AIDS.
- Pembentukan lembaga pembangunan dan manajemen perkotaan Asia.
- Jaringan untuk manajemen krisis.
- Pengembangan bisnis dan investasi Asia.

4) Jakarta – Rotterdam

- Asistensi teknis tentang Sistem Informasi Manajemen oleh Mr. Karelwiesssing dan transportasi barang serta pusat-pusat distribusi oleh Mr. Victor Schoanmakers.
- Diskusi teknis dari kota Rotterdam dengan unit terkait tentang Solid Waste management.
- Workshop tentang pengelolaan museum yang dihadiri oleh Mr. Kees Plaiser (Museum Sejarah Rotterdam).
- Masukan dari pejabat kota Rotterdam (Mr . martin Dukkar dan Mr. Kees Plaiser) tentang Waste and River Management

- Penyerahan peta kekuasaan pemerintah Belanda selama masa perjuangan Kemerdekaan RI kepada Museum Joeang 45.
- Penyerahan Wayang Revolusi kepada Museum Wayang Jakarta.
- Kunjungan kerja pejabat Kantor Arsip ke Rotterdam dalam rangka pengembangan wawasan mengenai kearsipan.

5) Jakarta – Tokyo

- Pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti on the job training pada industri di Kota Tokyo atas biaya Pemerintah Metropolitan Tokyo (setiap tahun)
- Pengiriman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Tokyo untuk magang selama 6 sampai 1 tahun untuk bidang yang diperlukan (terakhir dikirim tahun 2004).
- Pengiriman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk studi banding tentang pengawasan pada pemerintah kota Metropolitan Tokyo (2003).

6) Jakarta – Seoul

- Pengiriman staf teknis untuk mendalami tentang jaringan utilitas bawah tanah Kota Seoul, sistim komputerisasi kependudukan, penataan kawasan kumuh dan kesehatan lingkungan.
- Pengiriman tenaga kerja untuk magang pada industri di Kota Seoul.
- Kunjungan antar DPRD kota Seoul dan Jakarta (2006).

7) Jakarta – Hanoi

- Ditandatanganinya MoU pada tahun 2004.

- Kunjungan lembaga pengawas Kota Hanoi ke Bawasda Provinsi DKI Jakarta (2006).
 - Kunjungan DPRD dan pejabat DKI Jakarta ke Hanoi (2006).
- 8) Terdidiknya pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada berbagai pelatihan di beberapa kota luar negeri dalam rangka kerjasama teknik (hibah) dan jasa ekonomi, antara lain :
- Road Traffic Accident Rescue Course Under the Malaysian Technical Cooperation Program, dari Pemerintah Malaysia.
 - Seminar on Economic and Social Policy Consulting Program for Developing Countries, dari Pemerintah RRC.
 - Seminar on Cities Planning and Development in Developing Countries, dari Pemerintah RRC.
 - English Language and Communication Skill, dari Pemerintah Singapura.
 - Effective Energy System for Sustainable Development, dari Asian Institute of Technology (AIT) di Thailand.
 - Fire Fighting Technique II dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang.
 - Organization Culture and Management : Toward Effective Organization (OCM) dari "Maastricht School of Management" (MSoM), Belanda.
 - Traffic Management dari Pemerintah Singapura bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam rangka Japan-Singapore Partnership Program for The 21Th Century (JSPP21).

- Public Governance and Administration in Singapore dari Pemerintah Singapura.
- “Collaborative Models for Excellence in District Governance” oleh Learning Potential Service, Adelaide, Australia.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Dasar Hukum

Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagian besar menyangkut pengelolaan/pemanfaatan asset daerah. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga berpedoman pada :

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta.dan Pengembangan BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Secara operasional, kerjasama Daerah dengan pihak ketiga didasarkan pada kesepakatan bersama (MoU)/perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti dengan administrasi lainnya sesuai dengan kesepakatan dimaksud.

2. Mitra Kerja Sama dan Bidang Kerja Sama

a. Pihak ketiga yang diajak kerja sama dalam bidang investasi adalah perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

- 1) PT. Pembangunan Jaya
- 2) PT. Food Station Cipinang
- 3) PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
- 4) PT. Delta Jakarta
- 5) PT. Bumi Grafika Jaya
- 6) PT. Pembangunan Jaya Ancol
- 7) PT. Ratax Armada
- 8) PT. Rheem Indonesia
- 9) PT. Kawasan Berikat Nusantara
- 10) PT. Alakasa Industrindo
- 11) PT. Jaya Nur Sukses
- 12) PT. Asuransi Bangun Askrida
- 13) PT. Jakarta Propertindo
- 14) PT. Bank DKI Jakarta
- 15) PT. Jakarta Tourism
- 16) PT. Rumah Sakit Haji
- 17) PT. Rumah Sakit Cengkareng
- 18) PT. Rumah Sakit Pasar Rebo
- 19) PT. Cemani Toka
- 20) PT. Pakuan
- 21) PT. Determinan Indah
- 22) PT. Jakarta International Expo
- 23) PT. Pembangunan Jaya.

b. Di bidang keindahan kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan beberapa perusahaan antara lain :

- 1) Honda Respect Motor, berupa kerjasama penghijauan 64 pohon Flamboyan, 12 pohon Kamboja Rantai, 52 rumpun

bambu Cina dan 12.000 pot tanaman hias di lokasi tepian air Kali Banjir Kanal Barat Jakarta Selatan. Sumber dana dari pihak ketiga senilai 280.000.000.

- 2) PT. Avanbanindo Perkasa, berupa kerjasama pengembangan kualitas pencahayaan tugu monas sesuai perjanjian tanggal 16 Pebruari 2006 senilai Rp 14.954.277.000 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.

c. Kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dilakukan di bidang perikanan, pusat pertokoan, dan pariwisata, yaitu :

- 1) PT. Hotel Cikini Realty, pada tanggal 17 Juli 2006 dengan isi perjanjian kerjasama Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Hotel dan fasilitasnya di Jl. Cikini Raya nomor 75 , Jakarta Pusat .
- 2) PT. Wahana Cipta Sejahtera, pada tahun 2006 dengan isi perjanjian kerjasama Pembangunan Pusat Grosir Cililitan II (PGC II), Jakarta Timur.
- 3) PT. AGB Tuna, pada tanggal 21 Nopember 2006 dengan isi perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan pabrik es di Muara Angke.
- 4) PT. Gamma Investasi Lestari sesuai perjanjian kerjasama tanggal 24 Maret 2006 berupa pengelolaan kompleks Bola Basket Internasional Kelapa Gading.

d. Kerjasama di bidang Sarana Prasarana Perkotaan

- 1) PT. Suara Metro berupa kerjasama pembangunan pos jaga polisi sebanyak 47 unit senilai Rp 603.480.000 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 10 Pebruari 2006 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame..

- 2) PT. Dian Unggul Perkasa, berupa kerjasama pembangunan Selter Bisway di 2 koridor Cawang-Grogol dan Blok M-Kota senilai Rp 15.231.000.000 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 10 Oktober 2005 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.
- 3) PT. Dian Unggul Perkasa, berupa kerjasama pembangunan kaki tangga jembatan penyeberangan orang, halte dan lift Jalan M.H Thamrin senilai Rp 11.501.983.976 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 20 September 2005 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.

Selain itu masih dilakukan kerjasama pengelolaan air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan pihak ketiga, yaitu PT. Thames dan PT. Palija. Demikian pula terdapat kerjasama dalam bidang fisik lainnya yang bersifat BTO (Built, Transfer, Operate) dan BOT (Built, Operate, Transfer).

3. Hasil dari Kerja Sama

Hasil dari kerja sama ini adalah adanya pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah. Pada tahun 2006, pendapatan daerah dari bidang ini sebesar Rp 96.667.463.397,00 atau 98,16 persen dari estimasi. Penerimaan terkecil berasal dari Rumah Sakit, mengingat Rumah sakit tidak berorientasi murni kepada profit/keuntungan, tetapi justru banyak hal yang bersifat sosial. Data tahun 2007 belum ada, tetapi sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat realisasi pendapatan dari penyertaan modal tahun 2006 sebagaimana pada tabel 6.4 dan 6.5

Tabel 6.4
Realisasi Pendapatan Penyertaan Modal Daerah
Pada Pihak ketiga (PT. Patungan) Tahun 2006

Nama Pihak Ketiga	Tahun Anggaran 2006		Δ %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. PT. Bank DKI	39.000.000.000	39.000.000.000	100%
2. PT. Jakarta Propertindo	8.000.000.000	8.000.000.000	100%
3. PT. Pembangunan Jaya Ancol	35.135.999.939	35.135.999.939	100%
4. PT. Food Station Cipinang Jaya	1.500.000.000	608.442.720	40,56%
5. PT. JIEP	4.800.000.000	4.152.707.100	86,45%
6. PT. Pembangunan Jaya	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
7. PT. Cemani Toka	-	200.000.000	100%
8. PT. Rheem Indonesia	400.000.000	550.000.000	137,50 %
9. PT. Ratax Armada	264.749.000	264.769.000	100,01 %
10. PT. Delta Jakarta	1.778.781.000	2.942.809.800	165,44 %
11. PT. Bumi Grafika	60.000.000	60.000.000	100%
12. PT. Alakasa Industrindo	74.000.000	74.000.000	100%
13. PT. Jaya Nur Sukses	100.000.000	100.000.000	100%
14. PT. Pakuan Internasional	-		
15. PT. Asuransi Bangun Askrida	2.246.771.090	2.246.771.090	100%
16. PT. Determian Indah	-		
17. PT. KBN	1.100.000.000	1.000.000.000	90,91%
18. PT. Grahasahari Surya Jaya	-		
19. PT. Jakarta Tourisindo	800.000.000	-	
20. PT. Jakarta International Expo	-		
21. PT. RS Haji Jakarta	392.700.000	-	
22. PT. RS. Cengkareng	866.250.000	10.685.785	1,23%
23. PT. RS Pasar Rebo	500.000.000	58.277.963	11,66%
Jumlah	98.492.251.090	95.877.463.397	97%

Sumber : Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan juga diperoleh dari kerjasama non investasi (permodalan) baik berupa goodwill, kontribusi dan dalam bentuk lainnya. Selain dalam bentuk pendapatan, yang diperoleh dari kerjasama ini adalah adanya pemeliharaan dan peningkatan kualitas bangunan-bangunan fisik dan ornamen kota, sarana dan prasarana operasional, seperti (Cold Storage) di pelabuhan Muara Angke.

Tabel 6.5
Penerimaan Pendapatan dari Pihak Ketiga

Uraian	Saldo Awal Piutang Per 31 Des 2005 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pelunasan (Rp.)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Des 2006 (Rp.)
ROYALTI				
1. PT. Essence Indonesia	-	245.000.000	245.000.000	-
JOINT PRODUCTION				
2. Eks Kabana/PT. Jaya Febrindo*)	30.000.000	-	-	30.000.000
SEWA ASET DAERAH				
3. Unit Batu Bata Putih II*)	-	-	-	-
4. Eks Unit Komp Aloca	100.000.000	120.000.000	-	220.000.000
5. Eks PD Tastra Djaya	165.000.000	120.000.000	-	285.000.000
6. Eks Tanah Unit Kabana/Tata Hidayat	-	-	-	-
7. Eks PD Undagi Klender	120.000.000	70.000.000	-	190.000.000
8. Tanah Kavling No. I.C.2	225.000.000	75.000.000	-	300.000.000
9. Tanah Kavling Blok III Aa (PT. Majuan Masitah Latif)	24.375.000	75.000.000	78.750.000	20.625.000
10. Tanah Kavling Blok II/J.14 (Eks PD Parwita Djaya)	225.000.000	-	-	225.000.000
11. Rumah Dinas Pejabat (PD.Pemb Sarana Jaya)**	110.000.000	-	-	110.000.000
12. Eks Toko Pradipta		65.000.000	32.500.000	32.500.000
KERJASAMA ASET DAERAH				
13. PT. Ayom Langgeng Lestari	-	100.000.000	100.000.000	-
14. Yayasan Sapta Nawawi Bhakti	35.000.000	35.000.000	39.474.923	30.525.077
15. PT. Rama Kristrira Perkasa	100.000.000	-	-	100.000.000
16. PT. Duta Pertiwi	-	-	-	-
17. PT. Kempas Indah Indonesia	220.000.000	-	-	220.000.000
18. PT. Gerak Maju Abadi	-	-	-	-
19. PT. Bakrie Investindo	83.276.610	-	-	83.276.610
20. PT. Dharma Alumas Sakti		76.325.425	76.325.425	-
21. PT. Jaya Real Propertindo	54.000.000	-	27.000.000	27.000.000
22. PT. Rointa Eka Djaya	-	150.000.000	150.000.000	-
23. PT. Pacific Bangun Mas	-	-	-	-
24. PT. Duta Masa Indah	500.000.000	-	-	500.000.000
25. PT. Pertiwi Margasakti	-	-	-	-
26. PT. Wahana Cipta Sejahtera (I)	-	500.000.000	-	500.000.000
27. PT. Gading Propertindo	-	-	-	-
28. PT. Pesona Marga Mandiri	-	229.600.000	-	229.600.000
29. PT. AGBTuna	-	100.000.000	-	100.000.000
30. Yayasan Dharma Bhakti Mahaka	-	50.000.000	-	50.000.000
31. PT. Pacific Prima Buana Mas	-	-	-	-

Uraian	Saldo Awal Piutang Per 31 Des 2005 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pelunasan (Rp.)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Des 2006 (Rp.)
32. PT. HOTEL CIKINI REALTY (PKS Tgl 18 Mei 2006)	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-
** Rumah Dinas Pejabat(Untuk Pembayaran Perjanjian Sewa Thn 2005)	-	240.000.000	240.000.000	-
Jumlah	1.991.651.610	3.750.925.425	2.489.050.348	3.253.526.687

Sumber : Biro Perekonomian

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Instansi vertikal sesuai definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat dari Departemen-departemen atau lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Atas dasar definisi tersebut, maka instansi vertikal yang ada Jakarta antara lain :

- a. Pengadilan Tinggi Jakarta.
- b. Kejaksaan Tinggi Jakarta .
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- d. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.
- f. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
- h. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- j. Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus.
- k. Kanwil IV Bea dan Cukai Jakarta.
- l. Kepolisian Daerah
- m. Instansi ABRI, seperti Kodam, Armabar, Arhanud

Forum koordinasi disesuaikan dengan besaran dan ruang lingkup permasalahan, sehingga bentuknya dapat berupa :

- a. Musyawarah Pimpinan Daerah Plus
- b. Rapat Pimpinan
- c. Rapat Koordinasi
- d. Rapat Evaluasi
- e. Koordinasi teknis
- f. Rapat biasa.
- g. Koordinasi dalam pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
- h. Bantuan keuangan,
- i. Kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tim asistensi dalam suatu kegiatan dan lain-lain

Koordinasi menyangkut berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Konfirmasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal.
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. Pemecahan/penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal.
- f. Penerimaan keuangan negara.
- g. Ipoleksosbudhankamnas.
- h. Pembiayaan.

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Dalam rangka merealisasikan koordinasi pada bentuk yang lebih konkrit, telah dilakukan berbagai bantuan antara lain sebagai berikut.

- a. Bantuan operasional kemitraan dan bantuan infrastruktur Kopertis
- b. Bantuan Kesra Guru NIP 15.
- c. Bantuan Operasional BKN Regional 5;
- d. Bantuan bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat adalah Kanwil Departemen Agama, dengan jenis ;
 - Pelayanan kebersihan Kanwil Depag NIP 15
 - Kesra Guru Agama (NIP 15) di Sekolah Negeri
 - Peningkatan pemeliharaan MIN,MTs,MAN
 - Renovasi Gedung Kantor Depag Jakarta Barat
 - Renovasi Gedung Kantor Depag Jakarta Timur
 - Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur
- e. Bantuan bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Biro Hukum adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan jenis;
 - Operasional Kejati DKI Jakarta
 - Operasional Pengadilan Tinggi
 - Bantuan pembangunan Rutan Kanwil Kehakiman
 - Bantuan Kendaraan Operasional PTUN
 - Bantuan renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi
 - Pembangunan Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur
- f. Bantuan Instansi Vertikal di bawah koordinasi Dinas Kesehatan adalah Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan jenis;
 - Pengadaan Alat Kesehatan di RS Persahabatan
 - Pengadaan Alat Kesehatan di RSCM
 - Genset Stroke Center RSCM

- g. Bantuan Bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Dinas Tramtib dan Linmas antara lain Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, dengan jenis bantuan ;
- Bantuan Operasional Armabar
 - Bantuan pembangunan kolam renang dan Lapangan sepak bola Koarmabar
 - Bantuan Operasional Kodam Jaya
 - Bantuan kendaraan Operasional Batalyon Zeni Kontruksi 11
 - Bantuan Sarana dan Prasarana fasilitas pendidikan Rindam Jaya
 - Bantuan Kendaraan Bermotor Patroli Polda Metro
 - Bantuan Sarana Kendaraan Operasional Satpolmil di DKI Jakarta POM TNI AD
 - Bantuan Operasional Polda Metro Jaya
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Polda Metro Jaya
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat Penjinak Bom untuk Polda Metro Jaya
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Pembangunan Stadion PT.IK
 - Bantuan Operasional Koops AU
 - Bantuan Penyelesaian Ruislag Rs. Esnawan Antariksa
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Renovasi Kantor Makodam Jaya pada Kodam Jaya
 - Bantuan Operasional Kodam Jaya
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Rehab Gedung Kodim/Randis Kodam
 - Bantuan Kendaraan Operasional Garnisun
 - Bantuan Operasional Kejati
 - Bantuan Operasional Pengadilan Tinggi

- Bantuan Kendaraan Operasional dan Kendaraan Tahanan Kejati.
- h. Bantuan operasional BPS untuk penyusunan buku Jakarta Dalam Angka dan Walikotaamadya Dalam Angka
- i. Bantuan Operasional Kanwil BPN

D. Penataan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penataan batas wilayah antara lain dimaksudkan untuk memperjelas batas wilayah antara Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi serta antar DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dalam penataan batas wilayah ini pernah terjadi sengketa antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pemeliharaan batas wilayah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Pemasangan 15 patok batas antar Provinsi.
- b. Sosialisasi peta batas wilayah bagi aparat wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Rapat koordinasi membahas perbatasan antar provinsi, yaitu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- d. Penetapan keputusan bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta , Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tanggal 14 September 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 tentang Penetapan Titik Koordinat Tanda batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Daerah Tinglkat I Jawa Barat.

e. Monitoring dan evaluasi tanda batas antar provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2002 muncul sengketa batas wilayah dengan Provinsi Banten. Sampai saat ini masalah tersebut tidak pernah diselesaikan secara hukum maupun administratif khususnya oleh Departemen Dalam Negeri. Bahkan kasus ini berhenti begitu saja tanpa ada perkembangan lebih lanjut dari pihak Banten maupun DKI Jakarta.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana dapat datang dari berbagai sumber, baik dari kejadian alam maupun akibat perilaku manusia itu sendiri. Demikian pula bentuknya juga dapat bermacam-macam. Dilihat dari kondisi geografi, demografi, sosial maupun kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, ada beberapa potensi yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta rawan bencana antara lain :

- Sebagai daerah pantai, bencana mungkin datang dari laut seperti adanya banjir pasang air laut, tsunami dan erosi pantai (abrasi).
- Sebagai muara dari 13 sungai, potensi bencana berupa banjir, pencemaran air dan sampah yang terbawa dari daerah hulu.
- Sebagai daerah yang padat penduduk, bencana yang potensial terjadi seperti kebakaran dan wabah penyakit.
- Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki potensi menjadi tempat pelaku kejahatan nasional maupun internasional, seperti kegiatan terorisme, perdagangan narkoba dan lain-lain.

Dari beberapa potensi tersebut, terdapat bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Bencana Yang Terjadi

a. Kebakaran

Kasus kebakaran di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Pada tahun 2007 terjadi 855 kasus kebakaran dengan kerugian sekitar Rp 168,675 miliar. Adapun korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal dan 63 orang luka-luka. Adapun material yang terbakar terdiri dari bangunan perumahan 5.478 unit, bangunan umum 803 unit, bangunan industri 31 unit, kendaraan 97 unit dan lain-lainlain sebanyak 667 unit.

Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu 469 kasus, kompor yang meledak 94 kasus, akibat rokok 44 kasus, akibat lampu 28 kasus dan akibat lainnya 220 kasus.

b. Banjir.

Jakarta merupakan daerah rawan banjir, baik banjir tahunan maupun banjir lima tahunan. Siklus banjir lima tahunan terjadi pada tahun 2002 dan 2007 yang menggenangi lebih dari 60% wilayah Jakarta. Bahkan pada saat banjir tanggal 2 sampai 9 Februari 2007 wilayah Jakarta yang terendam banjir mencapai 70% (454,8 km²) dengan kerugian materil yang besar.

Kerugian langsung Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha akibat banjir diperkirakan mencapai Rp 5,2 Triliun dan kerugian ekonomi sekitar Rp 3,6 triliun. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*Koran Bisnis Harian tanggal 15 Februari 2007*), banjir tahun 2007 kerugian sektor industri sekitar Rp 4,1 triliun. Tidak kurang dari 1.090 perusahaan dengan 181.380 karyawan terkena dampaknya. Selain itu banjir juga telah merusak infrastruktur industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 24 sentra di Jakarta dari 40 sentra yang ada di Jabodetabek. Kerugian di sektor IKM mencapai Rp 100,55 miliar, dengan kerugian terbesar di sektor usaha konveksi yang mencapai Rp 83,4 miliar, diikuti usaha tahu/tempe sebesar Rp

8,8 miliar dan sektor mebel sebesar Rp 4,58 miliar, PT. Aneka dan Caterindo rugi Rp 10 Miliar. Sementara itu PT. Sharp Electronics Indonesia mengaku rugi Rp 150 miliar, dan PT. Molak International Group rugi Rp 18 Miliar. Sedangkan 7 pabrik otomotif dan 23 pabrik komponen peralatan juga mengalami kerugian yang cukup besar.

- c. Wabah Penyakit Menular, terutama DBD dan Diare serta akhir-akhir ini ditambah Flu Burung. Kasus DBD dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2003 ada 14.071 pasien dengan korban meninggal mencapai 0,3 %. Tahun 2004 terdapat 20.640 pasien dan 0,4 % diantaranya meninggal. Tahun 2005 jumlah pasien meningkat lagi mencapai 23.453 orang meninggal 0,3 %. Dan tahun 2006 mencapai 24.046 pasien, yang meninggal 0,2 %.

Penyakit Flu Burung mulai terjadi tahun 2005 dengan 7 orang pasien dan 6 orang meninggal. Sedangkan tahun 2006 terdapat 11 pasien, yang meninggal 10 orang. Penyakit ini memakan korban yang sangat besar karena mencapai 90 % pasien meninggal.

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

a. Antisipasi Bencana Kebakaran

Upaya pencegahan antara lain dilakukan dengan ;

- 1) Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 2) Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil pemadam kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.

- 3) Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- 4) Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- 5) Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- 6) Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakar bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- 7) Penyiapan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap ruangan kerja di gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, serta gedung-gedung lain yang memiliki potensi kebakaran.
- 8) Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas pemadam kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.
- 9) Pengawasan dan pengendalian tata cara penyimpan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan bahan-bahan berbahaya (B3).
- 10) Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan kebakaran.

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
A.	Kendaraan Operasional	
	1. Mobil Pompa	139 unit
	2. Mobil Resque	9 unit
	3. Mobil Tangga	8 unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
	4. Mobil Break Squart	3 unit
	5. Mobil BA	3 unit
	6. Mobil Foam D.C	3 unit
	7. Mobil Snorkel	5 unit
	8. Mobil Submersible	12 unit
	9. Mobil Portable Pemadam Kebakaran	83 unit
B.	Pos pemadam dan Sumber Air	
	1. Pos	74 unit
	2. Kantor Kasi Sektor	17 unit
	3. Hidran	1.441 unit
	4. Tangki Air	5 unit
	5. Tandon Air	68 unit
C.	Peralatan Pertolongan	
	1. Perahu Karet	112 buah
	2. Motor Tempel	80 buah
	3. Dayung	420 buah
	4. Life Jacket (Pelampung)	549 buah
	5. Jaket Kebakaran	3.008 buah
D.	Personil	
	1. Petugas Pamadam Kebakaran	597 orang
	2. Inspektur Kebakaran	128 orang
	3. Petugas Penyelamatan	72 orang
	4. Petugas Penyuluh Lapangan	64 orang
	5. Montir	58 orang
	6. Instruktur Diklatkar	21 orang
	7. Pengemudi	454 orang
	8. Staf	490 orang
	9. PTT	1.454 orang

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2007

b. Antisipasi Bencana banjir

- 1) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan.
- 2) Pembuatan sumur resapan oleh warga di daerah-daerah resapan air.

- 3) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
- 4) Pemeliharaan kali, waduk, saluran, pintu air, gorong-gorong/duiker, dan sarana pengendali banjir lainnya.
- 5) Pembangunan Banjir Kanal Timur.
- 6) Peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa, Depok dan Manggarai.
- 7) Penyiapan tempat-tempat pengungsian pada setiap Kelurahan, termasuk penyiapan dapur umum.
- 8) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.

c. Antisipasi Wabah Penyakit

- 1) Penyuluhan kebersihan dan pola hidup sehat melalui berbagai cara dan media.
- 2) Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap hari Jum'at selama 30 menit dari pukul 09.00 sampai dengan 09.30.
- 3) Pemeriksaan jentik nyamuk dengan merekrut juru pemantau jentik (Jumantik) yang dikoordinasikan oleh Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.
- 4) Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, dengan inti :
 - Unggas yang dipelihara di permukiman sejak tanggal 17 Januari 2007 secara sukarela ditiadakan (dikonsumsi, dijual atau dimusnahkan)

- Dilarang memelihara unggas di permukiman.
- Unggas yang dipelihara harus memiliki sertifikat kesehatan hewan atau tanda khusus.
- Peternakan, penampungan, pemotongan dan penjualan unggas akan direlokasi secara bertahap ke tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Selain potensi bencana kebakaran, banjir dan wabah penyakit, potensi lain adalah bencana akibat tindak sabotase dan teriorisme mengingat Jakarta sebagai kota internasional. Sedangkan bencana lainnya adalah gempa bumi, karena Jakarta berada pada daerah rawan gempa terutama yang berasal dari Selat Sunda dan Laut Samudra Hindia.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Di DKI Jakarta terdapat beberapa kawasan dalam arti luas, yaitu suatu wilayah yang dikelola oleh pihak tertentu karena memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Jadi kawasan ini bukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004). Kawasan di Provinsi DKI Jakarta yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jenis Kawasan

- a. Kawasan otorita (Dikelola Pusat), yaitu Gelora Bung Karno dan Bandar Baru Kemayoran.
- b. Kawasan Pelabuhan (Dikelola Pusat, Pemda dan Swasta), yaitu : Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Sunda Kelapa; Pelabuhan Ikan Muara baru; Pelabuhan Marunda; dan Pelabuhan Khusus (Bogasari dan Pertamina).

- c. Kawasan Bandar Udara (Dikuasai ABRI), yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
- d. Kawasan Industri (Dikelola Pemda dan Swasta), yaitu : Kawasan berikat Nusantara; dan Perkampungan Industri Kecil (PIK).
- e. Kawasan Kehutanan (Dikelola Pemda), yaitu Hutan Lindung Muara Angke; dan Taman Laut Kepulauan Seribu.
- f. Kawasan Pariwisata (Dikelola oleh Badan Pengelola Nasional dan Daerah), yaitu Taman Mini Indonesia Indah; Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur; Ancol, Kebun Binatang Ragunan.
- g. Kawasan Jalan Bebas Hambatan (Dikuasai PT. Jasa Marga dan Swasta), yaitu : Jalan Tol Dalam Kota; Jalan Tol Merak; Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Cikampek; Jalan Tol TB Simatupang (Pondok Indah); dan Jalan Tol Prof. Sedyatmo.
- h. Kawasan Militer (dikuasai ABRI), yaitu : Kawasan Militer Cijantung; dan Kawasan Militer Cilangkap.

3. Sumber Anggaran

Anggaran pengelolaan kawasan-kawasan tersebut dibebankan kepada APBN untuk kawasan yang dikelola oleh Pusat dan BUMN, APBD untuk kawasan yang dikelola oleh Pemda, dan anggaran swasta untuk kawasan yang dikelola swasta,

4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berharap kawasan-kawasan yang dikelola oleh Pusat dapat dikelola oleh Pemda, atau minimal ada kontribusi terhadap Pemda. Sudah beberapa kali hal ini disampaikan kepada Pusat, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan yang realistis.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai Penutup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2007, diharapkan materi yang ada dalam LKPJ Tahun 2007 dapat menjadi bahan pembahasan untuk dirumuskan suatu catatan ataupun rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang nantinya akan berguna dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun ke depan.

Secara substansi LKPJ Tahun 2007 adalah *progress report* pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta permasalahan dan solusinya berdasar RKPD Tahun 2007 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis Daerah 2002-2007. Dengan demikian, gambaran informasi yang disajikan menekankan realisasi program dan kegiatan menurut 8 (delapan) bidang pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Renstrada 2002-2007

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2007. Namun demikian dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, masih perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal.

Demikian, LKPJ Tahun 2007 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas mulia dalam membangun kota Jakarta tercinta, agar menjadi kota idaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

**Tabel 1. Matriks Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2007**

Deskripsi	2005	2006	2007
EKONOMI			
1. PDRB-Harga Berlaku (Triliun Rp.)	436,25	501,57	564,04
2. PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp.)	295,27	312,68	332,69
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	5,90	6,39
4. PDRB Per Kapita			
a. Dalam Jutaan Rupiah	50,97	57,26	64,11
b. Dalam US\$	5,185	5,913	7,017
5. Struktur Ekonomi (%)			
a. Pertanian & Pertambangan	0,53	0,59	0,57
b. Industri, Listrik & Air	27,20	28,15	28,28
c. Perdagangan & Jasa	72,27	72,28	72,15
6. Tingkat Inflasi (%)	16,06	6,03	6,04
7. Kurs Rp Terhadap US\$	9.830	9.020	9.136
8. Jumlah Wisman (Juta Orang)	1,17	1,22	1,22
9. Total APBD (Trilyun Rp.)	13,48	17,99	
10. Jumlah Penduduk Bekerja (Juta Orang)	3,56	3,53	3,54

Deskripsi	2005	2006	2007
INVESTASI			
1. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Berlaku (trilyun Rp)	160,10	179,30	209,08
2. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Konstan (trilyun Rp)	101,00	105,30	110,28
3. ICOR	4,9	4,8	4,7
4. Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta (Trilyun Rp)	6,60	7,45	7,93
5. Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	4,12	4,16	3,79

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Menurut Sektor
Tahun 2005-2007**

Deskripsi	2005	2006	2007
1. Pertanian	0,98	0,71	0,92
2. Pertambangan	-7,24	1,87	0,46
3. Industri Pengolahan	5,07	4,82	4,68
4. Listrik, Gas & Air Bersih	6,95	4,99	4,44
5. Bangunan	5,89	7,12	7,62
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	7,89	6,59	7,04
7. Pengangkutan & Komunikasi	13,26	12,31	14,65
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,10	4,23	4,40
9. Jasa-jasa	5,06	5,42	6,07
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	6,01	5,90	6,39
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI tanpa MIGAS	6,06	5,91	6,41

**Tabel 3. Matrik Indikator Makro Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2007**

Deskripsi	2005	2006	2007
SOSIAL			
1. Jumlah Penduduk (Juta Orang)	8,70	8,76	8,81
2. Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	4,18	4,12	4,08
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,73	14,31	13,27
4. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)		407,1	405,7
5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)		4,6	4,48
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,53	1,53	1,52
7. Angka Kematian Bayi (IMR)	14,2	14,0	13,2
8. Angka Harapan Hidup (e_0)	74,00	74,14	74,28
9. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,94	11,10	11,16
10. Angka Melek Huruf (%)	99,65	98,34	98,51
11. Angka Partisipasi Sekolah			
a. 7 - 12 Tahun	97,99	98,46	98,55
b. 13 - 15 Tahun	92,00	90,16	90,45
c. 16 - 18 Tahun	60,82	60,26	61,90